

CATATAN AKHIR TAHUN 2024

PELUANG DAN TANTANGAN PERBAIKAN RUANG EKOLOGIS DI REZIM BARU

Sepanjang 2024, persoalan ekologis masih terus terjadi. Belum ada gebrakan nyata dari rezim baru untuk mengatasinya.



DAFTAR ISI

Prolog.....	1
Sorotan Isu LHK Sepanjang 2024.....	3
A. Deforestasi, Hutan Alam Riau Tinggal Sepenggal.....	3
B. Hotspot Menjulung, Karhutla Melenggang.....	6
C. Jeritan Hutan Riau: Temuan Lapangan Penebangan Hutan Alam dan Perusakan Gambut ...	10
D. Banjir Menerjang, Korporasi Angkat Tangan.....	20
E. Perhutanan Sosial: Hutan Dikelola, Hutan di Jaga.....	26
F. Konflik Masyarakat vs Korporasi: Tercerabutnya Masyarakat dari Tanahnya.....	28
G. Hutan Telah Hilang, Tuk Belang Mulai Berang.....	31
H. Benang Kusut RTRWP Riau.....	35
I. APP Tebang Kayu Alam, Jikalahari dan ICEL Lapor Gakkum KLHK.....	37
J. Korupsi Surya Darmadi: Merusak Hutan, Merugikan Negara.....	38
K. Tak Ada Lagi Kriminalisasi Bagi Pejuang Lingkungan.....	40
L. Komitmen Pemerintah untuk Ekologis: Apa saja Prioritas Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan dalam 5 Tahun Mendatang.....	42
M. Vonis Perambah Kawasan Hutan: Kait Kelindan Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan 45	
N. FSC dan Remedy Framework: Bisakah APP dan APRIL Wujudkan Keberlanjutan dan Tak Rusak Hutan.....	48
O. Kajian Komitmen NDPE dan Pembiayaan Industri Pulp dan Kertas di Indonesia.....	50
P. Kajian Peran Sektor Pendanaan untuk Hentikan Kerusakan Ekologis dan Konflik Sosial.....	52
Q. Pembohongan Publik pada COP29 di Azerbaijan.....	55
R. Kabinet Merah Putih: Seberapa Krusial Isu Ekologis jadi Perhatian.....	57
S. Masa Depan Suram Pemberantasan Korupsi: KPK Lama vs KPK Baru.....	60
T. Pemimpin Riau Baru: Pertaruhan Masa Depan Ruang Ekologis Riau.....	64
Epilog.....	66
Lampiran.....	70
A. Tabel Tutupan Hutan Tersisa dan Deforestasi Riau 2024.....	70
B. Tabel Tutupan Hutan Tersisa dan Deforestasi per Kabupaten di Riau 2024.....	70
C. Tabel Tutupan Hutan Tersisa di Kawasan IUPHHKHT 2024.....	70
D. Tabel Deforestasi di Kawasan IUPHHKHT 2024.....	72
E. Tabel Tutupan Hutan Tersisa di Perkebunan Sawit Riau 2024.....	72
F. Tabel Deforestasi di Perkebunan Sawit Riau 2024.....	74
G. Tabel Tutupan Hutan Tersisa di Kawasan Konservasi Riau 2024.....	75
H. Tabel Deforestasi di Kawasan Konservasi Riau 2024.....	76



Prolog

Pelibatan Publik Mendorong Pilkada Pro Ruang Ekologis

Memaknai partisipasi publik bermakna, demi adanya perubahan untuk perlindungan ruang ekologis

Tahun 2024 merupakan tahun Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pesta demokrasi ini akan melahirkan pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan. Pertama, pada Februari dilangsungkan Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Kedua, pada November dilangsungkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Walikota.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta pemilih dengan proporsi pemilih pada generasi Z sebanyak 46,7 juta orang dan generasi millennial sebanyak 68,8 juta orang, kedua generasi ini mendominasi pemilih pada Pemilu 2024 yaitu 56,45 persen dari total pemilih di Indonesia.

Artinya, Generasi Z dan millennial memiliki peran penting terhadap masa depan ruang ekologis untuk makhluk hidup dan partisipasi publik dipertaruhkan dalam Pemilu. Pertaruhan ini bermuara pada komitmen melestarikan ruang ekologis di tengah kerusakan ekologis yang dibiarkan oleh rezim sebelumnya.

Berdasarkan data Jikalauhari, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) oleh pelaku kejahatan juga bersumber dari kebijakan dan keputusan politik. Pemberian izin yang tidak sesuai prosedur, terdapat korupsi serta tanpa partisipasi masyarakat adalah kebijakan yang sesat dan mengakibatkan kerugian perekonomian. Dampaknya, banjir, karhutla, konflik agraria dan konflik manusia dan satwa liar masih dirasakan hingga kini.

Untuk mendapatkan pemimpin yang pro terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, Jikalauhari mendorong Pemilu untuk makhluk ekologis yang artinya pemilu untuk memilih eksekutif dan legislatif yang memperhatikan dan memprioritaskan isu ekologis. Sebab, tanpa air, udara, pangan, hutan, oksigen serta keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, manusia akan punah.

Pada Oktober 2023, Jikalauhari bersama Koalisi di 8 provinsi yaitu; Eyes on the Forest, Walhi Riau, Walhi Jambi, Walhi Sumatera Selatan, KSPPM, Point Kalimantan Barat, Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Timur dan Walhi Papua melakukan audiensi ke KPU RI untuk mendorong KPU mewujudkan Pemilu untuk makhluk ekologis, salah satunya dengan memasukkan isu lingkungan hidup dan kehutanan dalam visi dan misi para calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh tiga calon. Jika dilihat dari dokumen visi dan misi, ketiga calon tersebut telah memasukkan misi yang berkaitan dengan ekologis.

1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, isu ekologis menjadi bagian dari Misi Ketiga yang mereka usung: Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.
2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadikan isu lingkungan bagian dari Misi Kedua: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meletakkan isu lingkungan sebagai bagian dari Misi Keenam: Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi biru dan hijau.



Dari ketiga calon ini, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi politik dengan memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah sebesar 164.270.475 suara.

Setelah terpilih, pasangan Prabowo dan Gibran harus tetap dikawal untuk memastikan komitmen ekologisnya dijalankan. Berikut beberapa aksi yang tuangkan dalam visi dan misi Prabowo - Gibran:

- Menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.
- Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.
- Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
- Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Setelah Pilpres dan Pileg selesai, pada November 2024, Indonesia kembali melangsungkan Pemilu untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Riau salah satu provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta bupati/walikota di 12 kabupaten/kota lainnya .

Dalam Pilkada Riau, Jikalahari mendorong agar calon kepala daerah memasukkan isu ekologis untuk menyelesaikan persoalan ekologis yang terus terjadi seperti karhutla (karhutla), banjir, konflik agraria, konflik satwa serta kriminalisasi masyarakat adat dan tempatan oleh korporasi.

Jikalahari menyerahkan langsung Brief Pilkada Riau 2024 kepada KPU Riau yang berjudul Komitmen Cagub - Cawagub Riau Hanya Formalitas, Tidak Ada Aksi Nyata. Brief ini membedah visi dan misi ketiga calon gubernur dan wakil gubernur, dari visi dan misi serta program kerja yang disampaikan, paslon belum menjawab akar persoalan ekologis di Riau.

Ketiga paslon juga tidak berani dengan tegas untuk mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan SDA, berkomitmen memperluas ruang kelola bagi masyarakat, bahkan tidak ada satupun yang menyentuh perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Upaya Jikalahari untuk memasukkan isu ekologis dalam Pilkada Riau diterima oleh KPU, Jikalahari merekomendasikan salah satu tim perumus debat calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu tugas tim perumus adalah merumuskan persoalan ekologis yang terjadi di Riau dan menyusun pertanyaan untuk memperdalam pemahaman paslon.

Jikalahari melakukan pengawalan dalam proses pilkada untuk memastikan agar isu perlindungan ruang ekologis menjadi perhatian pembuat kebijakan. Mengingat masih banyaknya persoalan ekologis di Riau yang saban tahun tak pernah terselesaikan dan makin hari semakin parah. Ini yang Jikalahari coba potret dalam Catatan Akhir Tahun ini. Bahwa persoalan ekologis di Riau sepanjang 2024 terus berulang seperti karhutla, banjir, konflik agraria, konflik satwa, ilegal logging serta kriminalisasi masyarakat adat dan tempatan.

CAT ini juga menyajikan advokasi dan kampanye yang dilakukan Jikalahari sepanjang 2024, mulai dari kebijakan, laporan kasus hingga pendampingan masyarakat. CAT ini juga untuk melihat sejauh mana implementasi visi dan misi baik presiden dan wakil presiden terpilih dan gubernur dan wakil gubernur terpilih disandingkan dengan fakta persoalan di Riau.



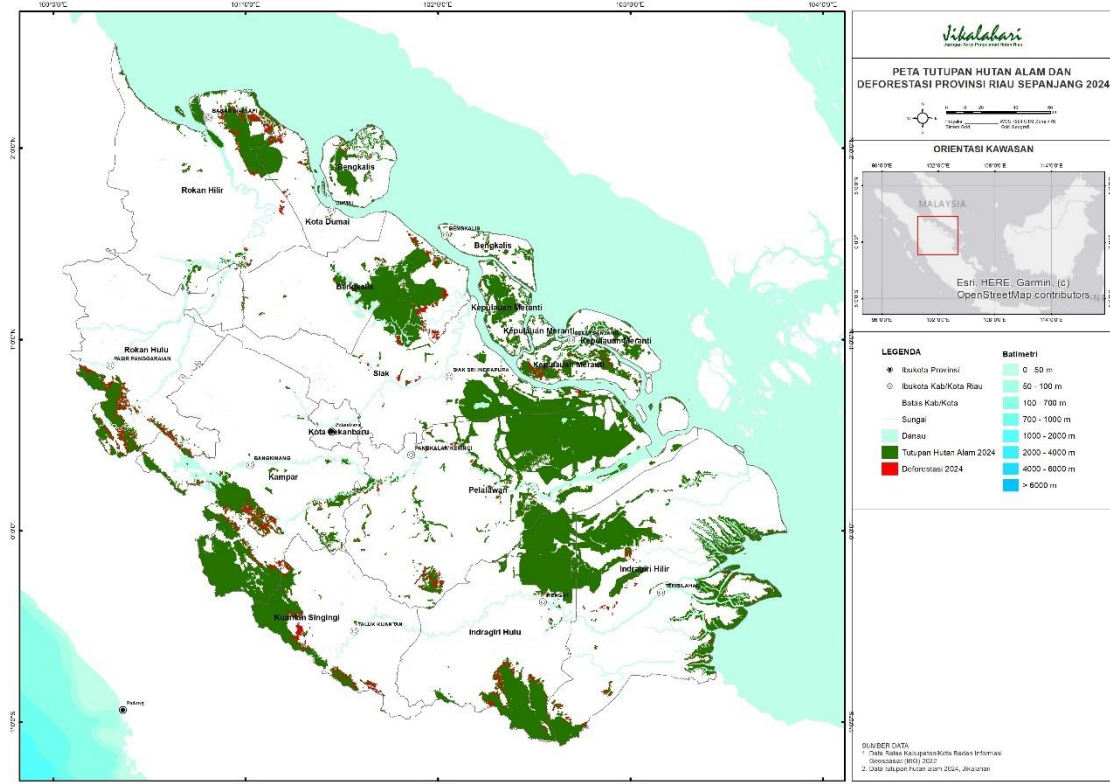
Sorotan Isu LHK Sepanjang 2024

Jikalahari merangkum isu-isu hangat serta temuan lapangan ataupun kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan yang patut menjadi perhatian. Catatan singkat dari isu-isu ini menunjukkan bahwa persoalan ekologis yang ada, masih mengulang apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Bahkan solusi konkret dari pemerintah menyoal permasalahan ekologis ini masih belum tampak hilalnya. Mari simak sorotan isu LHK sepanjang 2024 yang berhasil Jikalahari kumpulkan.

A. Deforestasi, Hutan Alam Riau Tinggal Sepenggal

Jikalahari melakukan analisis bukaan tutupan hutan alam tersisa (deforestasi) di Riau sepanjang 2024 melalui citra Mosaic API Planet 2024. Ditemukan terjadi peningkatan deforestasi di Riau pada 2024 mencapai 22.172 ha, dibandingkan 2023 terjadi peningkatan luas deforestasi mencapai 1.474 ha.

Peta 01. Peta tutupan hutan alam tersisa dan deforestasi di Riau sepanjang 2024



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Tabel 01. Series data deforestasi Riau 1982 – 2024

SERIES	DEFORESTASI	DURASI	RERATA DEF/TH
1982 - 2002	3.347.218	20	167.361
2002 - 2004	261.705	2	130.852
2004 - 2005	158.513	1	158.513
2005 - 2007	375.539	2	187.769
2007 - 2009	183.295	2	91.648
2009 - 2012	395.711	3	131.904
2012 - 2015	360.359	3	120.120

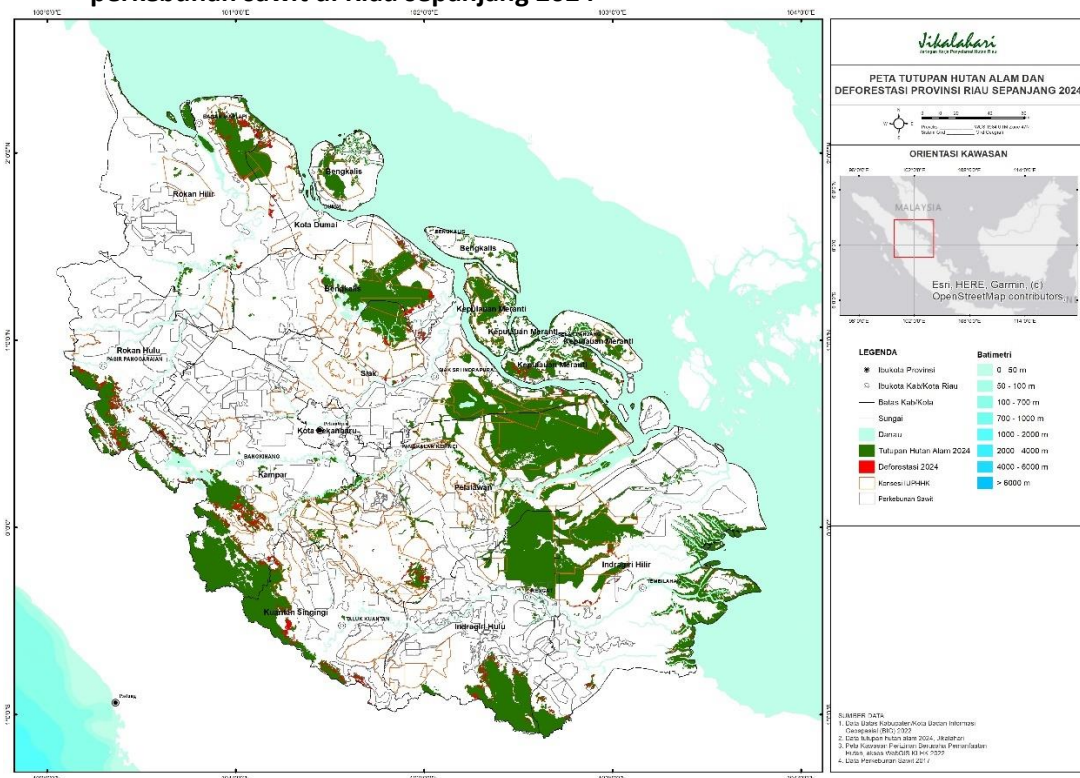


2015 - 2017	155.796	3	51.932
2017 - 2018	13.669	1	13.669
2018 - 2019	33.072	1	33.072
2019 - 2020	15.306	1	15.306
2020 - 2022	28.781	2	14.390
2022 - 2023	20.698	1	20.698
2023 - 2024	22.172	1	22.172

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Saat ini, hutan alam tersisa di Riau hanya seluas 1.339.437 ha. Tutupan hutan alam terbanyak berada di Pelalawan mencapai 226 ribu ha sedangkan deforestasi tertinggi terjadi di Kampar mencapai 3.703 ha. Tutupan hutan alam tersisa juga masih ditemukan di areal perusahaan (IUPHHK dan sawit) seluas 302.881 ha, pada kawasan konservasi seluas 484.943 ha dan sisanya 551.612 ha berada pada kawasan lainnya¹.

Peta 02. Peta tutupan hutan alam tersisa dan deforestasi di areal korporasi HTI dan perkebunan sawit di Riau sepanjang 2024



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

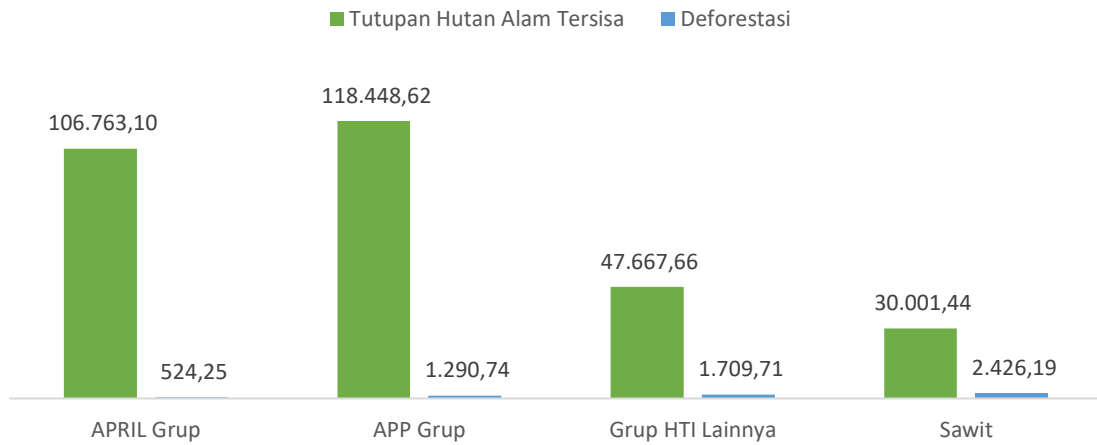
Dari analisis Jikalahari, terdapat sekitar 5.951 ha luas deforestasi yang terjadi di kawasan perusahaan (IUPHHK dan sawit) dan 4.271 ha deforestasi pada kawasan konservasi, sedangkan sisanya berada pada kawasan lainnya.

¹ Pada pengerjaan tutupan hutan alam 2023, Jikalahari menggunakan data batas administrasi kabupaten atau kota yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, sedangkan pengerjaan untuk tahun 2024 menggunakan data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial tahun 2022. Dari kedua data ini terdapat perbedaan bentuk dan luasan dari masing masing kabupaten/kota sehingga perhitungan luasan hutan mengalami perubahan, selisih luasan ini sekitar 16.276 ha hutan yang berada di perbatasan Riau tidak terhitung atau masuk dalam data terbaru.



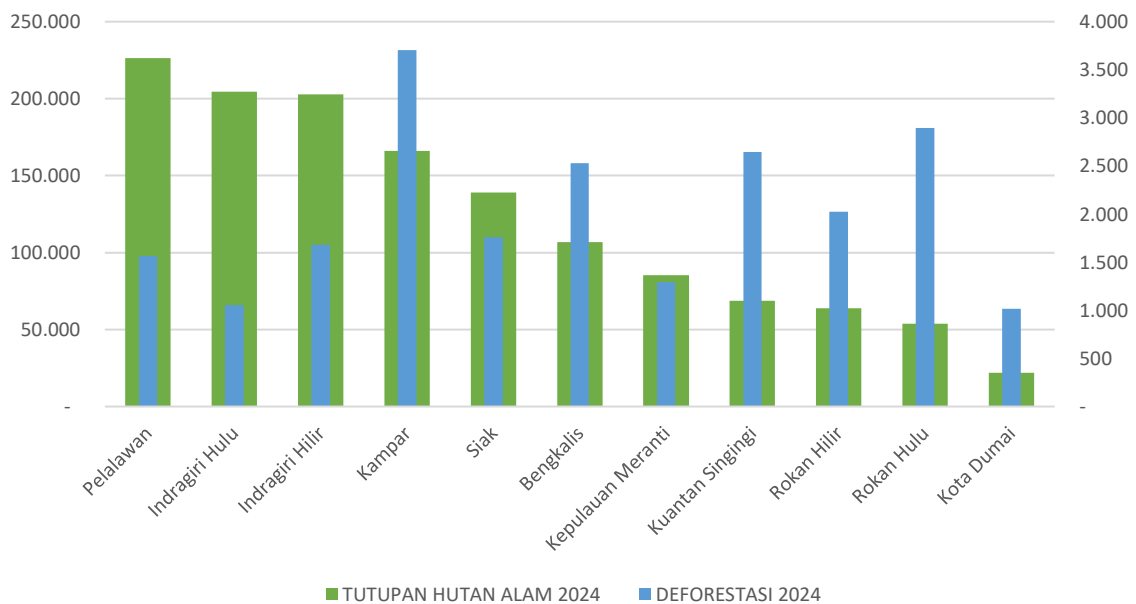
Pada izin IUPHHK-HTI, perusahaan dengan luasan deforestasi tertinggi berada pada PT Suntara Gajapati, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, dan PT Satria Perkasa Agung. Pada perusahaan sawit, deforestasi tertinggi terjadi di PT Wana Subur Sawit Indah, PT Uni Seraya, PT Toba Indah, PT Tani Swadaya Perdana, dan PT. Anugerah Niaga Sawindo. Deforestasi pada kawasan konservasi paling banyak berada pada HL Bukit Betabuh Lubuk Jambi dan paling sedikit berada di CA. Bukit Bungkok. *(List deforestasi per perusahaan HTI, sawit dan areal konservasi terlampir)*

Grafik 01. Tutupan hutan tersisa dan deforestasi di Riau berdasarkan Grup HTI di 2024



Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

Grafik 02. Tutupan hutan tersisa dan deforestasi di Riau per kabupaten di 2024



Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024



B. Hotspot Menjulung, Karhutla Melenggang

Jikalauhari mengumpulkan data terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla yang terjadi di Riau dalam periode 2020 – 2024. Menurut data Sipongi KLHK, dalam 5 tahun terakhir, luas kawasan terbakar di Riau mengalami penurunan di 2020 hingga 2022, kemudian mengalami kenaikan di 2023 dan 2024. Luas kawasan terbakar sepanjang 2024 seluas 10.674 ha, angka ini menunjukkan peningkatan luasan lahan terbakar sebanyak 47% dari tahun sebelumnya (2023). Pada 2024, Kebakaran hutan dan lahan paling tinggi berada di Indragiri Hulu seluas 2.222 ha dan tidak tercatat adanya kebakaran di Pekanbaru.

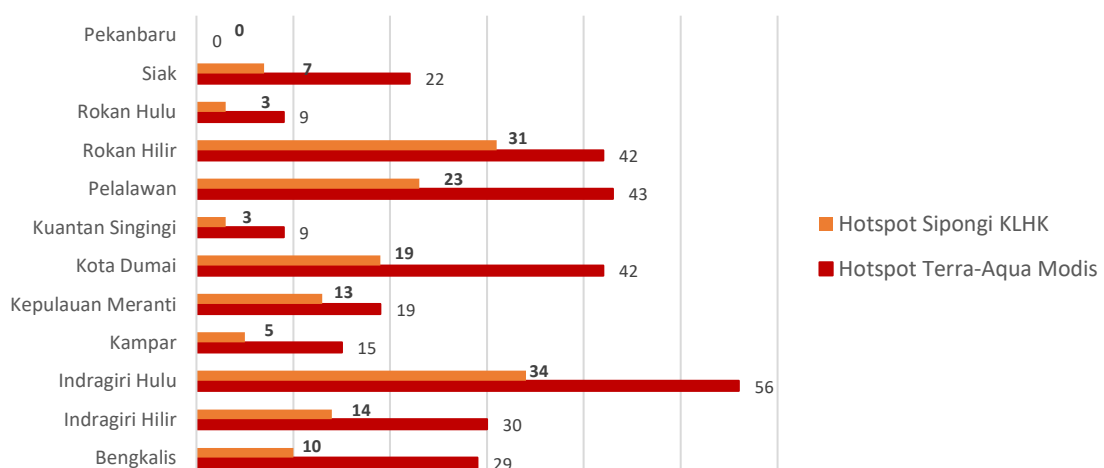
Tabel 02. Rekap luas karhutla di Riau periode 2020 - 2024

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024	Total
BENGKALIS	4.728	2.478	273	1.323	557	9.359
PELALAWAN	2.148	2.157	652	676	1.982	7.615
KEPULAUAN MERANTI	4.394	600	3	100	1.941	7.038
ROKAN HILIR	1.170	1.686	2.074	721	1.085	6.736
INDRAGIRI HULU	440	91	394	1.800	2.222	4.947
DUMAI	1.252	963	461	771	533	3.980
INDRAGIRI HILIR	633	407	11	1.002	981	3.035
SIAK	562	433	18	38	380	1.431
KAMPAR	19	83	160	530	569	1.361
ROKAN HULU	-	72	807	174	173	1.226
KUANTAN SINGINGI	88	-	45	129	250	513
PEKANBARU	8	-	17	3	-	28
Total	15.442	8.970	4.915	7.267	10.674	47.268

Sumber: Sipongi KLHK

Jikalauhari juga melakukan analisis hotspot yang muncul di Riau sepanjang 2024 melalui data satelit Terra- Aqua Modis-C6. Dengan Confidence >70%, sepanjang 2024 ditemukan ada 316 hotspot yang berpotensi menjadi titik api di Riau. Hotspot terbanyak berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah 56 titik, dan tidak terdapat titik panas di Pekanbaru. Sedangkan menurut data hotspot di situs Sipongi KLHK, sepanjang 2024 hotspot di Riau dengan confidence tinggi berjumlah 162 titik.

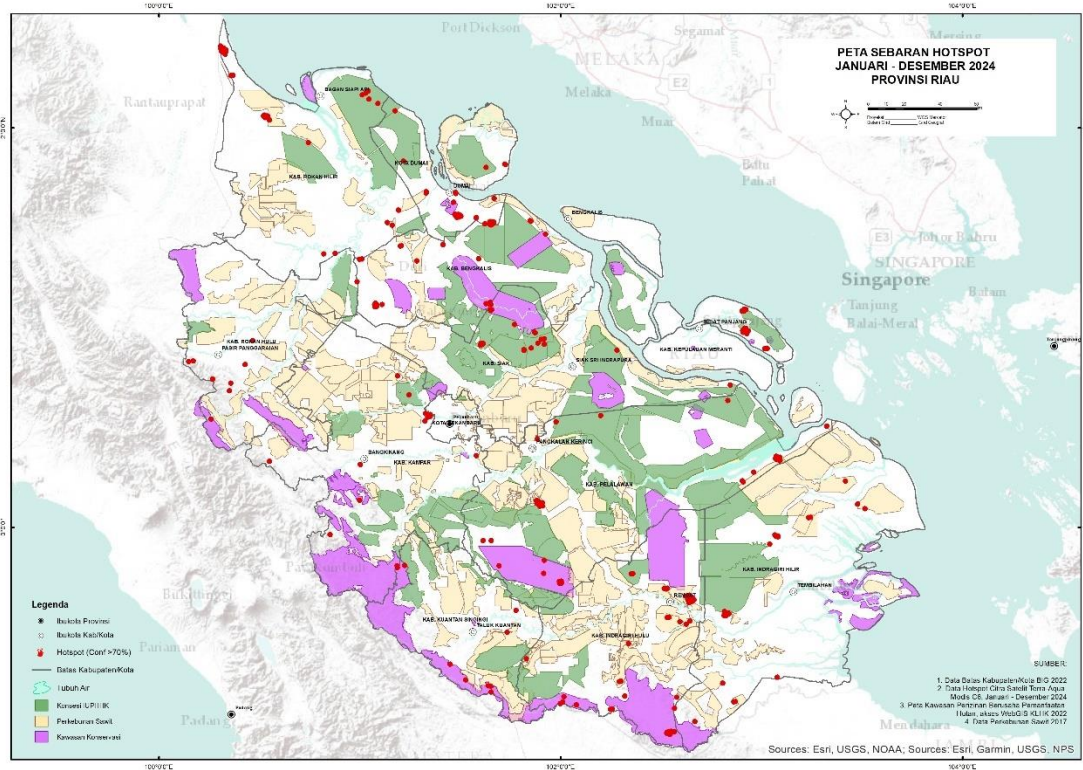
Grafik 03. Jumlah Hotspot di Riau pada 2024 versi Terra-Aqua MODIS dan Sipongi KLHK



Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024



Peta 03. Peta sebaran hotspot di Provinsi Riau sepanjang 2024



Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

Dari analisis ini juga ditemukan bahwa terdapat hotspot pada kawasan konsesi HTI dan perkebunan sawit berjumlah 78 titik atau sekitar 25% dari total hotspot Riau. Hotspot tertinggi di kawasan perusahaan berada di PT Arara Abadi dengan jumlah 10 titik.

Tabel 03. Jumlah Hotspot Conf>70% di areal IUPHHKHT selama 2024

GROUP / PERUSAHAAN	JUMLAH HOTSPOT
APRIL	15
PT MITRA KEMBANG SELARAS	2
PT PERANAP TIMBER (DH. PTUNISERAYA)	1
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	3
PT SERAYA SUMBER LESTARI	5
PT SUMATERA RIANG LESTARI	3
PT TUAH NEGERI	1
APP	14
PT ARARA ABADI	10
PT BALAI KAYANG MANDIRI	2
PT SUNTARA GAJAPATI	2
UNKWON	5
PT DIAMOND RAYA TIMBER	5
Grand Total	34

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

**Tabel 04. Jumlah Hotspot Conf>70% di areal Perkebunan Sawit selama 2024**

PERUSAHAAN	JUMLAH HOTSPOT
PT ALAM SARI LESTARI	3
PT ARIAN MULTI KAWA	1
PT Arvena Sepakat	2
PT BERTUAH ANEKA YASA	1
PT Bumi Reksa Nusasejati	1
PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	1
PT GUNTUNG IDAMAN NUSA	2
PT KILAU KEMUNING	1
PT KURNIA MAS	1
PT LANGGAM INTI HIBRINDO	4
PT Meganusa Intisawit	1
PT MURINI WOOD INDAH INDUSTRY	1
PT PARAWIRA ABADITAMA	1
PT PERKEBUNAN II (S. AIR BAYAS)	8
PT RANTAU BAIS FAMILI	2
PT SURYA BUANA BERSAMA	9
PT Surya Dumai Agrindo	1
PT TANI SUBUR MAKMUR	3
PT TH Indo Plantations	1
Grand Total	44

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Selain di areal korporasi HTI dan perkebunan sawit, hotspot juga ditemukan di kawasan konservasi sepanjang 2024 berjumlah 38 titik. Hotspot paling banyak ditemukan pada kawasan SM. Giam Siak Kecil sebanyak 10 titik.

Tabel 05. Jumlah Hotspot Conf>70% di areal Konservasi selama 2024

NAMA KAWASAN	JUMLAH HOTSPOT
TN. BUKIT TIGAPULUH	8
TN. TESSO NILLO	7
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	3
SM. GIAM SIAK KECIL	10
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	9
HL. SUNGAI ROKAN	1
Grand Total	38

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Hotspot lahan gambut di Riau sepanjang 2024 berjumlah 233 titik atau sekitar 74% dari total hotspot keseluruhan, sisanya 83 titik berada di lahan mineral. Hotspot lahan gambut paling banyak berada di gambut dalam dengan kedalaman lebih dari 4 meter.

Tabel 06. Jumlah Hotspot Conf>70% di areal gambut per kabupaten selama 2024

Kabupaten / Kota	> 400	200 - 400	100 - 200	50 - 100	Grand Total
Bengkalis	9	9	6	2	26
Indragiri Hilir	21	3	1	0	25

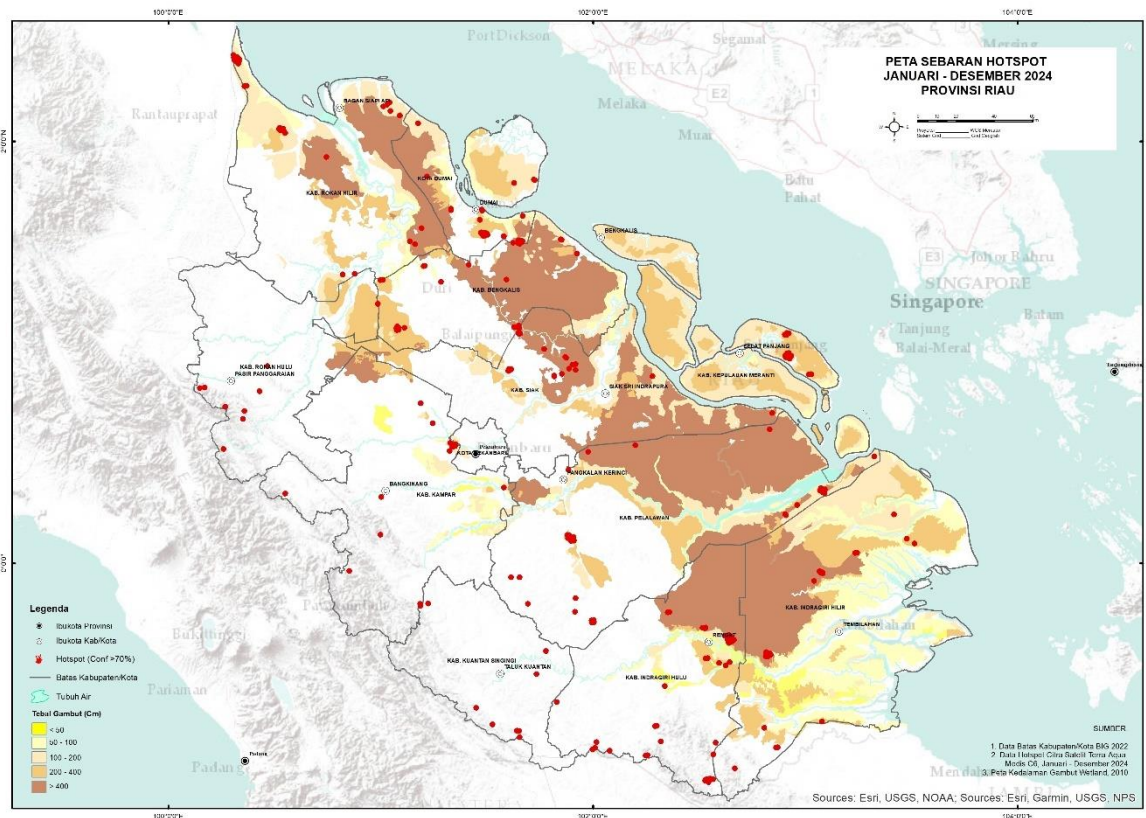


Indragiri Hulu	27	4	4	1	36
Kampar	0	0	5	0	5
Kepulauan Meranti	0	19	0	0	19
Kota Dumai	6	14	15	3	38
Pelalawan	12	8	9	0	29
Rokan Hilir	5	3	32	0	40
Rokan Hulu	0	1	0	0	1
Siak	12	0	2	0	14
Grand Total	92	61	74	6	233

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Hotspot lahan gambut paling banyak berada di Kab Rokan Hilir, tidak terdapat hotspot lahan gambut di Kuantan Singingi dan Pekanbaru.

Peta 04. Peta sebaran hotspot di kawasan gambut di Provinsi Riau sepanjang 2024



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024



C. Jeritan Hutan Riau: Temuan Lapangan Penebangan Hutan Alam dan Perusakan Gambut

Dari hasil analisis bukaan tutupan hutan alam, Jikalahari melakukan pemantauan lapangan untuk melihat langsung di mana saja lokasi deforestasi, terutama dalam areal konsesi. Selain pengecekan deforestasi, Jikalahari juga menemukan adanya perusakan gambut dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

Sepanjang 2024, Jikalahari melakukan pemantauan di beberapa lokasi di antaranya:

1. Areal Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) yang bekerja sama dengan PT Arara Abadi atas Hutan Rakyat, lokasi ini bersempadan dengan PT Riau Indo Agropalma (RIA) anak usaha PT Arara Abadi, Sinar Mas Grup yang berada di Desa Belantaraya, Pungkat, dan Simpang Gaung, Kecamatan Simpang gaung, Kabupaten Indragiri Hilir,
2. Areal PT Selaras Abadi Utama (SAU) di Sp 2 Teluk Makmur, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.
3. Konsesi PT RAPP Estate Sungai Mandau di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.

Jikalahari menemukan bahwa:

1. Lahan **KTSM**, sempadan dengan **PT RIA**, ditemukan penebangan hutan alam – berdasarkan analisis citra satelit total tebangan seluas 376, 80 hektar yang terdiri atas 60,36 ha berada di Fungsi Hutan Produksi (HP) dan 316,44 ha berada di areal penggunaan lain (APL) dan sudah ditanami akasia sekitar satu minggu, pembuatan kanal baru di gambut dalam dan langsung terhubung ke kanal PT RIA.

Selain itu ditemukan “Nota Kerjasama atas Hutan Rakyat” di tanda tangani oleh pihak pertama PT Arara Abadi dan pihak kedua KTSM serta diketahui Kepala Desa Belantaraya seluas 1.544 ha. Lahan yang dikerjakan berada di 3 Desa yaitu Desa Belantaraya, Pungkat dan Simpang Gaung. Hal itu mendapat penolakan masyarakat Desa Simpang Gaung.

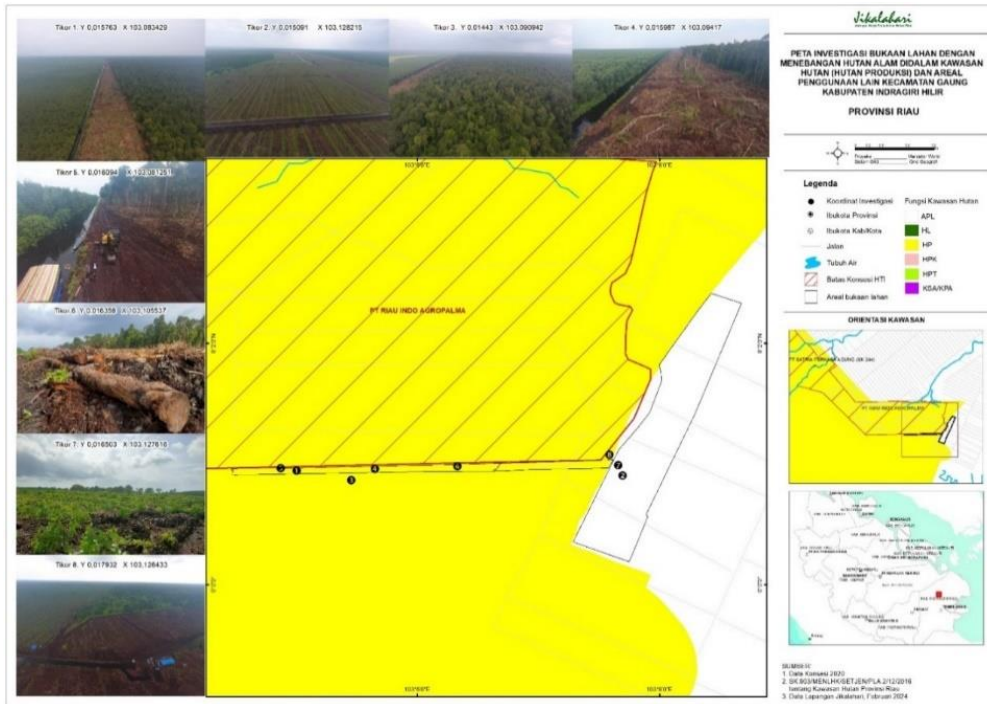
2. Di areal **PT SAU**, ditemukan bukaan hutan alam lebih dari 50 hektar yang dibuka tahun 2023 dan sudah ditanami akasia berumur lebih 3 bulan, pembuatan kanal dengan kedalaman 2 – 4 meter di areal indikatif fungsi budidaya dan berada pada fungsi gambut tidak berkanal.
3. Di PT RAPP Estate Sei Mandau, ditemukan adanya kegiatan penebangan dan pembukaan hutan alam di fungsi hutan APL dan di luar konsesi PT RAPP seluas 83,32 ha dan di APL di dalam konsesi PT RAPP seluas 9,20 ha. Pembukaan hutan alam langsung berbatasan dengan konsesi PT RAPP yang baru saja melakukan pemanenan dan penanaman akasia baru, serta membangun kanal di gambut dalam berukuran lebar 4 meter dengan kedalaman 2 meter dan lebar 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter di fungsi lindung berkanal.

Berikut dokumentasi lapangan.



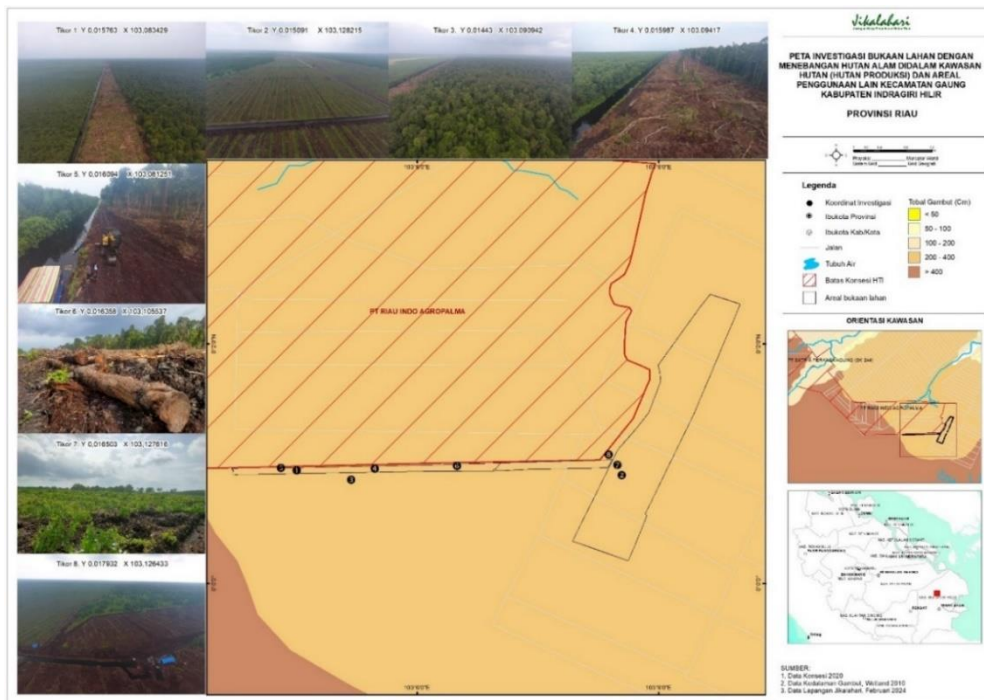
Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM)

Peta 5. Temuan lapangan dioverlay dengan fungsi kawasan hutan Provinsi Riau

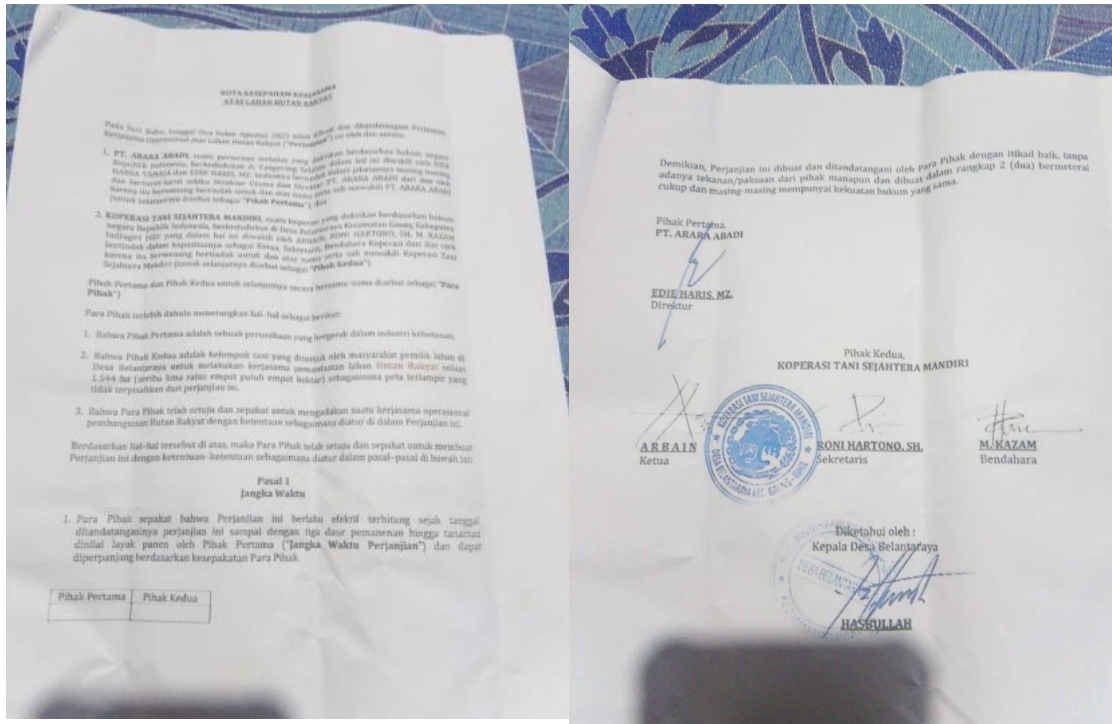


Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Peta 6. Temuan lapangan dioverlay dengan data kedalaman gambut Wetland



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024 Menggunakan Peta Gambut Wetland 2010



Nota kesepakatan atas kerja sama atas hutan rakyat antara PT Arara Abadi dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri Desa Belantaraya, Kecamatan Simpang Gaung, Kab Indragiri Hilir.



Terdapat pembukaan hutan alam, di wilayah administrasi Desa Simpang Gaung, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambar diambil 12 Februari 2024, pada koordinat N0°0'56.75" E103°5'0.34"



Terdapat tanaman akasia baru tanam berumur sekitar 14 hari di fungsi hutan APL, wilayah administrasi Desa Belantaraya, Kec Simpang Gaung, Inhil. Menurut informasi Masyarakat, ini merupakan areal Hutan Rakyat Desa Belantaraya yang dikerja samakan dengan PT Arara Abadi dengan Koperasi TSM. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat N0°0'54.33" E103°7'41.57"



Terdapat tegakan hutan alam yang berbatasan dengan konsesi PT RIA di Desa Simpang Gaung. Menurut informasi dari Masyarakat, areal hutan ini merupakan areal eks. HPH PT Bhara Induk. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat $N0^{\circ}0'51.95''$ $E103^{\circ}5'27.39''$



Terdapat pembukaan hutan alam di wilayah administrasi Desa Pungkat, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat $N0^{\circ}0'57.55''$ $E103^{\circ}5'39.04''$



Terdapat satu unit alat berat milik CV Acoa sedang tidak beroperasi. Berdasarkan informasi dari pekerja alat berat di lapangan, alat berat ini digunakan untuk membuat kanal batas dan menumbang kayu alam. gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat $N 00^{\circ}00'57.9'$ $E 103^{\circ}04'52.4''$



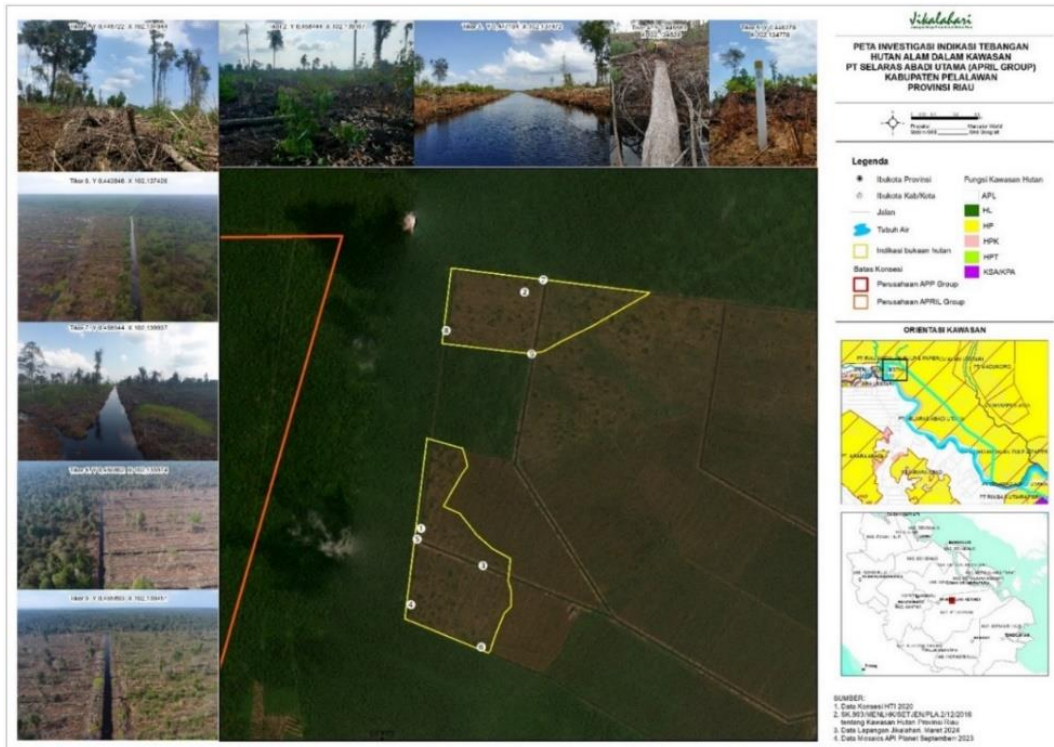
Terdapat kayu alam yang ditebang, dan akasia baru tanam berumur sekitar 7 hari yang berada di wilayah administrasi Desa Pungkat, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat $N 00^{\circ}00'59.0'$ $E 103^{\circ}06'19.7''$



Di bagian kiri, lahan hutan rakyat yang ditanam akasia di wilayah Desa Belantaraya, Inhil. Lahan berada pada fungsi kawasan APL. Gambar berwarna coklat di tengah dan kanan merupakan areal fungsi kawasan hutan produksi telah di tanam akasia. Pola akasia pada APL dan kawasan hutan produksi ini sama. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat $N0^{\circ}1'4.56''$ $E103^{\circ}7'35.16''$

PT Selaras Abadi Utama (SAU)

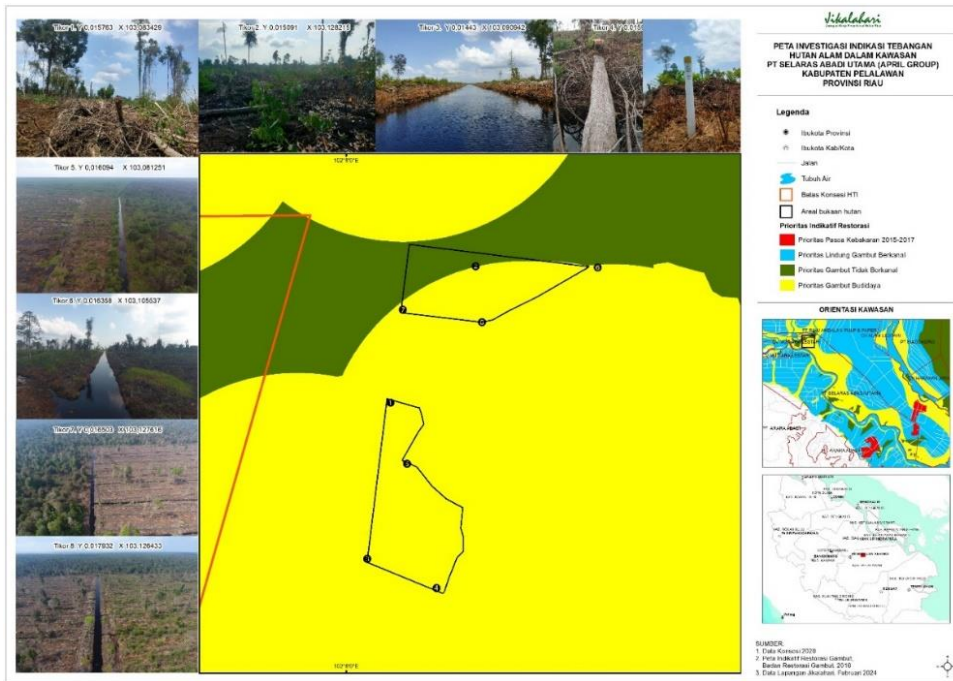
Peta 7. Temuan lapangan yang dioverlay dengan izin konsesi PT SAU dan kawasan hutan Provinsi Riau



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

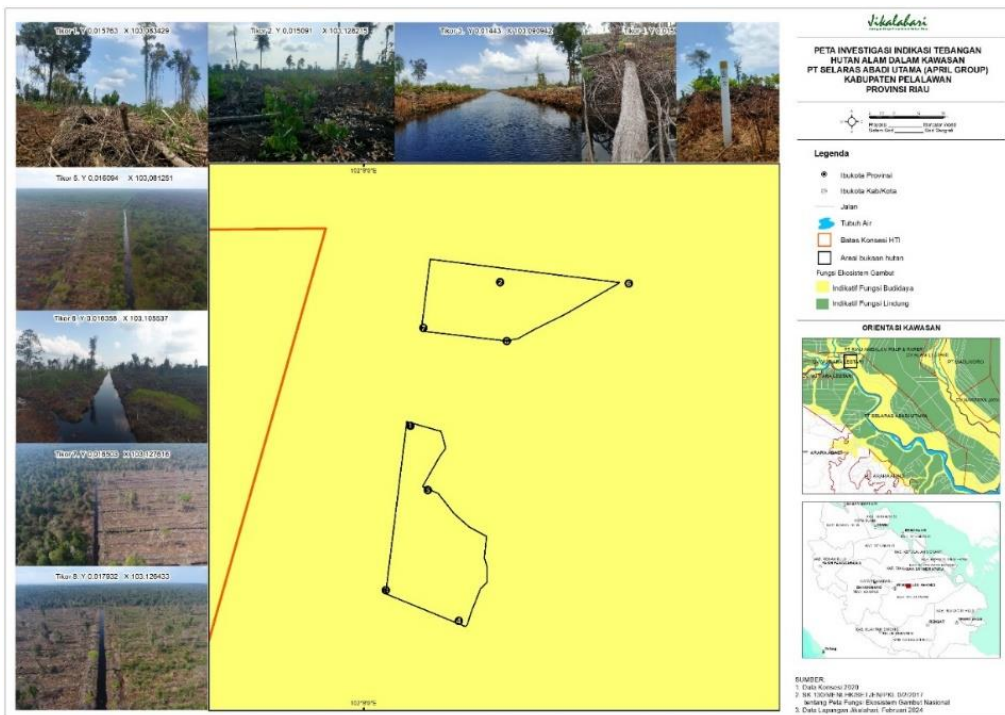


Peta 8. Temuan lapangan yang dioverlay dengan izin konsesi PT SAU, dan peta fungsi ekosistem gambut nasional



Sumber:
Olah Data
Jikalahari
2024

Peta 8. Temuan lapangan yang di overlay dengan Izin konsesi PT SAU, dan peta prioritas indikatif restorasi



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024



Dua galian kanal besar yang berbeda ukuran. Kanal pertama berukuran lebar sekitar 3 meter dengan dalam sekitar 1,5 meter, dan kanal kedua berukuran lebar sekitar 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'49.9" E 102°08'14.9".



Akasia baru tanam dengan umur lebih 3 bulan. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°27'30.4" E 102°08'21.0".



Terdapat tegakan pohon alam dalam areal bukaan. Salah satu jenis pohonnya adalah pohon meranti. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'55.4" E 102°08'05.8".



Terdapat log kayu jenis Meranti berukuran panjang lebih 10 meter dengan diameter lebih 40 cm sudah tumbang. Kayu di potong menggunakan chainsaw. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'44.1" E 102°08'04.3"



Patok PT SAU yang bertulisan PS SAU A.062 31.2 ha. Acara 3x2. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'53.8" E 102°08'05.2"



Terdapat tegakan hutan alam tersisa dalam areal izin PT SAU. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N0°27'24.70" E102°8'9.51"



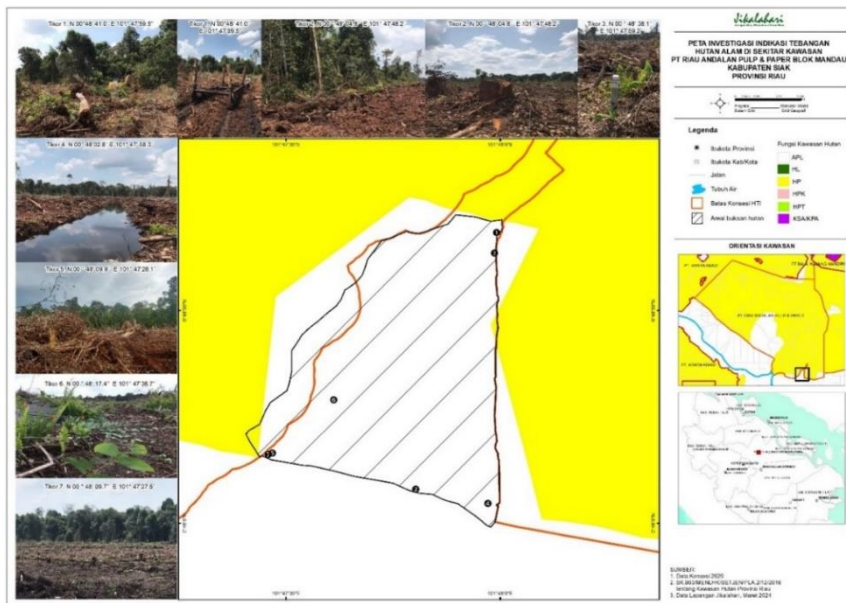
Kanal dengan lebar 6 meter, sebelah kanan gambar terdapat hutan dengan kerapatan sedang dan kurang bercampur Semak belukar, kemudian sebelah kiri gambar merupakan bukaan hutan yang telah di tanam akasia. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N0°26'37.84" E102°8'14.66"



Kondisi Kanal dan bukaan hutan yang telah ditanami akasia dalam areal Konsesi PT SAU. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N0°27'32.20" E102°8'23.77"

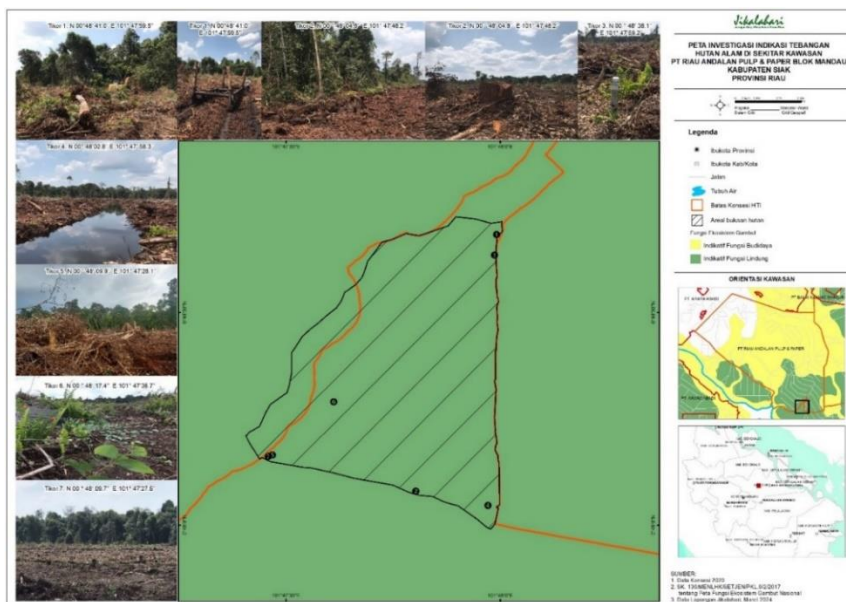
PT RAPP Estate Sei Mandau

Peta 9. Temuan lapangan di konsesi PT RAPP Estate Sungai Mandau dioverlay dengan fungsi kawasan hutan



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Peta 10. Temuan lapangan dioverlay dengan peta fungsi ekosistem gambut nasional.



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024



Terdapat Alat berat Eksavator dan alat pengangkut kayu di pada lokasi penebangan kawasan hutan yang berada di dalam areal PT RAPP dengan koordinat N 00°48' 41.0" E 101° 47'59.5" Gambar diambil pada 19 Maret 2024.



Terlihat bekas pembukaan hutan dan sisa tebangan kayu di areal PT RAPP yang baru dibuka dan tidak terlihat kayu alam yang berserakan sisa dari penebangan. Koordiant lokasi N 00 ° 48'04.8" E 101° 47'48.2" Gambar diambil pada 19 Maret 2024



Patok batas PT RAPP dengan Koordinat N 00 ° 48' 38.1" E 101° 47'59.2" Gambar diambil pada 18 Maret 2024



Terdapat kanal dengan lebar 5 M yang baru di buat sekitar 3 bulan yang lalu menurut pak tondi dengan Koordiant N 00° 48'02.8" E 101° 47' 58.3" Gambar diambil pada 19 Maret 2024



D. Banjir Menerjang, Korporasi Angkat Tangan

Dalam 6 tahun terakhir—periode 2019 – 2024—banjir yang terjadi di Riau semakin memprihatinkan. Hasil penelusuran Jikalauhari, ada 261 kejadian banjir di 592 lokasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. Kejadian banjir terbanyak terjadi pada 2023 mencapai 79 kejadian di 142 lokasi. Bahkan banjir juga menelan korban jiwa. Enam warga meninggal dunia pada 2019—lima orang di Rokan Hulu, satu di Kuantan Singingi²— dan dua orang lainnya pada awal 2024—Pekanbaru dan Rokan Hilir—terseret arus banjir³. Kejadian banjir paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hulu, dan paling sedikit di Kota Dumai.



Pantauhan Jikalauhari, hingga 14 Januari 2024 banjir masih menggenangi Jalan Lintas Timur km 72-84 serta pemukiman masyarakat yang berada di sekitar Jembatan Kerinci. Penyebab banjir merupakan dampak dari hilangnya tutupan hutan alam di sepanjang Sungai Kampar.

Dari hasil analisis Jikalauhari, tutupan hutan alam di Riau telah hilang seluas 2.556.179 ha sepanjang 2000 – 2023, ini setara dengan dua kali luas Kabupaten Pelalawan. Bahkan 50% hutan alam yang hilang ini berada dalam kawasan 215 perusahaan HTI dan perkebunan sawit. Kini hutan alam yang tersisa di Riau hanya seluas 1.377.884 ha⁴ atau seluas Kabupaten Pelalawan.

Apa yang telah dilakukan pemerintah menyikapi persoalan ini?

Banjir yang terjadi dalam 6 tahun belakangan ini saja sudah menimbulkan 8 korban jiwa meninggal, lebih dari 800

ribu jiwa terdampak hingga mengungsi serta 140 ribu unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat terendam banjir.

Sayangnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya melakukan upaya berkaitan dengan pemantauan kondisi terkini pasca banjir terjadi, menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat, melakukan evakuasi dan mendirikan tempat pengungsian, dapur umum dan pos pelayanan kesehatan untuk warga terdampak. Selain itu penyediaan dan distribusi logistik, perahu karet, posko terpadu, pengaturan proses belajar mengajar hingga penetapan status siaga darurat bencana, inilah hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau⁵.

Hal yang selalu dilakukan oleh pemerintah, hanyalah menyentuh persoalan hilir ketika banjir telah terjadi. Penetapan status siaga darurat banjir juga setelah melihat beberapa daerah yang dilanda banjir. Namun belum ada aksi konkret yang dilakukan pemerintah kala banjir belum terjadi. Pemerintah tidak melakukan aksi koreksi dengan mencari apa saja faktor-

² <https://www.antaraneews.com/berita/1217203/enam-warga-meninggal-akibat-banjir-dan-longsor-di-riau>

³ <https://news.detik.com/berita/d-7119436/2-orang-tewas-akibat-banjir-di-riau>

⁴ Analisis Jikalauhari dari olah citra satelit Sentinel-2

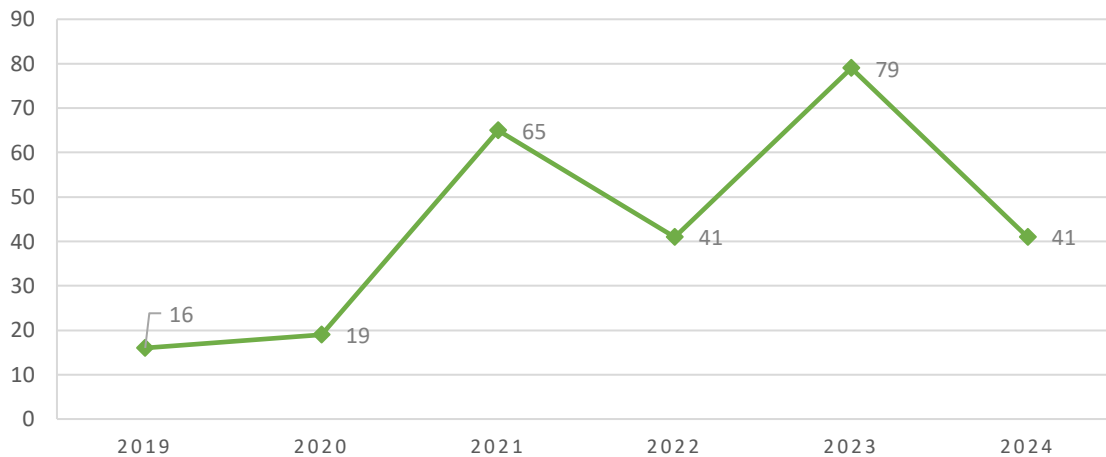
⁵ <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/818508/gubernur-riau-sampaikan-upaya-pemerintah-tanqani-banjir>



faktor yang menyebabkan banjir, selain karena curah hujan yang meningkat kala musim penghujan datang.

Hasil penelusuran Jikalahari dari sumber data Badan Pusat Statistik, Data Informasi Bencana Indonesia, Pusat Krisis kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan PPID per Kabupaten, terdata ada 261 kejadian banjir berada di 592 lokasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau sepanjang 2019 – 2024. Dengan kejadian tertinggi pada 2023 mencapai 79 kejadian yang berada di 142 lokasi. Sepanjang 6 tahun terakhir ini, kejadian banjir paling tinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu, dan paling sedikit di Kota Dumai.

Grafik 04. Jumlah kejadian banjir sepanjang 6 tahun terakhir di Riau



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Tabel 07. Sebaran lokasi terdampak banjir (Desa/Kelurahan) sepanjang 6 tahun terakhir di Riau

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GRAND TOTAL
Rokan Hulu	18	26	20	14	43	8	129
Kampar	8	3	22	5	18	17	73
Bengkalis	-	-	10	28	24	7	69
Kuantan Singingi	14	-	-	-	23	28	65
Indragiri Hilir	14	-	14	14	11	9	62
Indragiri Hulu	11	10	9	8	13	10	61
Rokan Hilir	-	4	2	29	-	13	48
Siak	-	-	10	21	-	2	33
Pelalawan	14	-	1	-	1	6	22
Kepulauan Meranti	-	-	4	5	4	-	13
Pekanbaru	1	1	-	-	2	5	9
Kota Dumai	-	-	-	-	3	5	8
Grand Total	80	44	92	124	142	110	592

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Studi oleh Brown et al. (2019) menunjukkan bahwa hutan-hutan yang utuh berperan penting dalam mengatur siklus air, mengurangi risiko banjir, dan menjaga kestabilan tanah. Ketika hutan-hutan ini dihilangkan, risiko bencana seperti tanah longsor dan banjir cenderung meningkat, mengancam kehidupan manusia dan infrastruktur (Jainuddin, 2023). Pertanyaan



mengapa banjir yang terjadi di Riau belakangan semakin besar dan dampaknya semakin luas, berkorelasi dengan studi yang dilakukan Brown ini.

Hasil analisis Jikalahari terhadap luas tutupan hutan alam tersisa di Riau menunjukkan bahwa sepanjang 24 tahun terakhir⁶, Riau telah kehilangan tutupan hutan alamnya mencapai 2.556.179,06 ha. Selain untuk pemukiman dan infrastruktur, Jikalahari menemukan, 50% dari deforestasi yang terjadi, disumbangkan oleh korporasi HTI dan perkebunan sawit di Riau. Ditemukan, 1.279.651,77 ha hutan alam yang hilang, berada dalam areal izin 49 korporasi HTI



Pembukaan hutan alam di wilayah administrasi Desa Belantaraya, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir

dan 166 perkebunan sawit. Sekitar 866 ribu ha hutan alam yang hilang berada di areal HTI dan sisanya 413 ribu ha berada dalam perkebunan sawit⁷.

Jikalahari juga menganalisis keterkaitan antara meluasnya areal dan dampak banjir dalam 5 tahun terakhir di Riau dengan deforestasi yang terjadi. Deforestasi yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang 2019 hingga 2023 seluas 97.857 ha. Seluas 27.067 ha deforestasi yang terjadi di Riau disumbangkan oleh penebangan hutan alam

tersisa dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perkebunan sawit. Tutupan hutan alam yang terus berkurang, digantikan dengan akasia-eukaliptus serta sawit, berkontribusi terhadap penurunan kekuatan tanah dalam mengatur siklus air dan penyerapannya. Sehingga banjir yang terjadi semakin tahun semakin meluas.

Tabel 08. Data deforestasi dan korelasi dengan jumlah kejadian banjir per tahun

Tahun	Tutupan Hutan alam tersisa (ha)	Deforestasi Keseluruhan (ha)	Deforestasi di Perusahaan (ha)	Kejadian Banjir	Lokasi Terdampak (Desa/Kelurahan)
2019	1.442.669	33.072	8.566,93	16	80
2020	1.427.363	15.306	5.394,32	19	44
2022	1.398.582	28.781	7.361,91	41	124
2023	1.377.884	20.698	5.744,24	79	142

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Dari data di atas terlihat, dengan semakin sedikitnya tutupan hutan alam yang tersisa, kejadian banjir semakin tinggi. Bahkan ketika terjadi peningkatan luas deforestasi, jumlah lokasi terdampak juga semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa pengaruh keberadaan hutan untuk mencegah terjadinya banjir di Riau sangat penting. Hilangnya hutan alam di Riau, berkontribusi pada peningkatan jumlah kejadian banjir dan bertambah banyaknya lokasi

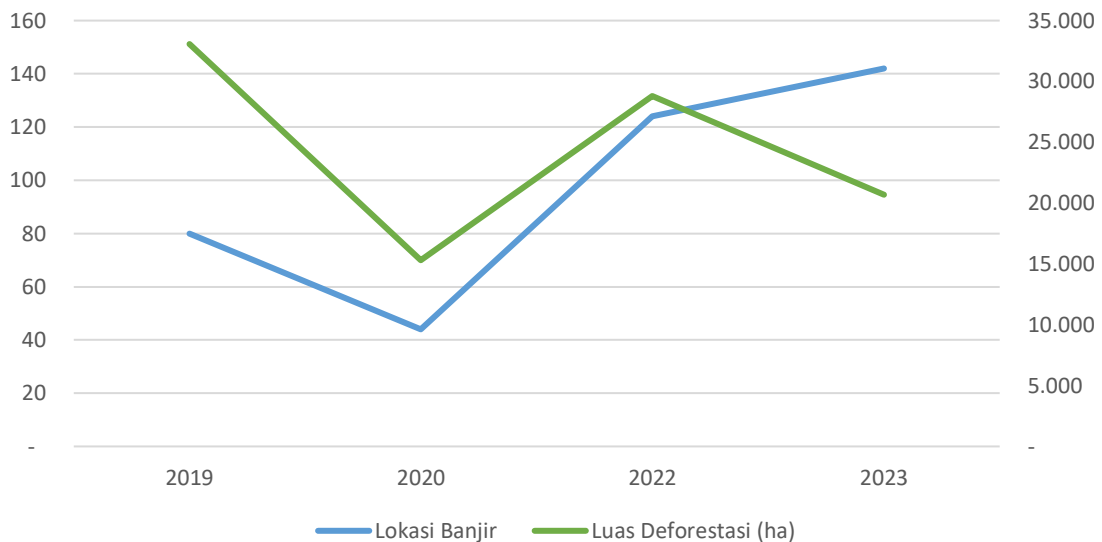
⁶ Jikalahari melakukan analisis tutupan hutan alam tersisa menggunakan metode semi automatic classification citra Sentinel-2 dan mosaic API Planet 2023.

⁷ Bisa saja angka deforestasi yang ditemukan dalam areal korporasi (HTI dan sawit) lebih luas dari yang Jikalahari paparkan. Hal ini karena terbatasnya akses terhadap informasi areal izin konsesi HTI dan Perkebunan sawit yang up to date. Sehingga Jikalahari hanya menggunakan list Perusahaan



terdampak. Deforestasi yang terjadi di Riau jelas menjadi salah satu penyebab banjir semakin parah dari tahun ke tahunnya.

Grafik 05. Hubungan deforestasi dengan jumlah kejadian banjir di Riau.



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024



Pembukaan hutan alam di wilayah administrasi Desa Belantarya, Kecamatan Simpang Gaung,

Deforestasi yang terjadi di Riau, terutama dalam areal yang dibebani izin HTI maupun sawit, menunjukkan bagaimana korporasi tidak dapat mengelola hutan secara lestari. Deforestasi secara besar-besaran ini tentunya merusak sumber daya alam yang tersedia secara alami, baik itu kayu, air, tanah dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Semua ini sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup, baik flora, fauna maupun manusia di sekitarnya. Deforestasi, dalam hal ini menebang hutan alam secara barbar dan tidak memperhatikan aspek berkelanjutan dapat mengancam

ketersediaan sumber daya ini di masa mendatang dan tentunya membahayakan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang (Berkes et al, 2000).

Pemberian izin kepada korporasi baik HTI maupun sawit sudah selayaknya ditinjau ulang. Review terhadap kerja-kerja perusahaan yang jelas memberi pengaruh buruk terhadap lingkungan harus segera dilakukan pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah hanya fokus pada sektor hilir dalam penanggulangan banjir, berupa pemberian bantuan ataupun menyelamatkan warga terdampak pasca banjir terjadi. Namun harus ada aksi nyata jauh sebelum banjir terjadi.

Pertama, Penataan Ruang yang Berkeadilan dan Memperhatikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai dasar dalam mengatur tata kelola ruang dan pemanfaatan di atasnya,



pemerintah harus segera menyusun Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, jangan hanya memperhatikan sektor industri dan mementingkan investasi dan pembangunan infrastruktur. Selain melalui Perda RTRWP, pemerintah juga dapat menyusun RPJMD yang memuat rencana konkret perbaikan kualitas LHK terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penataan ruang ini juga harus jelas memetakan daerah-daerah rentan banjir dan dengan jelas mengatur bahwa apa saja aktivitas baik pembangunan ataupun industri yang tidak diperbolehkan di areal-areal tersebut. Begitu pula untuk pengaturan penggunaan lahan baik untuk konservasi hutan, pemukiman maupun industri.

Penataan ruang ini harus adil menyeimbangkan antara mendorong pembangunan provinsi dan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di Riau. Sebab, percuma jika infrastruktur yang megah dan investasi berlimpah, namun setiap tahunnya masyarakat dihadiahi banjir di awal dan penutup tahun.

Kedua, Review Perizinan. Pemerintah harus mengkaji penyebab utama banjir di Riau dan jujur mengakui, bahwa ini bukan hanya persoalan tata kelola sampah ataupun drainase. Namun ada persoalan hulu yang lebih krusial dan berdampak lebih luas. Bahwa deforestasi dan rusaknya hutan di Riau yang menyebabkan banjir kian tahun semakin berdampak parah. Pemerintah harus mengkaji ulang izin perusahaan-perusahaan yang terbukti telah merusak hutan, menyebabkan deforestasi terutama di area yang berdekatan dengan DAS ataupun area yang memiliki potensi mengalami banjir.

Pemerintah juga harus mengkaji kembali Amdal yang dijadikan dasar dari pengajuan izin perusahaan, apakah benar perusahaan telah beroperasi sesuai dengan rencana tata kelola lingkungan seperti yang mereka paparkan dalam Amdal mereka. Penerapan Amdal yang ketat untuk setiap aktivitas yang berisiko merusak lingkungan harus diintensifkan. Evaluasi berkala terhadap perusahaan harus dilakukan secara rutin dan pengawasan yang independen harus dilakukan. Jika mereka terbukti telah berkontribusi menyebabkan persoalan lingkungan, seperti membuat banjir semakin parah di Riau, sudah saatnya izin korporasi ini harus direview ulang, bahkan dicabut.

Ketiga, Berikan Hak Kelola pada Masyarakat. Pemberian izin pada korporasi yang tidak bertanggungjawab untuk mengelola lingkungan secara lestari adalah bentuk pengabaian pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan tempatan. Dengan diberikannya izin kelola hutan kepada korporasi, jelas telah merampas hak dari masyarakat adat dan tempatan untuk dapat mengelola hutan mereka secara lestari.

Sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat terbukti lebih lestari, di antaranya karena adanya ikatan emosional dan spiritual antara masyarakat dengan hutan. Masyarakat memandang hutan bukan hanya sebagai sumber penghidupan, namun juga sebagai identitas diri dan budaya, sehingga ketika hutan hilang, maka mereka juga kehilangan jati diri mereka⁸.

Tak hanya itu, masyarakat adat dan tempatan juga memiliki pengetahuan mendalam tentang hutan karena mereka telah 'bersehati'⁹ dengan hutan. Mereka akan lebih memahami siklus

⁸ <https://www.panda.id/hutan-adat-sumber-pengetahuan-lokal-manfaat-dan-keberlanjutannya/>

⁹ Berarti telah menyatu, bersatu padu dengan erat. Sehingga hubungan yang erat ini sulit untuk dipisahkan.



Banjir menggenangi Jalan Lintas Timur km 72-84 serta pemukiman masyarakat di sekitar Jembatan Kerinci

alam, cara memanfaatkan dengan mengedepankan keberlanjutan. Sebab mereka akan berpikir agar sumber daya hutan ini dapat juga dirasakan oleh anak cucu mereka kelak. Bahkan studi dari World Research Institute (WRI) menemukan bahwa tingkat kerusakan hutan lebih rendah di areal yang dihuni oleh masyarakat adat dan tempatan dibandingkan dengan yang dikelola oleh industri. Sekitar 80% keanekaragaman hayati justru ditemukan di areal yang dijaga oleh masyarakat adat dan tempatan¹⁰.

Dari analisis peristiwa banjir dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Banjir di Riau, walaupun dapat terjadi secara alami karena faktor alam, juga dapat semakin parah akibat ulah manusia. Ia bukan lagi dikategorikan bencana alam jika campur tangan manusia lebih dominan dalam memperburuk kejadian tersebut. Salah satunya karena maraknya penebangan hutan alam tersisa secara masif.
2. Jelas bahwa keberadaan izin untuk korporasi HTI dan sawit yang menyebabkan deforestasi besar-besaran di Riau menjadi penyebab utama banjir, sehingga dampak banjir semakin luas dan jumlah kejadiannya dari tahun ke tahun semakin meningkat.
3. Dalam 6 tahun terakhir menjadi kejadian banjir terparah yang melanda Riau, pemerintah masih jalan di tempat. Hanya berfokus pada penanggulangan di sektor hilir, tanpa berupaya maksimal untuk memperbaiki akar persoalan yang menyebabkan banjir di Riau.
4. Aksi nyata pemerintah berupa penataan ruang yang berkeadilan dan memperhatikan lingkungan hidup dan kehutanan, review perizinan serta memperluas ruang kelola hutan yang lestari untuk masyarakat adat dan tempatan sebagai solusi penyelesaian banjir masih belum terlaksana.

Jikalahari merekomendasikan agar:

1. Pemerintah harus berani menyatakan bahwa banjir bukan bencana akibat kondisi alam, melainkan akibat ulah manusia yang membabat habis hutan. Sehingga pemerintah harus bertindak menyelesaikan masalah di sektor hulu, bukan hanya di hilir pasca banjir terjadi.
2. Pemerintah harus segera mereview izin lingkungan korporasi HTI dan sawit yang jelas-jelas melakukan deforestasi dan menyebabkan banjir semakin marak terjadi di Riau.
3. Pemprov Riau juga perlu mengusulkan secara tegas kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian ATR/BPN untuk mereview hingga mencabut izin perusahaan yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
4. Pemerintah harus fokus pada penyelesaian persoalan penyebab banjir melalui kebijakan jangka panjang dalam RTRW provinsi maupun kabupaten serta RPJMD yang memuat rencana perbaikan kualitas LHK terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan di Riau untuk mencegah dampak banjir yang lebih luas.

¹⁰ <https://estungkara.id/masyarakat-adat-hutan-adat-dan-perubahan-iklim/>



E. Perhutanan Sosial: Hutan Dikelola, Hutan di Jaga

Hingga Desember 2024, Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan realisasi PS mencapai 260 ribu hektar atau sekitar 20%¹¹ dari target. Namun berdasarkan penelusuran website GoKUPS14¹² selaku sumber informasi terkait perhutanan sosial yang terupdate, usulan PS di Riau yang telah disetujui mencapai 168.177,3 ha dengan jumlah unit SK sebanyak 158, bertambah 16 SK dalam rentang waktu hampir 1 tahun, dan jumlah KK terdampak mencapai 30.495 KK.

Menilik luasan usulan PS yang telah disetujui per provinsi, dari 37 provinsi di Indonesia, Riau menempati posisi ke 17. Diposisi teratas, Kalbar dengan luas usulan 818,7 ribu ha, Papua Selatan 762,6 ribu ha, Kaltara 522,4 ribu ha, Kalteng 480,7 ribu ha dan Papua Barat 424,5 ribu ha.

Untuk mendukung percepatan PS di Riau, rentang tahun 2023 - 2024 Jikalauhari dampingi 13 desa untuk mengusulkan PS total luas 11.150,53 hektar dengan total penerima manfaat sebanyak 3.145. Skema yang diusulkan di antaranya:

- 7 desa dengan skema hutan desa yang berada di areal eks PT Rimba Rokan Lestari (RRL) di Kabupaten Bengkalis seluas 3.614,36 hektar dengan penerima manfaat langsung sebanyak 424 KK
- 2 desa dengan skema hutan desa di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 1.423 hektar dengan penerima manfaat langsung sebanyak 414 KK
- 2 desa dengan skema hutan adat berada di Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan seluas 5.557,77 hektar dengan penerima manfaat langsung sebanyak 2.207 KK, dan
- 2 desa dengan skema hutan desa berada di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 555,4 hektar dengan penerima manfaat sebanyak 100 KK.

Tabel 09. Data Usulan PS Jikalauhari sepanjang 2023 – 2024

No	Desa	Skema	Lokasi	Luas Usulan (ha)	Penerima Manfaat (KK)	Proses
1	Bantan Tengah	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	171,85	50	Sudah Terbit SK
2	Bantan Air	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	111,49	44	Sudah Terbit SK
3	Ulu Pulau	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	280	94	Sudah Terbit SK
4	Sekodi	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	775,02	45	Sudah Terbit SK
5	Bonai	Hutan Adat	Rokan Hulu	2.857,77	2000	Proses Usulan
6	Rantau Baru	Hutan Adat	Pelalawan	2.700	207	Proses Usulan
7	Tanah Merah	Hutan desa	Indragiri Hilir	423	286	Proses Usulan
8	Tanjung Pasir	Hutan desa	Indragiri Hilir	1.000	128	Proses Usulan
9	Bantan Timur	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	1.046	82	Proses Usulan

¹¹ <https://mediacenter.riau.go.id/read/87576/ditarget-13-juta-ha-luasan-perhutanan-sosial-.html>

¹² <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>



10	Penebal	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	1.029	58	Proses Usulan
11	Teluk Lancar	Hutan desa	Areal eks PT RRL, Bengkalis	201	51	Proses Usulan
12	Simpang Gaung	Hutan desa	Areal eks PT Bhara Induk	363,5	50	Proses Usulan
13	Pungkat	Hutan desa	Areal eks PT Bhara Induk	191,9	50	Proses Usulan
Jumlah				11.150,53	3.145	

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Pada 14 September 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Pengelolaan Hutan Desa di 4 desa dampingan Jikalahari yang lokasinya berada di areal eks PT RRL di Kabupaten Bengkalis. Izin PT Rimba Rokan Lestari (RRL) resmi dicabut Presiden Jokowi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Januari 2022 berdasarkan SK.01/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2022.

Pasca terbitnya SK tersebut, pada 20 November 2024 Jikalahari menyerah kepada Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa di 4 desa yang berada di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis seluas 1.085 ha dengan total penerima manfaat langsung 196 KK dan penerima manfaat tidak langsung 2.496 KK. Berikut rinciannya:

Tabel 10. Data Usulan PS Jikalahari sepanjang 2023 - 2024

No	Desa	No. SK	Luas (ha)	Penerima Manfaat Langsung (KK)	Penerima Manfaat Tidak Langsung (KK)
1	Bantan Tengah	9847/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	141	46	1020
2	Bantan Air	9848/MENLHK-PSKL/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	99	38	556
3	Ulu Pulau	9850/MENLHK-PSKL/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	284	73	410
4	Sekodi	9849/MENLHK-PSKL/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	561	39	510
Jumlah			1.085	196	2.496

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Dengan rendahnya realisasi PS di Riau (20%), tunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap akses hak kelola masyarakat atas hutan demi tingkatkan kesejahteraan. Padahal alokasi wilayah PS sangat luas di Riau dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu langkah pelestarian kawasan hutan dan sejalan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.



F. Konflik Masyarakat vs Korporasi: Tercerabutnya Masyarakat dari Tanahnya

Sepanjang 2024 konflik agraria masih terjadi antara masyarakat dan korporasi, baik HTI maupun perkebunan sawit, berikut di antaranya:

1. Konflik Agraria Warga Tebing Tinggi Okura, Tualang dan Maredan Barat Dengan PT Surya Intisari Raya (SIR)

PT SIR menggarap lahan lebih dari 5.000 ha, melebihi dari luasan izin HGU yang diberikan negara sebagaimana tertuang dalam SK HGU PT SIR Nomor 40 Tahun 1994 yakni hanya 3.608 hektare¹³. Konflik bermula dari perbedaan cara pandang antara pihak perusahaan dengan masyarakat terhadap penafsiran penyerahan 20% Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM)¹⁴.

Masyarakat menyampaikan keluhan akibat aktivitas PT SIR ini ke Gubernur Riau, Edy Natar tentang lahan mereka. Mendengar aspirasi tersebut, Edy Natar membentuk tim Satgas Pengendalian Konflik Lahan PT SIR dan memfasilitasi penyelesaian konflik. Kedua belah pihak sepakat dan menunggu Surat Keputusan Calon Petani Penerima (SK CPP) dari Pemkot Pekanbaru.

2. Garuda Bertuah Melayu (GBM) – Petalangan dengan PT Serikat Putra

Konflik lahan yang berkepanjangan antara PT Serikat Putra dengan masyarakat di 13 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Bandar Petalangan dan Kecamatan Bunut telah bergulir di Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan gugatan organisasi masyarakat Garuda Bertuah Melayu (GBM) Petalangan.

Diduga PT. Serikat Putra menanam di luar izin HGU—diperkirakan seluas 400 ha mencakup beberapa desa di Kecamatan Bandar Petalangan dan Bunut—dan berada dalam kawasan hutan sekitar 183 ha. Selain itu PT Serikat Putra juga menanam di sepadan sungai— Sungai Kerumutan, Terbangiang, Air Terjun, Lubuk Ajo, Tanggung Tinggal dan Sadak—sekitar 400 ha sepanjang ±40km¹⁵.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan merespon dengan mengutus Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada 6 September 2024 untuk turun langsung ke PT Serikat Putra yang merupakan anak usaha dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk. Tim akan melakukan peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat obyek tanaman sawit di luar HGU PT Serikat Putra.

3. Kelompok Tani Desa Segati dengan PT Nusantara Sentosa Raya (NSR)

Pada 19 Juni 2024, empat pekerja kebun sawit di Desa Segati, Syafrico, Juli Isnansar, Dede Rahim, dan Rahmadhani, ditangkap paksa sekitar 15 anggota keamanan PT NSR. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di jalan kebun Km 48 Dusun Air Merah¹⁶. Diduga, penangkapan ini ada kaitannya dengan perselisihan antara kelompok tani dan PT NSR.

¹³ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/105787/2023/12/30/konflik-lahan-pt-sir-dengan-masyarakat-fkpmr-dukun-sikap-tegas-gubri-edy-natar#sthash.F1r64EEc.dpbs>

¹⁴ <https://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2024/02/06/210830178/fasilitasi-konflik-lahan-pt-sir-dengan-masyarakat-okura-gubernur-edy-semua>

¹⁵ <https://pelalawanpos.co/news/detail/2826/diduga-kuasai-lahan-diluar-hgu-pt-serikat-putra-di-bandar-petalangan-diukur-ulang>

¹⁶ <https://www.oketimes.com/news/35326/konflik-lahan-pt-nsr-vs-petani-sawit-di-pelalawan-pengacara-dua-polisi-backup-perusahaan.html>



Petani disebut memanen hasil perkebunan yang masuk kawasan hutan, padahal dari informasi beredar bahwa perkebunan yang berbatasan dengan perkebunan perusahaan tersebut sudah terdaftar sesuai Undang Undang Cipta Kerja. Perkebunan tersebut diklaim oleh PT NSR sehingga menyebabkan petani merasa diintimidasi. PT NSR merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan terafiliasi dengan PT RAPP¹⁷.

4. Masyarakat Olak, Mandau dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM)

Sejumlah warga Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, melakukan protes keras kepada PT NPM yang masih terus menggarap lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 285 ha di daerah setempat¹⁸. PT NPM merupakan rekanan PT RAPP yang beberapa tahun lalu sempat terjerat kasus perambahan hutan secara ilegal.

Sejumlah warga Kampung Olak bahkan sudah berkali-kali mendatangi areal tersebut dan meminta perusahaan berhenti bekerja. Pasalnya, perusahaan ini sudah diminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak untuk beranjak dari areal bermasalah itu.

Menurut kelompok warga yang menolak kehadiran PT NPM, Penghulu Kampung (Kades) tidak peduli dengan masukan Pemkab Siak dan permintaan mayoritas warga Olak. Warga mempertanyakan ada apa dengan Penghulu Kampung dan PT NPM tersebut. Padahal penanaman akasia justru sangat merugikan masyarakat, sebab panen sekali lima tahun dengan pembagian yang tidak signifikan.

5. Kerajaan Gunung Sahilan, Kampar somasi PT Nusa Prima Manunggal (NPM)

Sri Paduka yang Dipertuan Agung Raja XII Rantau Kampar Kiri Kerajaan Gunung Sahilan, H Tengku Muhammad Nizar, SH.,Hum., melalui utusannya Dt Bosou H Raylus, didampingi kuasa hukum Irwan, SH.,MH, dan tokoh pemuda Gunung Sahilan Ali Imron, datangi kantor PT Nusa Prima Manunggal (NPM) di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada Jumat (13/12/2024)¹⁹.

Utusan Kerajaan Gunung Sahilan tersebut hendak merundingkan tanah-tanah ulayat yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang salah satunya ialah PT NPM. Saat ini, wilayah Ulayat Kerajaan Gunung Sahilan sudah dikuasai 6 perusahaan HTI yang memiliki afiliasi dengan PT RAPP, tanpa seizin Raja Kerajaan Gunung Sahilan²⁰.

6. Aliansi Masyarakat Sipil Rokan Hilir (Almasri) dengan PT Salim Ivomas Pratama

Aliansi Masyarakat Sipil Rokan Hilir (Almasri) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Rabu (31/7/2024)²¹. Almasri menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Salim Ivomas Pratama (PT SIMP) yang sudah habis sejak 31 Desember 2023, sebelum perusahaan itu melaksanakan

¹⁷ <https://qardapos.com/read/detail/3056/wow-klaim-lahan-masuk-areal-izin-hti-security-pt-nsr-main-tangkap-seoranga-supir-untuk-diproses-di-polres-pelalawan>

¹⁸ <https://riau.antaranews.com/berita/367320/protes-lahan-tetap-ditanami-akasia-warqa-olak-hadana-perusahaan>

¹⁹ <https://www.transparansiindonesia.co.id/2024/12/14/kerajaan-gunung-sahilan-somasi-pt-nusa-prima-manunggal-beraktivitas-diwilayah-ulayat-adat-diduqa-tanpa-seizin-raja/>

²⁰ <https://www.transparansiindonesia.co.id/2024/12/14/kerajaan-gunung-sahilan-somasi-pt-nusa-prima-manunggal-beraktivitas-diwilayah-ulayat-adat-diduqa-tanpa-seizin-raja/>

²¹ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/113154/2024/07/31/konflik-agraria-di-rohil-enam-warqa-semen-kaki-protes-perpanjangan-hgu-pt-simp#sthash.YP6EeYzZ.dpbs>



kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKMS). Aksi ini digelar ekstrem lantaran enam pengunjung rasa menyemen kaki. Enam pengunjung rasa yang menyemen kaki adalah Sumarmi (48), Lisa (36), Suherdi (49), Mujiyem (48), Arman JM (67), dan Untung Prayitno (64).

7. *Petani Desa Sungai Raya dan Skip Hilir dengan PT Sinar Belilas Perkasa*

Konflik bermula setelah PT Sinar Belilas Perkasa (SBP), milik Dedi Handoko, membeli kebun sawit PT Alam Sari Lestari (ASL) yang telah pailit. Permasalahan muncul ketika alat berat milik PT SBP memasuki lahan masyarakat di Desa Sungai Raya dan Skip Hilir. Klaim PT SBP, lahan tersebut termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini memicu konflik²² dan bentrokan terjadi antara pekerja PT SBP dan warga.

Pada 22 November 2024 perwakilan petani di Skip Hilir Kecamatan Rengat menghadiri undangan Estate Manager PT SBP Benedigtus Sidabutar bernomor 039/KBN/SBP/X/2024 di kopi Gurindam Pematang Reba Selasa. Pihak PT SBP dalam pertemuan itu sepakat tidak akan mengganggu lahan kebun masyarakat di Skip Hilir²³.

8. *Konflik Masyarakat Lubuk Batu Jaya, Kelayang, Peranap dan Ukui dengan PT Rimba Peranap Indah*

Pada 20 Juni 2024, masyarakat perwakilan petani dari Kabupaten Indragiri Hulu Riau bergerak melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara. Mereka meminta Presiden RI Joko Widodo turun tangan memberi perintah langsung kepada Menteri LHK fokus menyelesaikan konflik tenurial di HTI PT. Rimba Peranap Indah (RPI).

Masyarakat meminta kepastian hukum melalui adendum (perubahan) izin IUPHHK-HTI untuk mengeluarkan dan melepaskan areal kampung dan desa yang di dalamnya terdapat kebun karet dan kelapa sawit milik masyarakat²⁴. Persoalan masyarakat dan PT RPI ini sudah berlangsung sejak tahun 1997 hingga hari ini belum ada kejelasan. Membuat keresahan di masyarakat yang setiap hari kebun mereka ditumbang paksa oleh perusahaan.

²² <https://pelalawanpos.co/news/detail/3027/konflik-lahan-sawit-berlarutlarut-di-inhu-sandi-baiwa-dorong-quqatan-di-pengadilan>

²³ <https://pelitariau.com/berita/detail/32831/konflik-lahan-di-renqat-manajemen-pt-sbp-dan-petani-skip-hilir-sepakat-tidak-saling-ganggu>

²⁴ <https://catatanriau.com/mobile/detailberita/19936/konflik-lahan-dengan-pt-rpi-petani-inhu-qelar-aksi-jalan-kaki-menuju-istana-presiden-ini-tuntutannya>



G. Hutan Telah Hilang, Tuk Belang Mulai Berang

Kejadian konflik manusia dan harimau (KMH) di Riau dalam satu tahun terakhir mencapai 4 kejadian (2 tewas dan 2 alami luka serius) di dua kabupaten, Siak dan Indragiri Hilir (Inhil). Terbaru, pada 27 November 2024, Panji, warga Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak diterkam harimau Sumatera dan alami luka di kepala, bahu dan lutut. Ia diterkam kala sedang memancing ikan pukul 22.30 WIB di parit kanal Jalan Datuk Lima Puluh Kampung Sungai Rawa.

Dalam 5 tahun terakhir KMH di Riau terjadi dengan intensitas semakin meningkat. Jikalahari mendata sejak 2018 hingga 2024, tercatat sudah ada 15 kejadian serangan harimau dan menelan korban jiwa hingga 13 orang tewas dan 2 luka-luka.

Tabel 11. Data korban dan lokasi KMH yang terjadi di Riau sejak 2018 – 2024

No	Korban	Desa	Kec	Kab	Tahun	Ket
1	Jumiati	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2018	Tewas
2	M Amri	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2019	Tewas
3	Wahyu Kurniadi	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2019	Tewas
4	Darmawan	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2020	Tewas
5	MS	Teluk Kabung	Gaung	Inhil	2021	Tewas
6	Tugiat	Simpang Gaung	Gaung	Inhil	2022	Tewas
7	Indra	Tasik Tebing Serai	Talang Mandau	Bengkalis	2022	Tewas
8	Indra	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2022	Tewas
9	Sopiana Damanik	Serapung	Kuala Kampar	Pelalawan	2022	Tewas
10	Acai	Teluk Lanus	Sungai Apit	Siak	2022	Tewas
11	Andi Sukerman	Desa Tumang	Siak	Siak	2023	Tewas
12	Rahmad	Tanjung Simpang	Pelangiran	Inhil	2024	Tewas
13	Yasonia Zega	Penyengat	Sungai Apit	Siak	2024	Tewas
14	Jonheri	Mengkapan	Sungai Apit	Siak	2024	Luka luka
15	Panji	Sungai Rawa	Sungai Apit	Siak	2024	Luka-luka

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Kasus serangan harimau terbanyak terjadi pada 2022 mencapai 5 kejadian, diikuti pada 2024 sebanyak 4 kejadian, pada 2019 ada 2 kejadian dan sisanya 1 kejadian pada 2019, 2020, 2021 dan 2023. Intensitas serangan meningkat dalam 1 tahun belakangan.

Jikalahari melakukan analisis lokasi kejadian serangan harimau di Riau dengan kawasan kantong harimau yang ada di Riau. Data kawasan kantong harimau ini diperoleh dari hasil *Population Viability Analysis* (PVA) KLHK tahun 2016. Data ini memaparkan, terdapat 23 kantong habitat harimau di Indonesia. Dari 23 kantong habitat harimau ini, 7 di antaranya berada di Riau yang terdiri dari 2 lanskap dan 5 kawasan konservasi. Jikalahari melakukan *overlay* antara lokasi kantong harimau dengan konsesi perusahaan HTI maupun HGU yang berada di dalam maupun sekitar 7 kawasan kantong habitat harimau (kawasan *buffer*/penyangga sejauh 5 km dari batas terluar area konservasi) di Riau.

Ditemukan ada 36 perusahaan HTI dan 8 HGU perkebunan sawit yang berada di sekitar kawasan kantong harimau. Ini menunjukkan, habitat dari harimau-harimau ini terganggu



karena hilangnya tutupan hutan yang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan dan kini telah berganti menjadi tanaman akasia dan sawit.

Tabel 12. Data jumlah perusahaan HTI dan HGU Perkebunan sawit yang berada di sekitar kawasan kantong harimau di Riau.

Kawasan Kantong Harimau	HTI	HGU
SM. Bukit Rimbang Bukit Baling + buffer 5 Km	1	0
SM. Giam Siak Kecil + buffer 5 Km	6	0
SM. Kerumutan + buffer 5 Km	5	0
TN. Tesso Nillo + buffer 5 Km	5	1
TN. Bukit Tigapuluh + buffer 5 Km	0	2
Lanskap Semenanjung Kampar	16	3
Lanskap Senepis	3	2

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

Jikalauhari menemukan bahwa tingginya kasus serangan harimau terhadap masyarakat di 15 lokasi kejadian di atas, disebabkan **lokasi tersebut memang berada di dekat ataupun dalam kawasan kantong harimau.**

Dari 9 lokasi serangan harimau yang dirujuk pada desa tempat kejadian, semuanya berada di 3 kawasan kantong harimau, yaitu Kerumutan, Semenanjung Kampar dan Giam Siak Kecil. Dari hasil analisis, di 9 lokasi kejadian serangan ini juga tidak absen dari kehadiran korporasi baik HTI maupun HGU Perkebunan sawit.

Tabel 13. Data perusahaan yang berada di sekitar lokasi serangan harimau

DESA / PERUSAHAAN		IZIN	DESA / PERUSAHAAN		IZIN
Mengkapan			Tanjung simpang		
1	PT ARARA ABADI (AA) SIAK	HTI	1	PT RIAU INDO AGROPALMA	HTI
2	PT. TRISETIA USAHA MANDIRI	HGU	2	PT SATRIA PERKASA AGUNG (INHIL II)	HTI
Penyengat			3	PT. GUNTUNG IDAMAN NUSA	HGU
1	PT BALAI KAYANG MANDIRI I	HTI	4	PT. TABUNG HAJI INDO PLANTATIONS	HGU
2	PT PERANAP TIMBER (DH. PT UNISERAYA)	HTI	Tasik tebing serai		
3	PT PUTRA RIAU PERKASA	HTI	1	PT ARARA ABADI (DURI)	HTI
4	PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (RAPP) TASIK BELAT	HTI	2	PT SATRIA PERKASA AGUNG (BENGKALIS-SIAK)	HTI
5	PT. TRIOMAS FDI	HGU	Teluk Lanus		
6	PT. UNI SERAYA	HGU	1	PT PERANAP TIMBER	HTI
Serapung			2	PT PUTRA RIAU PERKASA	HTI
1	PT MITRA HUTANI JAYA	HTI	3	PT RAPP (TASIK BELAT)	HTI
2	PT SPA SERAPUNG	HTI	4	PT. UNI SERAYA	HGU
3	PT TRIOMAS FDI	HTI	Teluk kabung		
Simpang Gaung			1	PT BINA DUTA LAKSANA	HTI
1	PT AA (PULAU MUDA - MERAWANG)	HTI	2	PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	HTI
2	PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	HTI	3	PT SUMATERA RIANG LESTARI (BLOK VI-BAYAS)	HTI
3	PT RIAU INDO AGROPALMA	HTI			



		Tumpang		
4	PT SATRIA PERKASA AGUNG/SPA (INHIL I)	HTI	1 PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (MANDAU)	HTI
5	PT SATRIA PERKASA AGUNG (INHIL II)	HTI	2 PT SERAYA SUMBER LESTARI	HTI
6	PT. TABUNG HAJI INDO PLANTATIONS	HGU		

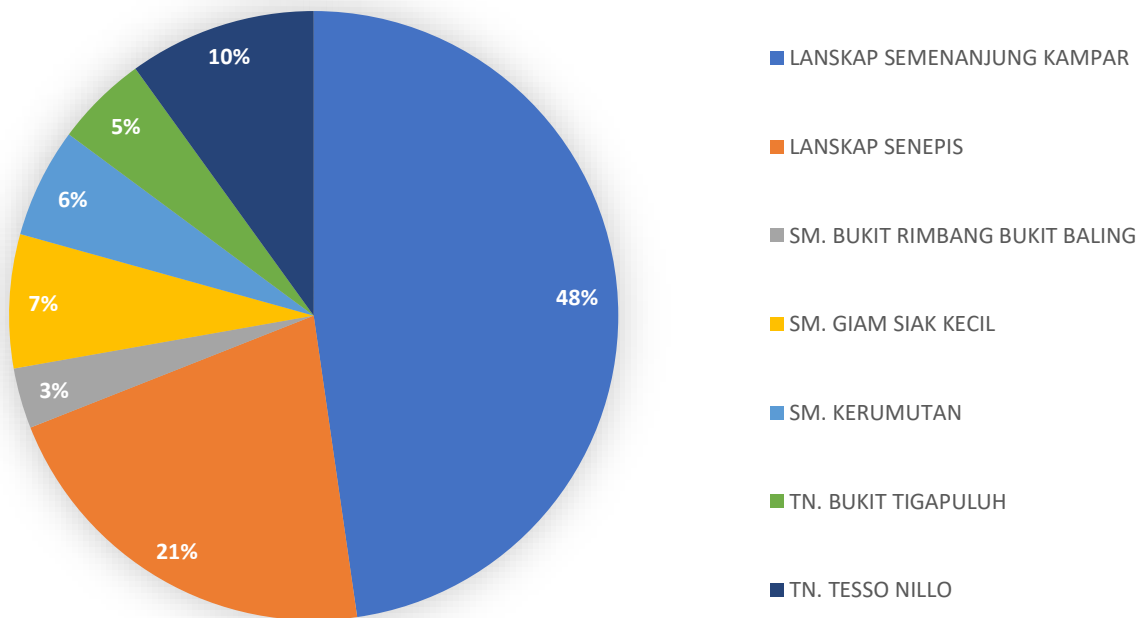
Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Jikalahari juga lakukan analisis terhadap kondisi tutupan hutan alam di sekitar kawasan kantong harimau. Ini dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan eksistensi perusahaan di sekitar kawasan kantong harimau yang menyebabkan tutupan hutan alam berkurang (deforestasi) dengan tingginya jumlah kasus serangan harimau.

Jikalahari mencoba melakukan analisis bukaan tutupan hutan di 7 kawasan kantong harimau selama 10 tahun terakhir. Ditemukan, selama 2014 – 2023, terjadi deforestasi seluas 141.076,29 ha di kawasan kantong harimau, dengan Semenanjung Kampar menjadi areal dengan deforestasi tertinggi, dan Bukit Rimbang Bukit Baling deforestasi terendah.

Untuk 2 wilayah dengan deforestasi tertinggi yaitu di Semenanjung Kampar, dari 67.317,45 ha deforestasi yang terjadi, 33% di antaranya disumbangkan oleh korporasi. Sedangkan Senepis yang kehilangan tutupan hutan alamnya mencapai 30.037,34 ha, korporasi menyumbangkan peran besar mencapai 79% telah menghilangkan hutan alam tersisa di kawasan ini.

Grafik 06. Persentase luasan deforestasi di 7 kawasan kantong harimau



Sumber: Olah Data Jikalahari 2024



Tabel 14. Data deforestasi dan tutupan hutan alam tersisa di konsesi yang berada dalam kawasan kantong harimau Riau.

LANSKAP / PERUSAHAAN	TUTUPAN HUTAN		DEFORESTASI
	2014	2023	
LANSKAP SEMENANJUNG KAMPAR	119.063,27	96.799,95	22.263,32
CV ALAM LESTARI	912,58	744,19	168,39
CV BHAKTI PRAJA MULIA	3.432,10	3.441,56	- 9,46
CV HARAPAN JAYA	2.920,62	1.215,60	1.705,03
CV MUTIARA LESTARI	721,93	384,74	337,19
PT ARARA ABADI	6.608,45	5.085,15	1.523,30
PT BALAI KAYANG MANDIRI	7.408,53	6.913,53	495,00
PT EKAWANA LESTARI DARMA	2.962,55	2.229,84	732,71
PT MADUKORO	8.695,51	6.639,49	2.056,02
PT MITRA HUTANI JAYA	1.730,89	501,40	1.229,49
PT PERANAP TIMBER (DH. PTUNISERAYA)	20.261,92	18.807,38	1.454,54
PT PUTRA RIAU PERKASA	16.577,65	15.793,13	784,52
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	37.154,94	28.379,58	8.775,36
PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT (SK 102)	2.311,84	1.953,26	358,59
PT SELARAS ABADI UTAMA	4.846,42	2.671,06	2.175,36
PT TRIOMAS FDI	2.415,91	2.000,29	415,62
PT TUAH NEGERI	101,42	39,76	61,66
LANSKAP SENEPIIS	80.104,49	56.276,69	23.827,80
PT DIAMOND RAYA TIMBER	69.709,39	49.375,86	20.333,53
PT RUAS UTAMA JAYA	4.773,47	3.534,80	1.238,67
PT SUNTARA GAJAPATI	5.621,62	3.366,02	2.255,60
Grand Total	199.167,76	153.076,64	46.091,13

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Dari hasil analisis ini dapat terlihat bahwa **ada kaitan antara aktivitas korporasi dengan meningkatnya kejadian serangan harimau terhadap masyarakat di kawasan kantong harimau di Riau**. Semenanjung Kampar dan Senepis, selaku 2 daerah kantong harimau, alami deforestasi tinggi dalam 10 tahun terakhir.

Hilangnya tutupan hutan dan terganggunya habitat harimau di kawasan ini, tidak terlepas dari akibat aktivitas korporasi HTI dan HGU perkebunan sawit di areal tersebut. Bukti lainnya terlihat bagaimana tidak ditemukannya kasus serangan harimau terhadap warga di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling. Rendahnya deforestasi serta hanya 1 perusahaan HTI yang berada di dekat kawasan ini, membuat habitat harimau tidak terganggu. Padahal Rimbang Baling termasuk lanskap besar dan menjadi rumah bagi lebih dari 70 ekor Harimau Sumatera.

Hal ini harus segera disikapi oleh pemimpin Riau. Bukan hanya bicara hilir persoalan dengan memberikan bantuan kepada para korban serangan harimau ini, namun juga memperhatikan problem hulu. Kawasan yang harusnya dijadikan areal lindung—terutama kantong habitat harimau sebagai satwa yang hampir punah—telah dibebani izin dan di atasnya terdapat aktivitas yang akibatkan rusaknya lingkungan dan mengganggu keberlangsungan keanekaragaman hayati. Beranikah pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan review perizinan korporasi di sekitar 7 kawasan kantong harimau ini?



H. Benang Kusut RTRWP Riau

Pada 2 Mei 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah melakukan paripurna mengenai penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melanjutkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2024 - 2044. Setelah sebelumnya Perda No 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), perda perlu dikaji ulang, dan dalam penyusunan Ranperda harus membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dan bermakna sesuai amanat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pada 4 Juli 2024, DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2024 – 2044 yang diketuai oleh Robin P Hutagalung dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Sunaryo sebagai Wakil ketua dari Fraksi PAN²⁵.

Selain Ketua dan Wakil Ketua, dipilih juga anggota Pansus, yaitu Parisman dan Septina Primawati dari Fraksi Partai Golkar, Ma'mun Solikhin dari Fraksi PDI Perjuangan, Manahara Napitupulu dan Tumpal Hutabarat dari Fraksi Partai Demokrat, Nurzafri dan Lampita Pakpahan dari Fraksi Partai Gerindra, Mira Roza dan Tamarudin dari Fraksi PKS, Husaimi Hamidi dan Muhammad Arpah dari Fraksi Partai Gabungan.

Pada 22 Juli 2024, Pansus Ranperda RTRW Provinsi Riau adakan rapat kerja bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau. Dalam pembahasan Ranperda, Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Ranperda RTRW Riau, Robin P Hutagalung, didampingi anggota Pansus, yaitu, Manahara Napitupulu, Tumpal Hutabarat, Lampita Pakpahan, Mira Roza, Husaimi Hamidi dan Abdul Kasim. Rapat dihadiri Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M. Job Kurniawan, Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahril Abdi, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M. Arief Setiawan, beserta kepala biro yang diundang²⁶.

Berdasarkan penelusuran website DPRD Riau <https://dprd.riau.go.id/>, hingga Desember 2024, Jikalauhari tidak menemukan informasi perkembangan ataupun dokumen Ranperda RTRWP Riau. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan DPRD Riau dalam penyusunan Ranperda membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dan bermakna.

Putusan MK ini dikuatkan dengan UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring atau luring. (3) Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi rancangan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari proses tersebut, dan berdasarkan daftar nama yang hadir dalam rapat Pansus pembahasan dan penyusunan Ranperda RTRW Riau tahun 2024 – 2044 yang telah dilaksanakan, DPRD Riau tidak transparan, tidak melibatkan dan membuka ruang partisipasi

²⁵ <https://dprd.riau.go.id/2024/07/04/penyampaian-jawaban-gubernur-atas-pandangan-umum-fraksi-terhadap-ranperda-rtrw-provinsi-riau-tahun-2024-2044-sekaligus-pembentukan-pansus/>

²⁶ <https://dprd.riau.go.id/2024/07/22/rapat-kerja-pansus-dprd-riau-dengan-opd-ranperda-tentang-rtrw-provinsi-riau-tahun-2024-2044/>



publik. Dikhawatirkan peristiwa korupsi yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun dapat terulang kembali. Sebab, akan banyak pihak memiliki kepentingan yang membahayakan lingkungan dan hutan di Riau, berupaya untuk memanfaatkan peruntukan ruang dalam RTRWP Riau ini.

Selain korupsi, tidak ada partisipasi publik secara maksimal dan bermakna mengakibatkan MA menerima gugatan Jikalauhari. Pada 12 Agustus 2019, Jikalauhari bersama Walhi Riau mendaftarkan Permohonan Keberatan (*Judicial Review*) ke MA terhadap Perda 10 Tahun 2018 tentang RTRWP Riau.

Dua bulan setelah mendaftarkan *Judicial Review* ke MA, pada 3 Oktober 2019 Majelis Hakim Mahkamah Agung Dr Irfan Fachruddin, SH, CN dan Dr H Yodi Martono Wahyunadi bersama Dr H Supandi SH, MHum, memutus perkara nomor 63 P/HUM/2019. Majelis Hakim mengabulkan 5 pasal dari 7 pasal yang diajukan Jikalauhari bersama Walhi. Hakim menyatakan pasal-pasal yang dikabulkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut.

Beberapa poin penting yang harus segera ditindaklanjuti Pemprov Riau dalam Perda No 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau di antaranya:

1. Terkait Pasal 1 angka 69: Terkait outline menurut majelis hakim hanya salah satu teknik simbolisasi yang tidak ada hubungannya dengan status atau peruntukan kawasan. Berdasarkan penafsiran otentik tidak satu pun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, yang menyebutkan atau menjelaskan mengenai outline, sehingga nomenklatur outline tidak dapat dijadikan suatu norma karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Terkait Pasal 23 ayat 4 dan pasal 38 ayat 1 dan 2: Menurut hakim, kawasan hutan tidak boleh serta merta dilepaskan untuk peruntukan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sebagaimana Pasal 71 ayat (2) melainkan harus menempuh permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
3. Terkait Pasal 46 ayat 2 huruf c, d dan e: Karena wilayah yang masuk dalam outline adalah masih merupakan kawasan hutan akan tetapi dimanfaatkan untuk pemanfaatan non-kehutanan sehingga bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
4. Terkait Pasal 71 ayat 1 dan 2: Pasal ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempertimbangkan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Ruang, Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.



I. APP Tebang Kayu Alam, Jikalahari dan ICEL Lapor Gakkum KLHK

Pada 7 Maret 2024 Jikalahari dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) melaporkan PT Arara Abadi, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Riau Indo Agropalma yang terafiliasi dengan Asia Pulp Pulp dan Paper (APP Sinarmas Group), dengan dugaan penebangan kayu alam ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan itu berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan Jikalahari pada Februari 2024. Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan fakta lapangan bahwa APP melalui Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM), bersempadan dengan PT Riau Indo Agropalma (RIA) bekerja sama dengan PT Arara Abadi berdasarkan “Nota Kerja sama atas Hutan Rakyat” di tanda tangani oleh pihak pertama PT Arara Abadi dan pihak kedua KTSM serta diketahui Kepala Desa Belantaraya seluas 1.544 ha, menebang kayu alam dan kemudian di tanami akasia, membuat kanal baru di gambut dalam dan berkonflik dengan masyarakat.

Laporan tersebut kemudian ditanggapi oleh APP Sinarmas Grup pada 4 Maret 2024, manajemen Grup APP (APP) telah melakukan investigasi internal terkait tuduhan APP dan pemasoknya menampung dan memanen hasil hutan yang berasal dari sumber ilegal. Investigasi memastikan bahwa tidak ada pasokan yang berasal dari sumber ilegal yang memasuki rantai pasokan PT. Indah Kiat Pulp & Paper – Pabrik Perawang atau pabrik APP lainnya sejak Februari 2013²⁷.

Pihak APP Sinarmas Group telah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Arara Abadi dan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) Desa Belantaraya di bawah Areal Penggunaan Lain (APL) untuk menjajaki potensi kerja sama, Namun hingga saat ini, belum ada kegiatan operasional oleh kedua belah pihak di lokasi tersebut sejak penandatanganan.

Berdasarkan hasil investigasi internal pihak manajemen APP terkait temuan Jikalahari, APP menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu mitra pemasok yaitu PT. Riau Indo Agropalma (RIA), karena tidak melaporkan kepada APP mengenai konversi batas konsesi seluas 57 hektar yang dapat berdampak pada Kawasan Nilai Konservasi Tinggi HCV akibat perubahan Tata Batas Luar dan pengembangan kawasan baru tersebut.

Temuan lain diperoleh bahwa Pemasok APP, PT. RIA menjalin kerja sama berkelanjutan dengan Koperasi Mutiara Mandiri dan Kelompok Tani Makmur Jaya dengan luas total 313 hektar. Hal ini APP juga tidak diberitahu.

Berdasarkan temuan pelanggaran tersebut, APP telah memberikan peringatan tegas dan menuntut PT. RIA berkomitmen untuk melakukan tindakan perbaikan untuk memulihkan kawasan dengan NKT dalam waktu tidak lebih dari dua minggu sejak tanggal pernyataan ini dibuat. APP akan memantau tindakan perbaikan di wilayah yang terkena dampak dan ketidakpatuhan dalam penerapan tindakan perbaikan dapat mengakibatkan terhentinya pasokan kayu dari PT. RIA.

²⁷ <https://app.co.id/in/-/response-to-allegations-on-app-accommodating-natural-riau-wood-from-illegal-sources>



J. Korupsi Surya Darmadi: Merusak Hutan, Merugikan Negara

Surya Darmadi seorang Taipan pemilik PT Darmex Group terlibat kasus korupsi sumber daya alam. Ia divonis bersalah penjara 16 tahun dengan denda Rp 2,2 triliun. Pengusutan kasus Surya Darmadi ini sudah berlangsung cukup lama.

Sebelumnya pada 23 Februari 2023, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membaca amar putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi. Menghukum Surya Darmadi penjara 15 tahun dan denda Rp 1 miliar. Pidana tambahan pembayaran ganti kerugian keuangan negara Rp 2,2 triliun dan perekonomian negara Rp 39,7 Triliun. Sebulan setelah putusan berkekuatan hukum harus bayar uang pengganti, jika tidak jaksa diperintahkan melelang harta kekayaan yang sudah disita, jika tidak mencukupi pembayaran, dipenjara 5 tahun²⁸.

Hakim mengatakan fakta-fakta hukum membuktikan Surya Darmadi mendapatkan keuntungan dari PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani Minus PT Palma Satu, sebesar Rp 2,2 triliun yang di dalamnya termasuk tidak menerapkan sawit plasma rakyat 20% senilai Rp 556 miliar. Perusahaan sawit Surya tidak membayar kepada negara terhadap kegiatan perkebunan dan belum memiliki HGU.

Surya Darmadi lalu tidak terima dengan putusan itu dan mengajukan banding. Hasilnya Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta lalu menolak banding yang diajukan terdakwa Surya Darmadi dan justru menguatkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pemilik Darmex Group tersebut, yakni 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekitar Rp 42 triliun²⁹.

Surya Darmadi kemudian menempuh upaya kasasi. Di tingkat ini, MA memangkas hukuman uang pengganti terhadap bos PT Darmex Group dan PT Duta Palma, Surya Darmadi menjadi hanya Rp 2 triliun dari semula Rp 42 triliun. Keputusan itu dikeluarkan MA pada Selasa, 19 September 2023³⁰.

Ketua Hakim Dwiarso menilai membebaskan uang pengganti Rp 39,7 triliun atas kerugian perekonomian negara tidak tepat. Majelis hakim kasasi menilai kerugian negara riil akibat perbuatan Surya Darmadi berjumlah Rp 2,6 triliun dan yang dinikmati Surya Rp 2,2 triliun.

Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, Jikalauhari dan Senarai kecewa dengan putusan Kasasi hakim. Putusan Kasasi terhadap Surya Darmadi terkesan janggal dan adanya dugaan perlakuan khusus. Pasalnya hanya 11 hari waktu yang diperlukan Majelis Hakim MA memutus perkara kasasi Surya Darmadi. Ini aneh, janggal dan seolah-olah perkara ini mudah, ringan dan sederhana.

Padahal perkara ini rumit dan butuh kehati-hatian dalam penerapan hukum oleh Hakim MA. Bila dibanding dengan perkara kasasi korupsi Suheri Terta, ini perlakuan khusus hakim kasasi MA terhadap Surya Darmadi. Suheri Terta adalah GM manajer PT Duta Palma (Darmex Agro Grup) milik Surya Darmadi.

²⁸ <https://senarai.or.id/korupsi/surya-darmadi-divonis-15-tahun-penjara/>

²⁹ <https://www.jawapos.com/nasional/01977224/banding-ditolak-surya-darmadi-tetap-divonis-15-tahun-penjara-dan-bayar-uang-pengganti-rp-42-triliun>

³⁰ <https://senarai.or.id/kabar/jikalauhari-dan-senarai-apresiasi-putusan-ma-menolak-pk-surya-darmadi/>



Saat putusan PK, KPK malah menerbitkan Sprin.Henti.Dik/28A/DIK.00/01/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat ini diterbitkan dengan dasar kurang bukti dan Mahkamah Agung telah membebaskan Suheri Terta Manager Legal Duta Palma pada putusan PK.

AMAR PUTUSAN

- Tidak terbukti melakukan TPPU seperti dalam dakwaan kedua penuntut umum
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua penuntut umum
- Terbukti melakukan TIPIKOR dan TPPU seperti dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair penuntut umum.
- Pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 Miliar, subsidair 6 bulan penjara
- Pidana tambahan Rp 2.238.274.248.234 dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39.751.177.520.000. Jika tidak membayar paling lama 1 bulan setelah putusan BHT, harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti pidana penjara 5 tahun.

FACEBOOK | INSTAGRAM : JIKALAHARI WEBSITE : WWW.JIKALAHARI.ID TWITTER : @JIKALAHARI YOUTUBE : JIKALAHARI RIAU

Jikalahari dan Senarai kemudian menilai alasan penerbitan SP3 yang dilakukan oleh KPK terhadap Surya Darmadi dan PT Palma Satu, tidak tepat. Bahkan ini akan bisa menjadi alat korporasi penjahat lingkungan untuk bebas dari hukum.

19 September 2024, Majelis Hakim MA Suharto, Ansori dan Noor Edi Yono menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Surya Darmadi. Jikalahari dan Senarai apresiasi putusan itu, tetapi tetap kecewa

karena penghitungan kerugian ekologis tidak menjadi perhatian majelis hakim.

Pasca putusan ini Kejagung harus segera melakukan eksekusi terhadap perbuatan korupsi dan pencucian uang yang telah dilakukan Surya Darmadi. Ini sebagai wujud keadilan yang harus diterima masyarakat Riau.

Selain itu Kejaksaan Agung cepat menyeret Tersangka PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Siberida Subur, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, PT Assets Pasific dan PT Darmex Plantations ke pengadilan. Serta mengenakan semua perusahaan melanggar dakwaan korupsi dan pencucian uang, selaras dengan apa yang dilakukan oleh Surya Darmadi sebagai pemilik perusahaan.

Dengan ditolaknya PK Surya Darmadi, Kejaksaan Agung lebih percaya diri untuk menyeret ratusan perusahaan yang mendirikan kebun sawit dalam kawasan hutan. Serta peran serta korp Adhiyaksa dalam menahan laju perubahan iklim.



K. Tak Ada Lagi Kriminalisasi Bagi Pejuang Lingkungan

Pada 30 Agustus 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerbitkan PermenLHK Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

Peraturan ini terbit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat dari upaya kriminalisasi sehingga ia tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Para pejuang lingkungan dianggap memerlukan perlindungan ini demi mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan (serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diduga/berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada pejuang lingkungan) terhadap pejuang lingkungan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pejuang lingkungan terdiri atas pencegahan terjadinya tindakan pembalasan dan penanganan perlindungan hukum dengan penetapan kasus sebagai tindakan pembalasan dan pemberian bantuan hukum.

Jikalahari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

APA SAJA BENTUK TINDAKAN PEMBALASAN??

- Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik (ancaman tertulis; ancaman lisan; kriminalisasi; kekerasan fisik/psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya).
- Somasi
- Proses pidana (pelaporan dugaan tindakan pidana atau tuntutan pidana).
- Gugatan perdata berupa ganti kerugian.

BAGAIMANA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN PEMBALASAN??

- Pengembangan kapasitas (fasilitas, pelatihan dan sosialisasi) bagi aparat penegak hukum (APH);
- Membentuk forum APH bersertifikasi lingkungan;
- Koordinasi dengan pemda untuk membuat kanal pengaduan mengenai: dokumen lingkungan mengenai rencana PPLH daerah, kajian lingkungan hidup strategis, dan analisis mengenai dampak lingkungan; perizinan; pengawasan; dan/atau dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Membentuk jaringan komunikasi antar penegak hukum, pemda, dan instansi terkait;
- Bersama-sama dengan pemda dan lembaga kemasyarakatan untuk pembentukan paralegal lingkungan.

Lalu siapa saja yang dapat disebut pejuang lingkungan? Mereka adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ia bisa saja korban dan/atau pelapor, yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan



lingkungan hidup, seperti: Orang perseorangan; Kelompok orang; Organisasi Lingkungan Hidup; Akademisi/ahli; Masyarakat hukum adat; dan Badan usaha.

Mereka yang disebut pejuang lingkungan adalah yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Mereka juga bisa pihak-pihak yang memberikan informasi, mengajukan keberatan, melakukan pengaduan dan advokasi kepada masyarakat terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha. Selain itu bisa juga pihak-pihak yang melakukan kegiatan lain bertujuan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika pejuang lingkungan mendapatkan gugatan, maka pejuang lingkungan dapat memohon perlindungan hukum kepada Menteri. Permohonan dapat disampaikan oleh:

- pemohon Pelindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili;
- penasihat hukum pemohon Pelindungan Hukum;
- perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat;
- pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau
- akademisi/ahli.

Permohonan perlindungan hukum juga dapat diajukan oleh Kementerian/lembaga atau instansi daerah berdasarkan permintaan pemohon.

Jikalahari berharap upaya kriminalisasi yang dilakukan para penjahat lingkungan terhadap setiap orang yang berjuang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, termasuk mempertahankan hutan tanah miliknya tidak akan terjadi lagi. Seperti gugatan PT JJP (Perusahaan Sawit pembakar hutan dan lahan) yang menggugat Prof. Bambang Hero Saharjo. Begitu pula kriminalisasi kepada Bongku (Masyarakat Suku Sakai) oleh PT Arara Abadi.

Jikalahari juga mendorong KLHK dan penegak hukum tidak hanya melindungi pejuang lingkungan, namun juga memberikan perhatian khusus untuk menindaklanjuti perkara apa yang tengah diperjuangkan oleh si pejuang lingkungan.



L. Komitmen Pemerintah untuk Ekologis: Apa saja Prioritas Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan dalam 5 Tahun Mendatang

Tahun 2024 merupakan tahun pergantian pemimpin, baik dari pemimpin negara hingga ke daerah. Begitu pula dengan pergantian para legislator perwakilan rakyat. Momen ini dijadikan waktu untuk merancang program-program prioritas yang akan dikerjakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Salah satunya seperti yang dimuat dalam Program Legislasi Nasional atau yang kerap disingkat Prolegnas.

Prolegnas merupakan instrumen perencanaan untuk pembentukan undang-undang (UU). Dalam proses penyusunannya yang terencana, terpadu dan sistematis, dalam prolegnas ditetapkan skala prioritas pembentukan suatu UU dengan memperhatikan kondisi terkait. Dalam penyusunan UU ini, DPR, DPD dan pemerintah menjadi para pihak yang bertanggungjawab. Dalam lingkup DPR, penyusunan prolegnas ini dilakukan oleh Badan Legislasi dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD dan/atau masyarakat.

Dalam dokumen Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Rancangan Undang-Undang Tahun 2025 – 2029 dijabarkan daftar kebijakan yang menjadi prioritas.

Ada 41 RUU prioiritas yang akan dibahas pada 2025 dari berbagai sektor, baik lingkungan, industri, jasa, tenaga kerja, kesehatan, hukum dan lainnya. Namun Jikalauhari fokus pada kebijakan kaitan ruang ekologis (lingkungan hidup, kehutanan, masyarakat adat, hukum, dan lainnya) dan menemukan ada 13 kebijakan yang akan jadi prioritas di 2025, di antaranya:

Tabel 15. Daftar 13 kebijakan prioritas 2025 kaitan ruang ekologis

Naskah dan RUU Disiapkan Oleh	Judul Rancangan Undang-undang
DPR (Komisi III)	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
DPR (Komisi IV)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Perubahan atas UUNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan • RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR (Komisi XI)	RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
DPR (Komisi XII)	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
DPR (Badan Legislasi)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI • RUU tentang Komoditas Strategis • RUU tentang Pertekstilan • RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
DPR (Anggota/DPD)	<ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim • RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
Pemerintah	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
DPD	RUU tentang Daerah Kepulauan

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024



Tak hanya itu, sepanjang 2025 – 2029, ada 176 RUU yang direncanakan akan dibahas dalam prolegnas, dan 22 diantaranya juga berkaitan dengan ruang ekologis.

Tabel 16. Daftar 22 kebijakan prioritas 2025 - 2029 kaitan ruang ekologis

Naskah dan RUU Disiapkan Oleh	Judul Rancangan Undang-undang
DPR	<ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • RUU tentang Pertanian • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan • RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria • RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) • RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR/DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi • RUU tentang Pertanahan • RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan • RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan • RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan • RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan • RUU tentang Keanekaragaman Hayati • RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim/ RUU tentang Perubahan Iklim • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • RUU tentang Masyarakat Hukum Adat • RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
Pemerintah/DPD	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/ RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Dari sekian banyak kebijakan yang akan dibahas oleh penyusun, harapan dari masyarakat adalah, kebijakan yang dihasilkan harusnya berpihak pada rakyat dan ruang ekologis. Serta dalam tiap tahapan perencanaan, penyusunan hingga implementasinya, semoga dapat melibatkan publik secara partisipatif.

Tak hanya dalam Prolegnas. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Menteri Raja Juli Antoni memaparkan 5 program prioritas yang akan dilaksanakan oleh kementerian ini dalam periode 5 tahun mendatang. Dalam paparannya, dijelaskan bentuk-bentuk realisasi dari masing-masing program. Yang menarik perhatian dari



program prioritas ini diantaranya, Menhut mendorong perhutanan sosial sebagai pendukung program makan bergizi gratis yang menjadi jargon Presiden Prabowo saat kampanye pilpres.

5 PROGRAM PRIORITAS

- 1 Digitalisasi Layanan: Transparan, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola**
 - Digitalisasi Seluruh Layanan Kementerian Kehutanan
 - Digitalisasi Pembayaran Non-Tunai
- 2 Penguasaan Hutan yang Berkeadilan**
 - Penyelesaian Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
 - Penertiban/Pencabutan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
 - Audit & Pemberlakuan Sanksi PB-PSWA
- 3 Hutan Sebagai Sumber Swasembada Pangan**
 - Penyediaan Lahan untuk Food Estate
 - Perhutanan Sosial untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis
- 4 Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia**
 - Rehabilitasi Lahan Kritis
 - Menjaga Kekayaan Biodiversity
 - Antisipasi Ancaman Kebakaran Hutan
- 5 Indonesia Satu Peta (One Map Policy)**
 - Kerjasama Membangun Indonesia Satu Peta

“Food estatanya apa nggak bakalan makin 'memakan habis' hutan alam tersisa pak?”

Untuk Riau khususnya, pada 30 November 2024, DPRD Provinsi Riau mengesahkan 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dalam rapat paripurna. Terdapat 6 Ranperda usulan DPRD Riau dan 4 usulan Gubri. Dari 10 Propemperda ini, 4 diantaranya menyoal ruang ekologis.

Tabel 17. Daftar Propemperda Riau 2025 dan luncuran 2023 - 2024

Propemperda	Judul Rancangan Peraturan Daerah
DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Perhutanan Sosial • Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual • Perlindungan dan Pemberdayaan Petani • Perlindungan dan Pemberdayaan Ekosistem Mangrove • Pengelolaan Dana Bergulir • Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.
Gubri	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029. • Penyelenggaraan Penanaman Modal. • Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. • Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Luncuran 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2024-2044. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Luncuran 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau • Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (Perseroda) • Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023-20243. • Pemberdayaan Ketahanan Keluarga. • Penyelenggaraan Perhubungan. • Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. • Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024



M. Vonis Perambah Kawasan Hutan: Kait Kelindan Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan

Jikalahari bersama Senarai melakukan pemantauan sidang perambahan kawasan hutan di Bengkalis. Kasus perambahan kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Siak Kecil dilakukan oleh Eko Suropto, Paijo Riswandi, Yulius Zalukhu dan Suparmo. Mereka merambah hutan yang berada di Desa Sungai Linau. Sedangkan Novrianto merambah di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis. Mereka sudah membabat hutan seluas 356 hektar hutan yang sebagian besarnya sudah diubah menjadi kebun sawit.

Sejak 2017 Paijo sebagai penjual hutan kepada cukong, sudah tahu lahan tersebut dalam kawasan hutan. Tetapi ia tetap menjual. Awalnya Paijo hanya sebagai orang kepercayaan Hemanto dan Didik Efendi, keduanya sudah meninggal, untuk bantu menjual lahan. Setiap penjualan lahan yang berhasil ia terima bagian 2,5 persen.

Ketika transaksi menjual lahan kepada Suparmo, Paijo juga melibatkan rekening istri yang dipakai untuk menampung sementara dana hasil penjualan. Paijo juga memanfaatkan situasi dengan melakukan usaha jasa sewa alat berat untuk membersihkan lahan.

Sejak 2018 lahan sudah dirusak dengan cara *distacking* oleh alat berat milik Novrianto. Setelah dibentuk menjadi 11 blok lalu di Maret 2023 ia mulai menanam sawit dan membangun pemukiman pekerja. Sampai akhirnya mereka bisa berhasil menanam 180 hektar sawit tanpa izin.

Eko Suropto membeli lahan dari Hermanto, ia warga Desa Lubuk Gaung, Bengkalis seluas 6 hektar seharga Rp 44 juta. Dua kali lahan dipindahkan oleh Hermanto karena tumpang tindih sebutnya. Hingga akhirnya Eko dapat lahan luas yang sama setelah tiga kali pindah, dan kini lahannya berbatas dengan terdakwa Yulius Zalukhu. Eko bayar Rp 36 juta untuk pembersihan lahan ke Paijo

Kalau Yulius membeli lahan seluas 30 Ha dari Paijo Riswandi atas perintah Didik, seharga 150 juta. Pembelian dilakukan dua kali, pembelian pertama 22 Ha kemudian 8 Ha. Dan meminta Paijo yang melakukan pembersihan semua lahan dengan upah Rp 195 juta. Selanjutnya di 2019, Suparmo membeli lahan seluas 40 hektar dari Paijo juga senilai Rp 300 juta. Juga bayar ke Paijo untuk bersihkan lahan seharga Rp 260 juta.

Semua lahan itu Paijo yang membersihkan dari semak belukar dan tanaman kayu. Dan Sejak 2017 Paijo sudah tahu bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi setelah mendengar sosialisasi pemapar dari Badan Restorasi Gambut. Tetapi ia turut menjual dan membersihkan lahan.

Eko Suropto, Yulius dan Suparmo juga diangkat menjadi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sungai Linau Maju Bersama, dimana Paijo sebagai Ketua.

Di 2022 keempatnya pernah bertemu di Rumah Makan Pondok Daun Pekanbaru membahas lahan sudah masuk dalam kawasan hutan dan petugas kehutanan sudah berkali-kali datang menegur kegiatan mereka. Mereka sepakat untuk urus pemutihan dengan skema penyelesaian sawit dalam kawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Paijo meminta uang Rp 3 Juta ke Eko Suropto, Yulius Zalukhu dan Suparmo untuk mengurus persyaratan tersebut.



Paijo juga sebut banyak KTH dan masyarakat yang merambah hutan Sungai Linau untuk menanam sawit. “Bahkan PT Surya Dumai Agrindo juga berusaha dalam kawasan hutan produksi,” kata Paijo. .

Disidang terdakwa lain, yakni Novrianto alias Bombeng. Ia bersama Muhamad Yusuf alias Usuf sama-sama melakukan usaha sawit dalam kawasan hutan, Novrianto sebagai pemodal atas 217 hektar lahan yang akan diusahakan sawit oleh Usuf. Untuk awal Novrianto sudah turunkan 2 unit alat berat yang akan dipakai membersihkan lahan. Sampai akhirnya tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu menangkap alat berat tersebut.

Putusan Hakim PN Bengkalis

Hakim Ketua Febriano Hermandy didampingi hakim anggota Rentama Puspita Farianty dan Aldi Pangrestu memutuskan Terdakwa Yulius Zalukhu alias Nias, Eko Supripto dan Suparmo Hadi Raharjo terbukti melanggar pasal tersebut yang termuat dalam Dakwaan Primer penuntut umum. Dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Terdakwa Paijo Riswandi terbukti melanggar pasal diatas yang termuat dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum. Dengan pidana penjara 3 tahun. Terdakwa Novrianto alias Bombeng terbukti melanggar pasal diatas yang termuat dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum. Pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Kelima terdakwa dijatuhi denda yang sama yakni Rp 1 miliar.



■ Majelis Hakim mengadili terdakwa Eko Supripto, Yulius Zalukhu dan Suparmo Hadi Raharjo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum. Dihukum penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 Miliar.

Senarai @senarai_id Senarai Senarai_id www.senarai.or.id

PN Bengkalis, 26 Juni 2024
KORNER PENGALAMAN PENGADILAN DI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
DESAH BANGKIT

Semua terdakwa terbukti melanggar Pasal 78 ayat 2 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang



penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

Dari persidangan kasus ini, Jikalahari dan Senarai menemukan beberapa fakta di antaranya:

- **Sengaja Merambah Kawasan Hutan**

Sejak 2017 Paijo sebagai penjual hutan kepada cukong, sudah tahu lahan tersebut dalam kawasan hutan. Tetapi ia tetap menjual. Awalnya Paijo hanya sebagai orang kepercayaan Hemanto dan Didik Efendi, keduanya sudah meninggal, untuk bantu menjual lahan. Setiap penjualan lahan yang berhasil ia terima bagian 2,5 persen. Hutan dijual dengan harga Rp 10 sd 15 juta per dua hektar.

Pun begitu dengan Terdakwa Yulius, Eko dan Suparmo sudah tahu bahwa lahan yang sedang mereka usahakan masuk dalam kawasan hutan. Dengan beberapa kali mereka didatangi petugas Kelompok Pengelola Hutan Bengkalis yang menerangkan lahan masuk dalam kawasan Hutan. Hanya saja mereka bersikukuh untuk mengusahakan lahan menjadi sawit.

Tindakan yang dilakukan Novrianto dan Muhammad Yusuf juga sama, merambah hutan dengan menurunkan alat berat. Melakukan penebang kayu, membuat blok dan rumah karyawan padahal lahan yang dipergunakan masuk dalam kawasan hutan dan kegiatan yang dilakukan tidak ada dilengkapi izin apapun.

- **UU Cipta Kerja Tidak Berlaku Untuk Terdakwa**

Perbuatan para terdakwa yang merambah hutan menjadi sawit seperti yang dilakukan Yulius Zalukhu sekitar Januari 2022 diatas lahan empat hektar. Eko Suropto sudah menanam sawit 6 hektar sawit sejak Desember 2022. Suparmo tanam sawit 20 hektarsejak januari 2021. Dan lahan yang dimodali Novrianto telah tertanam sawit sejak Maret 2023 seluas 180 hektar.

UU Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B berlaku sejak 2 November 2020, dan kegiatan yang dilakukan para terdakwa dikerjakan pasca peraturan ini diundangkan. Jadi kegiatan Terdakwa tetap illegal.

- **Hutan Menjadi Sawit**

Dalam persidangan lahan kawasan hutan produksi yang sudah diperjual belikan seluas 316 hektar, didalamnya 210 hektar sudah berubah menjadi sawit usia satu tahun hingga tiga tahun. Padahal kondisi awal lahan terdapat hutan skunder, terdapat semak belukar dan tegakan pepohonan besar.

Sejak 2018 lahan sudah dirusak dengan cara distacking oleh alat berat milik Novrianto. Setelah dibentuk menjadi 11 blok lalu ditanami sawit dan pemukiman pekerja. Tidak ada dilakukan upaya pencegahan apapun dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum hingga mereka bisa berhasil menanam 180 hektar sawit tanpa izin.

- **Tokoh Desa Turut Menjual Hutan**

Didik mantan Kepala Desa Sungai Linau dan Paijo Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sungai Linau Maju Bersama, memanfaatkan jabatan yang mereka punya untuk menjualbelikan hutan negara. Keduanya berusaha menawarkan hutan untuk diubah bentuknya menjadi kebun sawit. Uang yang diterima dipakai pribadi. Dan membuka usaha lain, seperti yang dilakukan Paijo sebagai penyedia jasa buka lahan.



N. FSC dan Remedy Framework: Bisakah APP dan APRIL Wujudkan Keberlanjutan dan Tak Rusak Hutan

Forest Stewardship Council (FSC) adalah sebuah organisasi internasional nirlaba yang didirikan pada tahun 1993. FSC memiliki tujuan utama untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan ekonomi di seluruh dunia.

FSC menjadi jaringan global yang terdiri dari anggota, staf, pemegang sertifikat, pemegang lisensi promosi, dan konsumen yang bertanggung jawab. FSC menetapkan serangkaian standar ketat yang harus dipenuhi oleh produk untuk membuktikan bahwa produk tersebut bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Mengingat bagaimana kondisi hutan yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan di bumi serta sebagai penyedia oksigen, mengatur iklim, melindungi tanah dan air, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan lain, dan eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan mengancam kelestarian hutan.

FSC hadir untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan standar pengelolaan hutan yang ketat dan diakui secara internasional. Standar FSC memastikan bahwa hutan dikelola dengan cara yang berkelanjutan, sehingga hutan terus terjaga untuk generasi sekarang dan mendatang.

Standar FSC mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan, antara lain:

- **Lingkungan:** Meliputi perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan tanah dan air, serta pengelolaan hutan yang tidak merusak ekosistem.
- **Sosial:** Meliputi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, pekerja hutan, dan masyarakat sekitar hutan, serta memastikan adanya kesejahteraan sosial.
- **Ekonomi:** Meliputi pengelolaan hutan yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi, serta memastikan adanya manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

FSC melakukan sertifikasi terhadap produk hutan, ketika produk telah mendapatkan sertifikat FSC, maka menjadi bukti bahwa produk berasal dari hutan yang dikelola dengan baik dan dapat dilacak asal usulnya.

Banyak produk yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi FSC. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pasca memperoleh sertifikat FSC di antaranya:

- **Bagi Hutan:** Mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati.
- **Bagi Masyarakat:** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat.
- **Bagi Perusahaan:** Meningkatkan reputasi perusahaan, memperluas akses pasar, dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan.
- **Bagi Konsumen:** Memberikan pilihan produk yang ramah lingkungan dan berasal dari sumber yang bertanggung jawab.

Dengan berbagai keuntungan yang menjanjikan, tak ayal, banyak perusahaan pulp dan kertas yang berupaya untuk mengajukan sertifikasi FSC ini. Tak terkecuali APP dan APRIL Grup. Keduanya pernah mengajukan permohonan sertifikasi ini, namun terhenti karena berbagai temuan yang tak sejalan dengan standar FSC. Kini, keduanya kembali mengajukan permohonan sertifikasi melalui Remedy Framework (RF) atau kerangka remediasi FSC. Ini



merupakan sistem yang dikembangkan oleh FSC untuk mengatasi masalah historis terkait konversi hutan yang signifikan dan aktivitas tidak dapat diterima lainnya yang dilakukan oleh organisasi sebelum mereka mendapatkan sertifikasi FSC. Kerangka ini menyediakan jalur bagi organisasi untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan memenuhi standar FSC, sehingga mereka dapat memperoleh sertifikasi dan menjadi bagian dari rantai pasok produk kayu yang bertanggung jawab.

RF ini ditujukan untuk memulihkan kerugian lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh konversi hutan di masa lalu. Ini mencakup upaya untuk memulihkan ekosistem yang rusak, melindungi keanekaragaman hayati, dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitar.

Perusahaan yang mengajukan RF berkewajiban memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif dari konversi hutan mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak. Perusahaan harus mendorong transparansi dalam proses remediasi, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau kemajuan yang telah dicapai. Hal ini tentunya mendorong perusahaan untuk terus memperbaiki praktik pengelolaan hutan mereka dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Saat ini proses FR dari APP dan APRIL Grup sedang berjalan. Perusahaan diharuskan untuk mengidentifikasi kerugian lingkungan dan sosial yang telah mereka sebabkan di masa lalu dalam rentang periode 1994 – 2022. Setelah identifikasi, maka perusahaan wajib melakukan pemulihan kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan standar FSC. Selama *remedy* berlangsung, proses monitoring dan evaluasi, terutama dari *auditor independent* akan berlangsung untuk memastikan seluruh persyaratan FR telah terpenuhi.



O. Kajian Komitmen NDPE dan Pembiayaan Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

Pada 20 September 2024 Jikalahari mempublikasi hasil kajian dengan tajuk: *Exporting Greenwashing? Analisis Kebijakan Bebas Deforestasi dan Komitmen NDPE dalam Rantai Nilai Pulp dan Kertas Indonesia*³¹ di Kekini Coworking Space Jl. Cikini Raya No.43, Menteng – Jakarta Pusat. Kajian ini melihat bagaimana kebijakan pasar internasional menerima produk – produk pulp dan kertas tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi.

Komitmen NDPE yang ditunjukkan oleh pelaku usaha pada rantai nilai komoditas pulp dan kertas dapat diapresiasi, namun komitmen tidak akan berarti bila tidak disertai dengan tindakan.

Investasi atas nama korporasi di sektor kehutanan selalu mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah melalui proses legalitas saat pemberian izin konsesi tanaman industri untuk *pulp* dan kertas. Di balik penerbitan dokumen legal perizinan tersebut, ada deforestasi yang berkelindan dengan korupsi, pencucian uang, pengemplangan pajak, perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pembabatan hutan alam, perusakan dan perampasan hutan, tanah gambut, konflik sosial hingga penghancuran habitat satwa dan flora.

Kajian ini awalnya hendak melihat rantai perizinan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari hulu hingga hilir (rantai perizinan) yang selalu mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, kajian ini memperluas cakupannya hingga membahas ekspor dan pembiayaan.

Kemudahan dan perlakuan khusus tak sampai di situ, kajian ini juga menemukan kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atas komoditas *pulp* dan kertas berupa pembebasan pajak hingga pembebasan bea ekspor. Dalam rantai yang lain, industri pulp dan kertas juga mendapat pembiayaan cukup besar dari berbagai lembaga keuangan, baik dalam bentuk kredit maupun investasi, dari dalam maupun luar negeri.

Tanah air kita telah menyediakan modal sangat besar dan murah bagi tercukupinya kebutuhan dunia atas *pulp* dan kertas: lahan yang luas, hutan yang makin beragam keberadaannya; namun para penyandang dana pada sektor ini pun masih buruk kebijakannya dari sisi lingkungan, sosial dan tata kelola.

Secara umum kajian ini telah memotret problem koordinasi antar kementerian, terutama dalam memaknai keberlanjutan yang dapat dibuktikan ketelusurannya, terutama yang dapat menjadi wilayah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Ada peluang baru dari akan berlakunya Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kementerian Perdagangan memberikan perhatian khusus pada implementasi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mensyaratkan agar komoditas yang diimpor ke Uni Eropa tidak terkait dengan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, diproduksi sesuai dengan regulasi yang relevan dari negara eksportir, dan menyertakan dokumen due diligence yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ <https://jikalahari.or.id/database/publikasi-jikalahari/exporting-greenwashing/>



Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa regulasi tersebut pada awalnya memasukkan 7 komoditas yakni komoditas kedelai, sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, kopi, dan karet; namun tidak menutup kemungkinan bahwa produk turunan komoditas tersebut juga akan terdampak. Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menyatakan urgensi tinggi bagi Kementerian untuk menanggapi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia ke Uni Eropa.

Saat ini, Uni Eropa menargetkan ada 55 peraturan terkait dengan lingkungan, yang menurut BKPerdag berpotensi menghambat perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Mengenai ekspor, secara langsung diatur di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.

Menariknya, Kementerian Perdagangan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SUKA/certificate of origin). SUKA-lah yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan, atau diolah di Indonesia.

Dalam hal ekspor, peran perbankan dalam pembiayaan sektor *pulp* dan kertas juga sangat dominan; terutama perbankan asal Indonesia: Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BCA dan Bank Negara Indonesia adalah kreditor terbesarnya, serta Bank Panin dan CT Corpora; selain bank asal Jepang: Mizuho dan bank asal Malaysia, Maybank – serta bank asal China: ICBC.

Indonesia adalah tuan rumah, bagi datangnya pembiayaan sangat besar dengan kinerja ESG/LST yang sangat memprihatinkan: Indonesia menyediakan modal bagi perusahaan bisnis komoditas utama: lahan yang luas dengan hutan yang makin terancam eksistensinya, serta sumber daya manusia yang besar, dan relatif lebih murah.

Kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola para kreditor maupun investor khususnya pada komoditas *pulp* dan kertas, masih sangat minimal kinerjanya. Maka kualitas taksonomi yang saat ini kewenangannya ada pada OJK menjadi hal yang penting untuk dicermati. OJK menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) pada Februari 2024, naskah TKBI ini mengikuti kerangka Taksonomi ASEAN 2.0 yang mencakup aspek sosial dan lingkungan hidup menggantikan Taksonomi Hijau 1.0; yang terbit pada 2022.

Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan kebijakan, sehingga dapat menjawab permasalahan deforestasi dan ketelusurannya, yang kemudian dapat mencapai keselarasan dengan persyaratan Bebas Deforestasi Uni Eropa. Pemerintah Indonesia juga harus melakukan pengawasan, pemantauan pada aspek tata kelola terutama dalam rantai nilai komoditas *pulp* dan kertas dan kemudian membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi riil, serta praktik patronase antara penegak hukum dengan pelaku usaha perlu dibahas lebih mendalam dan dicegah.



P. Kajian Peran Sektor Pendanaan untuk Hentikan Kerusakan Ekologis dan Konflik Sosial

Jikalahari melakukan kajian bersama Prakarsa—lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang fokus pada isu kebijakan sosial, fiskal dan pembangunan berkelanjutan—untuk melihat keterlibatan bank di balik permasalahan lingkungan, sosial dan tata kelola industri pulp dan kertas di Indonesia.

Kajian ini dilatarbelakangi dari aktivitas industri pulp dan kertas yang sudah berlangsung lama dimulai pada periode 1990an hingga kini. Berbagai persoalan mengiringi perjalanan industri ini, baik persoalan tata kelola lingkungan yang buruk, konflik sosial yang terjadi, karhutla, deforestasi dan persoalan lainnya yang tak dapat dipisahkan dari aktifitasnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi penyebab sehingga persoalan ini terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

Selain pemerintah, argumentasi lainnya mencuat, bahwa ada pihak lain yang harus turut bertanggungjawab atas aktivitas dari industri pulp dan kertas yang terus merusak ruang ekologis dan meningkatkan eskalasi konflik sosial di masyarakat. Salah satunya adalah lembaga jasa keuangan, khususnya bank-bank yang mendanai perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka ‘merdeka’ beraktivitas tanpa perlu takut kehilangan sumber pendanaan. Tak dapat dipungkiri, bank-bank yang mendanai perusahaan yang merusak ekologis dan akibatkan konflik sosial ini telah berkontribusi memperpanjang rantai permasalahan yang ada.

Kajian ini berusaha menggambarkan bagaimana bank-bank di Indonesia memiliki andil besar dalam mendukung praktik-praktik tak bertanggung jawab yang dilakukan korporasi pulp dan kertas. Bahwa, pemberian pinjaman yang dilakukan bank-bank di Indonesia, tanpa memperhatikan aspek berkelanjutan, minimnya uji tuntas dari bank hingga lemahnya pengawasan dari pihak bank terhadap ‘klaim berkelanjutan’ yang diberikan korporasi kepada bank menjadi nila setitik yang terus memperburuk kondisi lingkungan dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Prakarsa dan Jikalahari meninjau dampak yang ditimbulkan dari industri pulp dan kertas, terutama aktivitas perusahaan yang berafiliasi dengan Sinarmas dan Royal Golden Eagle Group (APRIL Group), di tiga desa di masing-masing kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis (wilayah adat Suku Sakai), Siak (Desa Dayun), dan (Desa Gondai) Pelalawan.

Ketiga wilayah ini merupakan pusat industri dan daerah yang memiliki izin konsesi HTI untuk industri pulp dan kertas. Siak memiliki 15 izin konsesi HTI dengan luas 289 ribu hektare, Pelalawan memiliki 30 izin HTI dengan luas areal mencapai 493 ribu hektare, serta Bengkalis memiliki 11 izin HTI dengan luas area 288 ribu hektare. Konflik-konflik dan persoalan lingkungan yang terjadi di daerah ini setidaknya dapat mewakili gambaran kondisi lingkungan dan masyarakat yang ‘dirusak’ oleh korporasi pulp dan kertas.

Dari sisi lingkungan, industri pulp dan kertas menyebabkan permasalahan deforestasi yang juga berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap SDA, keanekaragaman hayati, dan juga kerusakan alam. Hasil analisis citra Satelit Sentinel-2 juga menunjukkan bahwa luas deforestasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan pada 2013 – 2022 mencapai 184 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, deforestasi yang terjadi di area konsesi HTI mencapai 74 ribu hektare atau menyumbang sekitar 41% dari total deforestasi.



Tingginya dominasi penguasaan kawasan HTI ini, konflik antara masyarakat adat dan tempatan yang telah lebih dahulu tinggal di areal tersebut tidak dapat dihindari. Konflik ini terkait sengketa batas tanah, hilangnya mata sumber penghidupan masyarakat, kekerasan dan kriminalisasi, perselisihan terkait kompensasi, biaya ganti rugi hingga pembayaran pola kemitraan serta penyebab konflik lainnya seperti polusi, kerusakan infrastruktur dan lainnya. Konflik yang terjadi sudah berlangsung hingga satu dekade, namun tidak ada penyelesaian konkret dari pemerintah. Dampak dari konflik ini terus meningkat dan eskalasinya sampai mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan tata kelola perizinan HTI juga dibayangi oleh kasus-kasus korupsi dan penerbitan izin HTI untuk perusahaan pulp dan kertas. Kasus korupsi melibatkan 20 perusahaan yang juga terafiliasi dengan APP dan APRIL, perizinan yang diperoleh dengan cara-cara tidak sesuai hukum yang akhirnya menjerat kepala daerah dan aparaturnegeri sipil yang terlibat. Dengan demikian, perizinan ini sejatinya kurang kuat apabila dijadikan syarat administratif untuk mendapatkan aliran pembiayaan, tanpa ada peninjauan secara langsung mengenai kondisi riil di lapangan.

Bank sebagai pihak yang mengalirkan dananya untuk keberlangsungan aktivitas perusahaan, sejatinya memiliki pengaruh untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar aspek kelestarian lingkungan dan HAM. Salah satunya melalui penarikan dana investasi secara langsung kepada perusahaan. Di samping itu, bank juga dapat mendorong perusahaan untuk mengupayakan mekanisme pemulihan yang adil dan inklusif bagi masyarakat terdampak. Bank seharusnya tidak hanya bersikap pasif sebagai pihak penyuntik dana semata, tetapi juga bertanggungjawab atas konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan pemberian aliran pembiayaan tersebut.

Dari hasil kajian ini, beberapa aktor kunci yang memiliki peran penting dan dapat mendorong perubahan untuk penyelamatan ekologi dan masyarakat diminta untuk melakukan upaya-upaya di antaranya:

Pemerintah

1. Kementerian Hukum dan HAM perlu menetapkan kebijakan uji tuntas HAM dan mekanisme pelaporan (grievance mechanism) beserta panduannya yang berlaku bagi seluruh perusahaan atau entitas bisnis, diutamakan bagi yang rentan berisiko terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan permasalahan tata kelola.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan transparansi data terhadap luas deforestasi yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, luas pengelolaan Hutan Tanaman Industri, dan data luas Lahan Gambut yang tersisa.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah meninjau kembali pemberian izin pengusahaan HTI dan memberikan sanksi hingga mencabut izin jika terbukti terdapat pelanggaran HAM oleh perusahaan di lapangan.
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah melakukan perizinan hingga mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aspek-aspek LST.
5. Kementerian Perindustrian perlu membuat portal satu data terpadu untuk industri, salah satunya memuat data total produksi pulp dan kertas di Indonesia.
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki kebijakan terkait dengan komitmen atas tema-tema yang ada dalam perubahan iklim, HAM, SDA dan Kehutanan dalam pembiayaannya.
7. OJK menetapkan kebijakan kepada bank untuk memberikan persyaratan kepada perusahaan yang dibiayainya mengungkapkan metrik keanekaragaman hayati yang terkait dengan sektor-sektor dengan risiko berdampak tinggi.



8. OJK perlu mewajibkan bank untuk meninjau ulang pembiayaan yang telah diberikan kepada perusahaan pulp dan kertas yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak lingkungan hidup. Peninjauan ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan implementasi perusahaan terhadap aspek LST.

Bank

1. Bank perlu mempertimbangkan keputusan pemberian kredit berdasarkan societal expectation masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek yang dibiayai. Hal ini juga termasuk bagaimana bank memastikan perusahaan yang dibiayai menerapkan prinsip FPIC dan melakukan uji tuntas HAM.
2. Bank perlu menetapkan kebijakan yang memprasyaratkan pemberian pinjaman bagi perusahaan di sektor pulp dan kertas untuk memenuhi aspek LST hingga ke rantai pasoknya. Apabila ditemuka adanya dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas perusahaan, maka bank harus meninjau ulang komitmen yang diberikan hingga menghentikan pembiayaannya.
3. Bank menyediakan sistem pelaporan (grievance mechanism) yang memadai, khususnya bagi masyarakat terdampak dari aktivitas perusahaan yang didanai oleh bank tersebut. Bank harus menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait dengan dampak aktivitas perusahaan yang dibiayainya.
4. Bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki mekanisme pelaporan (grievance mechanism) yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang terdampak negatif dari operasional perusahaan. Mekanisme pelaporan perlu mencakup bagaimana penanganan keluhan hingga progres penyelesaian keluhan yang diungkap secara transparan dan akuntabel

Perusahaan

1. Perusahaan pulp dan kertas menerapkan prinsip aktivitas bisnis yang bertanggung jawab hingga rantai pasoknya, serta melaporkan secara transparan dalam laporan keberlanjutan perusahaan, tidak hanya berlaku di perusahaan induk saja.
2. Perusahaan pulp dan kertas memberikan hak pemulihan kepada masyarakat terdampak, tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikis, dan ekologis.
3. Perusahaan pulp dan kertas harus melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap proses operasi bisnisnya, termasuk masyarakat adat, perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya.



Q. Pembohongan Publik pada COP29 di Azerbaijan

COP merupakan singkatan dari “Conference of the Parties”, dalam hal ini “Parties” adalah negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian yang disebut UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.

UNFCCC merupakan perjanjian lingkungan internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, mencegah gangguan antropogenik (yang disebabkan oleh manusia) yang berbahaya terhadap sistem iklim, memberikan kerangka hukum dan prinsip dasar untuk kerja sama perubahan iklim internasional.

Tahun ini, UNFCCC menyelenggarakan COP29 pada 11-22 November di Baku, Azerbaijan. Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir dalam arena COP29. Acara yang berlangsung hingga 22 November ini akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, swasta dan lembaga non-pemerintah dengan jumlah mencapai ratusan delegasi.

Topik utama yang dibahas pada COP29 tahun ini ialah tema Climate Finance atau pendanaan iklim. Sederhananya, topik ini berfokus dalam meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara berpenghasilan rendah termasuk Indonesia. Dana itu nantinya bisa dipakai untuk membantu masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim³².

Selain membahas pendanaan, COP29 juga memiliki agenda pembahasan ambisi iklim nasional yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing negara. NDC adalah rencana aksi iklim nasional suatu negara yang menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris³³.

Mengenai pendanaan iklim, COP29 menghasilkan kesepakatan Baku Finance Goal (BFG), komitmen baru untuk menyalurkan pendanaan iklim hingga US\$ 1,3 triliun pada 2035. Negara-negara maju berkomitmen memberikan setidaknya US\$ 300 miliar per tahun, dari semula US\$ 100 miliar, untuk negara berkembang³⁴.

Sorotan Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Preservasi Keanekaragaman Hayati

Pada COP29 juga menyoroti tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dalam diskusi panel di Paviliun Indonesia pada COP29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan, Senin, (18/11) waktu Azerbaijan, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemhut Ristianito Pribadi mengatakan hutan bagian penting dari sumber daya pembangunan ekonomi nasional³⁵. Kegiatan ekonomi bisa dilaksanakan sepanjang layak secara ekonomi, diterima secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis.

Berdasarkan data dari Kemhut, kawasan hutan Indonesia mencapai 125,92 juta ha atau seluas 63,7 persen dari luas daratan Indonesia. Dari jumlah itu, peruntukan untuk kawasan hutan konservasi dan hutan lindung masing-masing seluas 27,43 hektare dan 29,66 juta ha.

³² <https://magdalene.co/story/fakta-tentang-cop-29/#:~:text=Keputusan%2Dkeputusan%20yang%20dibicarakan%20dalam,kebutuhan%2C%20dan%20mengurangi%20sampah%20makanan.>

³³ <https://lestari.kompas.com/read/2024/11/14/070000286/serba-serbi-cop29--tempat-waktu-dan-agenda-utama?page=all>

³⁴ <https://www.tempo.co/lingkungan/cop29-sepakati-pendanaan-iklim-untuk-negara-berkembang-naik-tiga-kali-lipat-1173126>

³⁵ <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/673c84bb814e7/cop29-tanggung-jawab-perusahaan-dalam-preservasi-keanekaragaman-hayati-disorot>



Sementara itu, kawasan hutan yang dialokasikan sebagai hutan produksi seluas 29,22 juta hektare, untuk hutan produksi terbatas seluas 26,79 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan seluas 26,79 hektare³⁶.

Salah satu perusahaan pemegang konsesi PBPH untuk HTI di Riau ialah APRIL Group. Di panel yang sama, *Deputy Director Stakeholder Engagement*, Sustainability APRIL Group Dian Novarina paparkan upaya konservasi dan restorasi yang telah dilakukan perusahaan yang berjalan seiringan dengan kegiatan produksi. Lewat konsep Produksi-Proteksi, pengelolaan HTI sebagai sumber bahan baku industri produk berbasis serat kayu dilakukan selaras dengan konservasi dan restorasi. “Dengan menerapkan konsep ini, hutan tanaman industri menjadi penyangga dengan memberikan perlindungan pada areal preservasi dari ancaman eksternal, seperti penebangan ilegal, kebakaran, dan juga perburuan satwa liar,” ujar dia³⁷.

Jikalahari sangat menyayangkan adanya pembohongan publik yang dilakukan oleh APRIL Group di dalam forum COP29 tersebut. Nyatanya ada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan pernyataan mereka tersebut.

Pertama, APRIL Grup terlibat korupsi kehutanan Dimana 16 korporasi yang terafiliasi dengan grup ini menyuap Gubernur Riau Rusli Zainal, Bupati Siak Arwin As, Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaffar serta Tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau. APRIL Grup menyuap para terpidana untuk mendapatkan izin IUPHHK-HT dan RKT periode 2002 – 2009 di atas hutan alam yang seharusnya tidak boleh dibebani izin. Akibat tindak koruptif ini, hutan alam Riau banyak ditebangi dan diperkirakan nilai tegakan hutan alam yang telah hilang mencapai Rp 2,5 Triliun hingga perekonomian negara telah dirugikan mencapai Rp 1,3 triliun.

Kedua, kerugian ekologis penerbitan 13 IUPHHKHT-RKT korporasi terafiliasi APRIL Grup oleh Burhanuddin. Hasil Eksaminasi Putusan Burhanuddin Husin Mappi-Jikalahari 2012 menemukan—berdasarkan penghitungan Prof Bambang Hero Saharjo (Guru Besar IPB)—Rp 687 Triliun terdiri atas kerusakan ekologis, ekonomi dan pemulihan ekologi.

Ketiga, terbaru pada Maret 2024 Jikalahari menemukan APRIL Grup melalui anak usahanya PT SAU dan PT RAPP Estate Sungai Mandau menebang hutan alam, membuka kanal baru, merusak ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung hingga menanam akasia di luar konsesi tanpa izin.

Kenapa Harus Peduli Soal Isu Dalam COP29

Keputusan-keputusan yang dibicarakan dalam COP29 berdampak langsung pada hidup dan masa depan kita secara spesifik dalam rencana pendanaan dan penanganan krisis iklim. Selain inisiatif dan perjanjian para pemimpin negara, kita perlu memantau dan menuntut kesepakatan mereka mengatasi perubahan iklim. Bahkan ikut terlibat dalam hal-hal kecil yang bisa dilakukan, supaya Bumi menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali.

Sebab, permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab kelompok elit. Peran masyarakat perempuan dan kelompok marginal lain juga dibutuhkan³⁸.

³⁶ <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/673c84bb814e7/cop29-tanggunga-jawab-perusahaan-dalam-preservasi-keanekaragaman-hayati-disorot>

³⁷ <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/673c84bb814e7/cop29-tanggunga-jawab-perusahaan-dalam-preservasi-keanekaragaman-hayati-disorot>

³⁸ <https://maqdalene.co/story/fakta-tentang-cop-29/#:~:text=Keputusan%2Dkeputusan%20yana%20dibicarakan%20dalam,kebutuhan%2C%20dan%20menquranqi%20sampah%20makanan.>



R. Kabinet Merah Putih: Seberapa Krusial Isu Ekologis jadi Perhatian

Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024³⁹.

Sejak pelantikan Kabinet Merah Putih, Indonesia telah memasuki babak baru dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama terkait krisis iklim, isu ekologis maupun efisiensi sumber daya alam.

Dalam konteks ini, ada dua kementerian yang berperan penting yakni, Kementerian Lingkungan Hidup yang kini dipimpin oleh Hanif Faisol Nurrofiq, dan Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni. Dua menteri ini juga menjanjikan beberapa perubahan dalam kerja mereka, antara lain soal transparansi dan penguatan kebijakan lingkungan hidup.

Raja Juli menyebut, transparansi sebagai protokol penting guna memastikan hutan di Indonesia produktif dan bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengatakan akan fokus menyelesaikan beberapa isu kehutanan, termasuk transparansi data untuk mengatasi persoalan sawit yang berada di kawasan hutan⁴⁰.

"Saya kebetulan juga mantan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Sawit. Saya tahu persis bahwa ada soal keterlanjuran sawit di kawasan hutan menjadi karut-marut. Saya kira persoalannya adalah dari data dan transparansi data," ujar Raja Juli di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Tidak hanya Raja Juli, Hanif Faisol juga menyampaikan komitmennya soal pembenahan lingkungan yang berfokus pada pengendalian. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) katanya, akan meletakkan badan-badan di setiap regional untuk pembenahan lingkungan, antara lain mendorong penataan dan penegakan hukum.

Untuk memastikan lingkungan hidup tetap terjaga dalam industri ekstraktif skala besar, Hanif menyebut, sedang proses kebijakan untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sedang proses. Dalam rancangan peraturan yang ini, katanya, setiap industri ekstraktif harus ikut dalam payung regulasi ini⁴¹.

Kebijakan Kementerian Kehutanan

Pada akhir November 2024 lalu. Dalam menjalankan kerja-kerjanya, Kementerian Kehutanan yang dipimpin Raja Juli Antoni membuat 5 program prioritas⁴², di antaranya menyoal digitalisasi layanan: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola. Ia berencana akan mendigitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan dan untuk pembayaran digunakan model non-tunai.

Tak hanya itu, berkaitan dengan penguasaan hutan, mendorong prinsip berkeadilan, ia akan mendorong penyelesaian kasus sawit ilegal dan penertiban/pencabutan izin pemanfaatan di kawasan hutan yang tidak sesuai. Menhut juga mendorong dilakukannya audit dan

³⁹ <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-para-menteri-kabinet-merah-putih-di-istana-negara/>

⁴⁰ <https://www.tempo.co/lingkungan/cara-raja-juli-mengatasi-masalah-sawit-di-kawasan-hutan-1096403>

⁴¹ <https://www.monqabay.co.id/2024/10/22/menteri-baru-janji-transparansi-dan-benahi-lingkungan-baqaimana-prediksi-ke-depan/>

⁴² <https://jikalahari.or.id/kabar/klipingberita/5-program-prioritas-kementerian-kehutanan/>



pemberlakuan sanksi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Saranan Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA).

Sejalan dengan program andalan Prabowo-Gibran semasa kampanye, Raja Juli juga mendorong agar hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber swasembada pangan. Hutan akan menjadi dijadikan lahan untuk food estate serta program perhutanan sosial akan mendukung program makan bergizi gratis.

Tak hanya itu, untuk mewujudkan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, Raja Juli akan mendorong rehabilitasi lahan kritis, menjaga kekayaan biodiversity serta mengantisipasi ancaman kebakaran hutan. Ia juga mendorong kebijakan Indonesia Satu Peta (One Map Policy) dan memperluas kerjasama membangun Indonesia satu peta.

Program Kementerian Kehutanan yang berada dalam Kabinet Merah Putih ini hampir mirip dan tidak berbeda jauh dengan kabinet sebelumnya dibawa Presiden Joko Widodo, untuk memimpin langsung penegakan hukum kepada perusahaan ilegal atau kegiatan merusak lainnya di kawasan hutan. Hal yang menyangkut penertiban/pencabutan dan audit perizinan juga tidak dijelaskan secara detail dari arah kebijakan ini.

Pada program prioritas pertama, digitalisasi layanan. Tidak ada uraian tegas terkait aspek keterbukaan informasi publik dan partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan hingga pelayanan masyarakat.

Dalam program prioritas kedua juga, penguasaan hutan yang berkeadilan. Kementerian Kehutanan justru mengesampingkan konflik agraria di kawasan hutan dan salah mengartikan perhutanan sosial.

Lalu, prioritas ketiga mengenai food estate juga senada dengan pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto, yang mengonfirmasi bahwa Indonesia akan melanjutkan hilirisasi nikel dan mendorong proyek food estate⁴³. Hal ini justru akan mengorbankan jutaan hektare hutan, mengancam hak asasi masyarakat dan memperburuk upaya menekan angka pelepasan emisi karbon ke atmosfer.

Selain itu ambisi pemerintah dalam program prioritas Kementerian Kehutanan lain seperti rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare yang terdiri dari 7,4 juta hektare dalam kawasan hutan dan 5,3 juta dianggap muluk-muluk. Pasalnya, pemerintah sendiri tak pernah merinci ambisi itu, semisal soal lokasi, dan perkembangan rehabilitasi sebelumnya⁴⁴.

Prioritas 100 Hari Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dalam 100 hari ke depan akan fokus terhadap beberapa isu, termasuk penyelesaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)⁴⁵.

RPPLH menjadi fokus utama Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup, dalam masa awal 100 harinya menjabat. Target utama yang ingin dicapai adalah penyelesaian RPPLH sebagai landasan hukum untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. "Rancangan dokumen RPPLH ini direncanakan mulai diberlakukan pada 2025 hingga 2055. Dokumen ini menjadi

⁴³ <https://www.tempo.co/lingkungan/satya-bumi-pesimistis-soal-kelestarian-lingkungan-hidup-dan-transisi-energi-terbarukan-di-tangan-kabinet-merah-putih-965638>

⁴⁴ <https://betahita.id/news/detail/10758/5-program-prioritas-menteri-raja-juli-nirkeadilan-kritik.html?v=1733489516>

⁴⁵ <https://chatnews.id/read/rpplh-jadi-rencana-kerja-100-hari-menteri-lingkungan-hidup>



acuan penting dalam menilai pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Hanif⁴⁶.

Hanif menargetkan dalam 100 hari kerjanya akan fokus kepada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan serta membangun desa berbasis iklim⁴⁷. Pembangunan desa ini berorientasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, guna meningkatkan ketahanan lingkungan di tingkat lokal.

Terkait perdagangan karbon, Hanif tidak ingin perdagangan karbon ini stagnan. Ia menekankan pemerintah sedang mengevaluasi pasar karbon untuk memastikan potensi ekonomi karbon dapat dimaksimalkan. Langkah-langkah strategis seperti penetapan nilai perdagangan karbon, karbon offset, dan pajak karbon akan segera diambil dalam waktu dekat⁴⁸.

Selain itu, Hanif juga sudah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim. Salah satu strateginya, pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Penanganan isu lingkungan seperti pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun juga jadi prioritas⁴⁹. Dengan perencanaan yang matang, Hanif optimis kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Hanif sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Namun, rencana-rencana Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup bisa saja menimbulkan kekhawatiran, bahwa kebijakannya akan berjalan di tempat. Pasalnya, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini cenderung masih berfokus pada pemanfaatan SDA secara agresif, terutama di sektor pertambangan dan food estate. Hal itu dapat dilihat dari ketidakseimbangan ekologis yang terjadi, seperti proyek food estate di Kalimantan Tengah yang mengancam keanekaragaman hayati dan wilayah adat akibat eksploitasi hutan dan lahan gambut yang luas⁵⁰.

Minimnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi tantangan bagi Menteri LH, Hanif. Dengan program 100 harinya yang menitikberatkan pada nilai ekonomi karbon dan desa berbasis iklim, diharapkan mampu membawa keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, untuk mencapai hal ini, kolaborasi yang erat antara kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan.

⁴⁶ <https://www.bisik.id/read/rpplh-target-utama-hanif-faisol-dalam-100-hari-kerja-1729594642312>

⁴⁷ https://www.antaranews.com/berita/4414177/menteri-lh-hanif-targetkan-penyelesaian-rpplh-dalam-100-hari-ke-depan?utm_source=chatgpt.com

⁴⁸ https://esqnow.republika.co.id/berita/slr2eq416/klhk-dipisah-ini-program-100-hari-pertama-menteri-lingkungan-hidup?utm_source=chatgpt.com

⁴⁹ https://voi.id/berita/426630/10-rancangan-strategi-menteri-lingkungan-hidup-baru-hadapi-tantangan-lingkungan-dan-efek-perubahan-iklim?utm_source=chatgpt.com

⁵⁰ https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-kritik-proyek-lumbung-pangan-kalteng/6828274.html?utm_source=chatgpt.com



S. Masa Depan Suram Pemberantasan Korupsi: KPK Lama vs KPK Baru

Pada Senin, 16 Desember 2024 Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 melakukan pengucapan sumpah yang digelar di Istana Negara, dalam kegiatan itu juga hadir Presiden Prabowo Subianto yang melantik para Pimpinan dan Dewas KPK terpilih⁵¹. Para Pimpinan dan Dewas KPK yang terpilih ini akan melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada 20 Desember 2024 nanti.

Sebelumnya pada 21 November 2024, Komisi III DPR melakukan penghitungan suara terhadap para Capim KPK yang telah melewati tahap uji *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) sejak Senin, 18 November 2024 lalu. Pemilihan dilakukan secara voting oleh 48 anggota Komisi III DPR.

Hasilnya, Komisi III DPR menetapkan lima nama, masing-masing untuk pimpinan dan dewas KPK 2024-2029. Nama-nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029: Setyo Budiyo, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono. Sedangkan untuk Dewan Pengawas KPK ialah Wisnu Baroto, Gusrizal, Sumpeno, Benny Jozua Mamoto dan Chisca Mirawati.

Jikalahari mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk profiling para pimpinan KPK hingga rekam jeaknya berkaitan dengan kasus korupsi. Simak informasi yang Jikalahari rangkum berikut ini:

Tabel 18. Profiling Pimpinan KPK 2024 - 2029

Setyo Budiyo (Ketua KPK)	
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Itjen Kementerian Pertanian (Sejak 22 Maret 2024) • Lulusan Akpol angkatan 1989 • Koordinator Supervisi Kedeputusan Penindakan KPK (2019) • Direktur Penyidikan KPK (2020) • Kapolda NTT (2021)
Jumlah Kekayaan	Rp 7,9 Miliar
LHKPN Terakhir	11 Mei 2023
Jumlah Suara	46 Suara dan 45 Suara untuk Ketua KPK
Rekam Jejak kaitan kasus korupsi	<p>Saat menjabat sebagai Inspektoral Jenderal Kementan, Setyo sebagai pengawas kementerian sempat berurusan dengan korupsi yang melibatkan Menteri Syahrul Yasin Limpo⁵².</p> <p>Ketika Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara, ia juga pernah bersinggungan dengan kasus bentrok yang melibatkan dua kelompok warga di Bitung pada 25 November 2023⁵³.</p> <p>Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR, Setyo mengatakan “Kedeputusan Pencegahan harus lebih fokus kepada pemasalahan sumber daya alam.”</p>

⁵¹ https://www.setneg.go.id/baca/index/pimpinan_dan_dewas_kpk_mengucapkan_sumpah_janji_di_hadapan_presiden

⁵² <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1753090-disinaqung-soal-kasus-syl-irjen-setyo-budiyo-ungkap-tes-wawancara-capim-kpk-menterinya-keras?page=2>

⁵³ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n4qz52wd3o>



Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)	
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none">Direktur Penuntutan KPK (16 September 2019)Jaksa Fungsional Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidanan Khusus (Jampidsus) Kejagung (2023)
Jumlah Kekayaan	Rp 5 Miliar
Jumlah Suara	48 Suara dan 1 Suara untuk Ketua KPK
Rekam Jejak kaitan kasus korupsi	<p>Fitroh pernah mundur dari jabatan Direktur Penuntutan KPK pada awal 2023. Saat itu mundurnya Fitroh karena menolak untuk meningkatkan kasus E-Formula ke tingkat penyidikan yang kemudian dibantah oleh KPK⁵⁴.</p> <p>Fitroh juga pernah tercatat menjadi tim jaksa KPK dalam kasus suap korupsi proyek yang menjerat Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara pada Tahun 2013. Fitroh dengan Tim Jaksa KPK kala itu menuntut Hidayat Batubara untuk dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta⁵⁵.</p> <p>Selain itu, Fitroh juga pernah masuk dalam Tim Jaksa KPK dalam kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Salah satu tersangka dalam kasus itu ialah Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng⁵⁶.</p> <p>Pada 2018, dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Fitroh juga tergabung dalam Tim Jaksa KPK yang menuntut eks Pengacara Setyo Novanto, Fredrich Yunadi atas dugaan perintangan penyidikan⁵⁷.</p>
Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua KPK)	
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none">Hakim Pemillah Perkara Pidana Khusus MA/Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat 2014
Jumlah Kekayaan	Rp 4,1 Miliar
Jumlah Suara	33 Suara
Rekam Jejak kaitan kasus korupsi	<p>Sebagai hakim, Ibnu tercatat pernah memvonis bebas terdakwa korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Marth pada Oktober 2014 dengan kasus pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama 2010⁵⁸.</p> <p>Saat menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Desember 2017, Ibnu pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setyo Novanto⁵⁹.</p>

⁵⁴ <https://www.tempo.co/hukum/fitroh-rohcahyanto-mundur-dari-kpk-kejaksanaan-agung-kembali-ke-institusi-asal-221948>

⁵⁵ <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/21/dr-fitroh-rohcahyanto-sh-mh?page=2>

⁵⁶ <https://www.suara.com/news/2023/02/04/092045/rekam-jejak-fitroh-rohcahyanto-direktur-penuntutan-kpk-diisukan-mundur-saat-kasus-formula-e>

⁵⁷ <https://www.antaranews.com/berita/684174/fredrich-didakwa-berupaya-hindarkan-setnov-dari-pemeriksaan>

⁵⁸ <https://www.tempo.co/politik/anggota-komisi-iii-dpr-soroti-capim-kpk-ibnu-basuki-widodo-yang-pernah-vonis-bebas-terdakwa-korupsi-1170463>

⁵⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241119154131-12-1168332/pernah-vonis-bebas-koruptor-capim-kpk-ibnu-basuki-dicecar-dpr>



Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK)	
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Kejari Karawang, Jawa Barat (2008)• Kepala Kejati Sulawesi Tengah (2014)• Pejabat Fungsional Jaksa pada Jamdatun (2021)• Wakil Ketua KPK (2022)
Jumlah Kekayaan	Rp 11,2 Miliar
Jumlah Suara	48 Suara dan 2 Suara Ketua KPK
Rekam Jejak kaitan kasus korupsi	<p>Di antara 10 nama capim KPK 2024-2029, Johanis Tanak merupakan incumbent. Ia Wakil Ketua KPK pada Oktober 2022, setelah sebelumnya sempat gagal dalam seleksi capim KPK periode 2019-2024. Ia ditunjukkan karena menggantikan Lili Pantauli Siregar yang mengundurkan diri karena skandal gratifikasi⁶⁰.</p> <p>Pemilihan Johanis Tanak sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar mengundang kritikan sejak awal. Pasalnya, Johanis sempat mengusulkan penggunaan pendekatan <i>restorative justice</i> atau keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi. Usulan itu disampaikan saat dia menjalani uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di DPR RI pada 2022.</p> <p>Saat itu, Johanis mengusulkan koruptor bisa mendapat jaminan tak diproses secara hukum dengan syarat mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya. Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada 2019, Johanis juga mendapatkan kritikan karena sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK. Dia saat itu sepakat dengan pembentukan Dewan Pengawas dan pemberian kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3)⁶¹.</p> <p>Johanis sempat terjerat kasus dugaan pelanggaran etik. Kasus berupa percakapan atau chat Johanis Tanak dengan pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Percakapan yang berisi 'bisalah kita cari duit'. Majelis Etik Dewas KPK menyatakan Johanis tidak bersalah hanya terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai komunikasi yang telah dilaksanakan dengan pihak lain⁶².</p> <p>Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), Tanak mengaku akan menghapus OTT apabila terpilih menjadi komisioner KPK. Ia menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHAP.</p>
Agus Joko Pramono (Wakil Ketua KPK)	
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Ketua BPK (2019 – 2023)• Komisararis di PT Pertamina Hulu Energi• Majelis Wali Amanat UI periode 2024 - 2029
Jumlah Kekayaan	Rp 18,6 Miliar
Jumlah Suara	39 Suara

⁶⁰ <https://www.tempo.co/politik/johanis-tanak-lolos-seleksi-akhir-capim-kpk-pernah-terjerat-dugaan-kasus-etik-3833>

⁶¹ <https://www.tempo.co/arsip/rekam-jejak-johanis-tanak-petahana-kontroversial-yang-lolos-tes-tulis-capim-kpk-26784>

⁶² <https://news.detik.com/berita/d-6781108/kasus-chat-waka-kpk-johanis-tanak-dengan-pejabat-esdm-lanjut-ke-sidang-etik>



Rekam Jejak kaitan kasus korupsi	<p>Agus Joko Pramono merupakan satu-satunya pimpinan KPK periode 2024-2029 yang tidak berasal dari unsur penegak hukum. Ia merupakan seseorang yang ahli di bidang audit keuangan negara, manajemen keuangan negara, pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan, reformasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sistem informasi keuangan negara.</p> <p>Agus Joko Pramono pernah menjadi sorotan lantaran dikaitkan dengan transaksi mencurigakan Rp. 115 Miliar di Kebumen, Jawa Tengah pada 2013. Saat sertijab yang digelar pada 1 Agustus 2023 itu, ada karangan bunga yang di parkir di halaman BPK, berasal dari Majelis Anti Korupsi bertuliskan, "Selamat Jalan Bapak AJP dan Madame, Koruptor Rp115 M dan Perusak BPK". Agus membantah keterkaitannya tersebut dan menegaskan tidak pernah ada pemeriksaan dan konfirmasi terhadap dirinya oleh PPATK⁶³.</p>
---	--

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

Melihat dari data di atas, Jikalahari mengkhawatirkan ini akan membuat semakin lemahnya penanganan korupsi jika dinilai dari komposisi KPK baru yang 4 di antaranya berasal dari aparat penegak hukum yang semakin meningkat. Ini dilihat dari kesamaan komposisi pimpinan KPK periode sebelumnya.

Pemerintah DPR RI sepertinya tidak belajar dari pengalaman seorang petinggi Polri yang menjadi Ketua KPK. Padahal sudah jelas ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri gagal memimpin KPK bahkan sampai menjadi pelaku dari tindak kejahatan itu sendiri.

Upaya pelemahan anti rasuah ini juga terlihat saat proses pemilihan pimpinan KPK berikutnya. Saat ditanyakan pandangan terkait revisi UU KPK dan metode penangkapan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), para pimpinan terpilih memiliki pandangan bahwa OTT perlu dibatasi dan selektif bahkan diusulkan untuk ditiadakan.

Kekhawatiran melihat sikap dan pandangan dari pimpinan KPK terpilih terhadap semangat pemberantasan korupsi ini akan semakin tinggi jika dalam 100 hari kerjanya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan menyeluruh.

Melihat hal itu, Jikalahari merekomendasikan kepada pimpinan KPK terpilih untuk segera mengundurkan diri dari lembaga asal agar menunjukkan keseriusan dan independensi dalam penanganan korupsi ke depannya. Dan berusaha untuk menaikkan angka Indeks Persepsi Korupsi.

⁶³ <https://www.akurat.co/hukum/1302765623/Soal-Info-Dugaan-Transaksi-Rp-115-Miliar-Eks-Wakil-Ketua-BPK-PPATK-Kami-Kerja-Berdasarkan-Data>



T. Pemimpin Riau Baru: Pertaruhan Masa Depan Ruang Ekologis Riau

Pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Kabupaten/kota di Riau, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak telah selesai pada 27 November 2024. Perhitungan suara dilakukan selama 30 hari kerja setelah pemilihan.

Pada Jumat 6 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2024 yang dilaksanakan di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pleno KPU, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau nomor urut 1 Abdul Wahid-SF Hariyanto memenangkan kontestasi melawan pasangan nomor urut 2 M Nasir-M Wardan dan pasangan nomor urut 3 Syamsuar-Mawardi M Saleh.

Abdul Wahid-SF Hariyanto dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU dengan perolehan suara terbanyak yaitu 1.224.193 suara, suara tersebut unggul 346.682 dari pasangan M Nasir-M Wardan, sementara M Nasir-M Wardan mendapatkan 877.511 suara, dan pasangan nomor urut 3 Syamsuar-Mawardi M Saleh meraih 661.297 suara⁶⁴.

Setelah diketahui tidak ada gugatan pasangan calon pada Pilgubri 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), pada 11 Desember 2024 pukul 00.00 WIB, Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024 resmi ditutup.

Terkait pelantikan kepala daerah Tingkat provinsi, kabupaten/kota, sesuai Perpres nomor 80 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, pasal 2A ayat 1 dan 2.

Pasal (2 A ayat 1) "Jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara serentak pada 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh komisi pemilihan umum provinsi." (ayat 2) "Jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan secara serentak pada 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh komisi pemilihan umum kabupaten/kota."

Visi-misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-SF Hariyanto

Wahid-SF Hariyanto diusung oleh 3 partai yaitu PKB, PDI Perjuangan dan Nasdem, pasangan ini mengusung visi "Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju." dan 7 misi dalam pencapaiannya di antaranya:

1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marjinal.
2. Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
3. Memperkuat infrastruktur yang andal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah.

⁶⁴ <https://mediacenter.riau.go.id/read/89173/pleno-rekapitulasi-pilkada-gubernur-riau-sele.html>



4. Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju *World Class Government*.
6. Memperkuat riset dan inovasi serta kerja sama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui *public private partnership*, kerjasama antar daerah maupun kerja sama global.
7. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kodusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

Pasangan ini menyinggung isu ekologis dalam misi kedua yaitu: *meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka Pembangunan yang berkelanjutan*.

Menjelang debat pertama, pada 21 Oktober 2024, Jikalahari mempublikasi *brief* hasil analisis visi, misi dan program kerja ketiga pasangan calon, terutama soal isu ekologis. Hasilnya, tidak ditemukan komitmen nyata dari ketiga kandidat untuk menyelesaikan persoalan ekologis di Riau, seperti; karhutla, banjir, konflik agraria, perluasan ruang kelola serta pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat.

Terlebih untuk pasangan Abdul Wahid – SF Hariyanto, hasil analisis Jikalahari, pasangan ini lebih mengutamakan hilirisasi SDA dan pembangunan industri dan kerja sama antar daerah. Walaupun dalam visi-misinya memuat kata ekologis dan pembangunan berkelanjutan, namun esensi keberlanjutannya belum terlihat dalam rencana yang mereka susun, dan tidak berani dengan tegas untuk mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan SDA, berkomitmen memperluas ruang kelola bagi masyarakat, bahkan tidak ada satupun yang menyentuh perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.⁶⁵

Hasil analisis ini terbukti dan dapat dilihat dari debat pertama, jawaban dan penjelasan Wahid dan SF Hariyanto sama sekali tidak menyentuh persoalan lingkungan hidup dan kehutanan di Riau, dalam debat pertama pada tema *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pembangunan Daerah yang Inklusif*. Isu ekologis masuk dalam debat ini, namun pasangan ini tidak memberikan pernyataan konkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Dalam debat kedua, pada tema *ekonomi hijau dan ekonomi biru, dan pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan*, jawaban pasangan Wahid – SF Hariyanto hampir menggambarkan langkah mewujudkannya. Namun sayangnya Wahid-SF Hariyanto masih tidak menyebut dan menyentuh persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang selama ini sesungguhnya salah satu penyebab peningkatan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kehutanan melambat.

Lalu apakah ada harapan perbaikan, peningkatan perekonomian, serta perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid dan SF Hariyanto 5 tahun mendatang?

⁶⁵ <https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2024/10/2110-Brief-Pilkada-Ekologis-Riau-2024-Jikalahari.pdf>



Epilog

Meragukan Komitmen Prabowo Menindak Tegas Pelaku Perusak Lingkungan dan Hutan

Bagaimana peluang perbaikan atas pemerintahan yang baru dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota pada ruang dan ekologis di Riau?

Visi-misi Prabowo yang tertuang dalam dokumen berjudul “Prabowo-Gibran 2024 Bersama Indonesia Maju” setebal 88 halaman berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.

Prabowo juga berkomitmen melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal, serta memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.

Lalu dua bulan awal menjabat, apakah menunjukkan komitmen melawan pelaku perusak hutan dan melindungi ekologis akan terwujud di kepemimpinannya?

Dua puluh hari sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke *Great Hall of the People*, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertemuan bilateral itu disinyalir dapat memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan antara masyarakat Indonesia dan China.

Prabowo turut mengajak sejumlah konglomerat seperti Prajogo Pangestu pemilik perusahaan Grup Barito Pacific, Franky Oesman Widjaja pemilik perusahaan Sinarmas Grup, Garibaldi (Boy) Thohir pemilik perusahaan Grup Adaro, Arsjad Rasjid pemilik perusahaan Grup Indika, Anindya Bakrie pemilik perusahaan Grup Bakrie, dan Hashim Djojohadikusumo pemilik Grup Arsari. Prabowo ‘mendorong’ para pengusaha untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

“Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia,” kata Prabowo.⁶⁶

Kunjungan kenegaraan tersebut menunjukkan Prabowo memberikan keistimewaan para pengusaha konglomerat, padahal memiliki jejak merusak lingkungan. Hubungan yang istimewa tersebut akan menjadi tameng bagi korporasi yang berurusan dengan pelanggaran hukum selama ini dan pelanggaran ke depan.

Kedekatan Prabowo dengan para pengusaha akan menjadi hambatan pemerintahannya menjalankan visi misi untuk menghukum para korporat pelaku tindak pidana lingkungan hukum dan sumber daya alam.

Misalnya perusahaan terafiliasi dengan APP/Sinarmas Grup milik Franky Oesman Widjaja, melakukan kejahatan kehutanan, terlibat karhutla, korupsi kehutanan dan berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan. Pertama, dalam kurun waktu 2002-2008 PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari terlibat korupsi kehutanan yang melibatkan Bupati Siak dan Pelalawan, Tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau, serta

⁶⁶ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/taipan-ke-china-bareng-prabowo-hadiri-forum-bisnis-gaet-investasi-23tlovPy8uL>



Gubernur Riau. APP menyuap para terpidana untuk mendapatkan izin IUPHHK-HT dan RKT. Akibat perbuatannya menebang hutan alam, turut merugikan perekonomian negara senilai Rp 1,3 triliun.

Kedua, pada 2019, Sat Reskrim Polres Siak dan PPLH KLHK karena karhutla menyegel 100 hektar lahan konsesi PT Arara Abadi, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Siak yang hangus terbakar, yang justru hingga kini tidak ada kelanjutan kasusnya di Polres Siak.

Ketiga, pada 8 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisal Nurofiq segel dua pabrik pengelolaan limbah milik Sinarmas Grup di Kabupaten Serang yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper dan PT Cipta Paperina karena mengelola limbah secara ilegal.

Pertanyaannya, dengan kedekatannya dengan Franky Oesman Widjaja, apakah Prabowo menegakkan hukum sesuai melanjutkan kasus hukumnya?

Keraguan atas komitmen juga muncul dari tindak-tanduk para menterinya seperti kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif ke kompleks PT RAPP. Kunjungan Menteri seperti menjadi tradisi melanjutkan kebiasaan pemerintahan Jokowi. Jika kita ingat bahwa banyak para Menteri era Jokowi juga mengunjungi PT RAPP di mana kunjungan tersebut berkaitan pula dengan keberpihakan terhadap kepentingan PT RAPP.

Misalnya Airlangga Hartarto yang saat pada saat itu Menteri Perindustrian juga berkunjung ke PT RAPP pada awal 2018. Sebelumnya pada Maret 2017 Airlangga Hartarto mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang isinya meminta Presiden melakukan revisi PP 57 Tahun 2016 jo. PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut karena mengganggu industri korporasi pulp dan kertas.

Padahal revisi PP 57 Tahun 2016 lahir akibat krisis hebat akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang maha dahsyat pada 2015. Perusahaan afiliasi PT RAPP justru penyumbang kebakaran tersebut, meski penanganan hukumnya berakhir dengan SP3 oleh Polda Riau.

Prabowo perlu menegur menteri-menteri yang coba-coba menganak emaskan perusahaan perusak lingkungan, lagi-lagi agar tidak membuatnya sulit dan tidak berani menjalankan komitmen dalam visi-misinya untuk menghukum para korporasi yang terlibat karhutla dan perusakan hutan di Riau.

Ketegasan Prabowo terhadap komitmen melawan perusak lingkungan hidup dan hutan serta melakukan perbaikan harus terus dikawal dan terus dihidupkan. Bagaimanapun 5 tahun ke depan, kedaulatan rakyat berada di tangan Prabowo.

Catatan akhir tahun Jikalauhari 2024 ini adalah salah satu instrumen untuk memonitor sekaligus diharapkan menjadi 'peluit' atas tindakan yang pemerintah yang mengarah kepada jalan yang keliru. Sorotan Isu, peristiwa, politik Nasional dan daerah, ruang kelola masyarakat hingga korupsi sumber daya alam di sepanjang 2024 setidaknya bisa kita bahas dalam beberapa fokus.

Pertama, data kehutanan terkait deforestasi, karhutla, banjir dan kerusakan habitat satwa. Berdasarkan analisis GIS dan pengecekan lapangan, hutan alam Riau yang jumlahnya terus menyusut pada 2024 seluas 1.339.437 ha yang berada di areal konsesi HTI dan sawit sekira 302.881 ha, kawasan konservasi seluas 484.943 ha dan sisanya 551.612 ha berada pada kawasan lainnya. Total deforestasi sepanjang 2024 seluas 22.172 ha yang tersebar di konsesi HTI dan sawit sekira 5.951 ha luas, pada kawasan konservasi sekira 4.271 ha dan sisanya berada pada kawasan lainnya.



Deforestasi ini juga berkaitan dengan berbagai serangan satwa kepada manusia akibat habitat yang hilang.

Kebakaran hutan alam juga masih terjadi. Menurut data Sipongi KLHK, luas kawasan terbakar sepanjang 2024 di Riau mencapai seluas 10.674 ha, angka ini menunjukkan peningkatan luasan lahan terbakar sebanyak 47% dari tahun 2023. Persoalan Banjir juga menjadi persoalan. Jumlah kejadian dan areal terdampak semakin besar.

Jikalahari juga melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk melihat penebangan hutan alam di areal korporasi dan melaporkannya ke Gakkum KLHK. Dan bersama koalisi di 11 provinsi, Jikalahari melanjutkan pemantauan komitmen perusahaan HTI di Indonesia untuk tidak melakukan deforestasi dan perusakan gambut.

Kedua, ruang kelola masyarakat yang masih lambat. Hingga Desember 2024, Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan realisasi PS hingga Desember 2024, mencapai 260 ribu hektar atau sekitar 20%⁶⁷ dari target. Namun berdasarkan penelusuran website GoKUPS14⁶⁸ selaku sumber informasi terkait perhutanan sosial yang terupdate, usulan PS di Riau yang telah disetujui mencapai 168.177,3 ha dengan jumlah unit SK sebanyak 158, bertambah 16 SK dalam rentang waktu hampir 1 tahun, dan jumlah KK terdampak mencapai 30.495 KK. Menilik luasan usulan PS yang telah disetujui per provinsi, dari 37 provinsi di Indonesia, Riau menempati posisi ke 17. Di sisi lain, konflik antara masyarakat dengan korporasi juga tak kunjung hilang.

Ketiga, Peraturan yang belum berkeadilan bagi lingkungan hidup dan masyarakat. DPR RI telah mengeluarkan daftar prolegnas 2025-2029. Begitu juga dengan DPRD Riau, telah menetapkan prolegda prioritas dalam masa jabatan periode 2024-2029. Salah satu perda yang masuk prioritas adalah Ranperda RTRWP Riau. RTRWP Riau merupakan peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Sayangnya pembahasan di DPRD Riau belum bisa diakses publik.

Keempat, korupsi SDA yang melibatkan Taipan Surya Darmadi pemilik PT Darmex Grup. Surya Darmadi dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 2,2 triliun karena kasus pencucian uang atas membangun perkebunan secara ilegal di kawasan hutan. Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung. Namun korupsi suap yang melibatkan Surya Darmadi yang ditangani oleh KPK justru diSP3kan. Pada 2024 ini juga terjadi pergantian Pimpinan KPK. Aktor-aktor yang terpilih didominasi latar belakang unsur APH lain seperti Polri, Kejaksaan hingga hakim. Terdapat kontroversi dan penolakan atas terpilihnya Pimpinan KPK 2024-2029.

Kelima, pergantian rezim, mulai dari Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota. Jikalahari juga memantau kabinet merah putih yang dibentuk oleh Prabowo. Selain itu juga terdapat Pilkada serentak di seluruh Indonesia Provinsi Riau akan memiliki Gubernur Baru, setelah KPU Riau menetapkan pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto sebagai pemenang Pilkada dan tidak adanya gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Jikalahari memberikan catatan terhadap Cagub-Cawagub terpilih sejak sebelum Pilkada.⁶⁹

Keenam, sepanjang tahun ini, Jikalahari juga memproduksi beberapa kajian terkait sumber daya alam seperti, kajian komitmen NDPE dan pembiayaan industri pulp dan kertas di Indonesia. Lalu ada kajian peran sektor pendanaan untuk hentikan kerusakan ekologis dan konflik sosial dan berbagai *policy brief* terkait.

⁶⁷ <https://mediacenter.riau.go.id/read/87576/ditarget-13-juta-ha-luasan-perhutanan-sosial-.html>

⁶⁸ <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>

⁶⁹ Policy Brief Pilkada Riau 2024 <https://jikalahari.or.id/analisis/komitmen-ekologis-cagub-cawaqub-riau-hanya-formalitas-tak-ada-aksi-nyata/>



Ketujuh, sepanjang 2024, Jikalauhari juga aktif merespon berbagai isu lingkungan hidup dan kehutanan, baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global. Di antaranya merespon pembohongan publik oleh APRIL Grup pada COP 29 di Azerbaijan serta berbagai isu SDA-LH yang berkembang di tengah-tengah publik.

Dari ketujuh persoalan di atas justru mengarah pada degradasi kualitas lingkungan hidup. Perlu ada upaya serius untuk mendorong pemerintahan baru baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Oleh Jikalauhari merekomendasikan:

Pertama, kepada Presiden Prabowo untuk tegas menjalankan visi-misi untuk menindak tegas dan menghukum seberat-beratnya pelaku perusak hutan dan melindungi ekologis dengan tidak menganak-emaskan pengusaha-pengusaha perusak Ekologis.

Kedua, mendorong Presiden dan DPR RI membuat Undang-Undang yang memperhatikan karakteristik dan fakta lapangan yang khas termasuk sosial budaya masyarakat. Merevisi undang-undang bermasalah, UU 11 Tahun 2020 jo UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Ketiga, Gubernur Riau dan DPRD membahas Perda RTRWP Riau dan perda lainnya yang mengedepankan penyelamatan hutan alam tersisa, serta mengakomodir hak masyarakat adat serta proses pembentukan yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Keempat, Gubernur Riau mempercepat penyelesaian konflik SDA dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan tempatan serta mempercepat realisasi ruang kelola masyarakat berupa perhutanan sosial mulai dari perizinan hingga ke pada pengelolaannya.



Lampiran

A. Tabel Tutupan Hutan Tersisa dan Deforestasi Riau 2024

	TUTUPAN HUTAN (ha)	DEFORESTASI (ha)
1982	6.727.546	
2002	3.380.328	3.347.218
2012	2.005.565	1.374.763
2015	1.645.206	360.359
2017	1.489.410	155.796
2018	1.475.741	13.669
2019	1.442.669	33.072
2020	1.427.363	15.306
2022	1.398.582	28.781
2023	1.377.884	20.698
2024	1.339.437	22.172
	TOTAL DEFORESTASI	5.371.834

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

B. Tabel Tutupan Hutan Tersisa dan Deforestasi per Kabupaten di Riau 2024

KABUPATEN	TUTUPAN HUTAN ALAM 2024	DEFORESTASI 2024	Persentase Deforestasi (%)
Pelalawan	226.245	1.563	7
Indragiri Hulu	204.508	1.056	5
Indragiri Hilir	202.769	1.684	8
Kampar	165.925	3.703	17
Siak	139.059	1.758	8
Bengkalis	106.929	2.531	11
Kepulauan Meranti	85.454	1.293	6
Kuantan Singingi	68.786	2.646	12
Rokan Hilir	63.816	2.026	9
Rokan Hulu	53.955	2.896	13
Kota Dumai	21.990	1.016	5
Grand Total	1.339.437	22.172	100

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

C. Tabel Tutupan Hutan Tersisa di Kawasan IUPHHKHT 2024

PERUSAHAAN	GROUP	LUAS HUTAN
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	APRIL	39.182,17
PT SUMATERA RIANG LESTARI	APRIL	20.735,21
PT PERANAP TIMBER (DH. PTUNISERAYA)	APRIL	18.807,47
PT MADUKORO	APRIL	6.639,49
CV BHAKTI PRAJA MULIA	APRIL	3.441,54
PT SELARAS ABADI UTAMA	APRIL	3.143,27
PT MITRA KEMBANG SELARAS	APRIL	2.354,12



PT EKAWANA LESTARI DARMA	APRIL	2.229,84
PT TRIOMAS FDI	APRIL	2.000,29
PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (DH.SIAK RY TBR)	APRIL	1.727,87
PT RIMBA MUTIARA PERMAI	APRIL	1.650,30
CV HARAPAN JAYA	APRIL	1.215,60
CV ALAM LESTARI	APRIL	744,19
PT NUSA WANA RAYA	APRIL	584,81
PT SERAYA SUMBER LESTARI	APRIL	499,81
PT WANANUGRAHA BINALESTARI	APRIL	478,59
CV MUTIARA LESTARI	APRIL	309,68
PT BINA DAYA BINTARA	APRIL	289,01
PT RIMBA PERANAP INDAH	APRIL	285,79
PT MITRA TANI NUSA SEJATI	APRIL	241,02
PT RIMBA LAZUARDI	APRIL	94,81
PT TUAH NEGERI	APRIL	39,76
KUD BINA JAYA LANGGAM	APRIL	36,71
PT NUSA PRIMA MANUNGGAL	APRIL	12,34
PT CITRA SUMBER SEJAHTERA	APRIL	8,96
PT BUKIT BATUBUH SEI INDAH	APRIL	7,93
CV PUTRI LINDUNG BULAN	APRIL	2,28
CV Riau Bina Insani	APRIL	0,25
PT Satria Perkasa Agung (SK 244)	APP	33.398,02
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	APP	18.836,10
PT PUTRA RIAU PERKASA	APP	15.793,22
PT ARARA ABADI	APP	10.138,29
PT BALAI KAYANG MANDIRI	APP	9.632,58
PT SEKATO PRATAMA MAKMUR	APP	6.607,57
PT BINA DUTA LAKSANA	APP	5.511,40
PT RUAS UTAMA JAYA	APP	3.488,46
PT Satria Perkasa Agung (SK 19)	APP	3.423,62
PT SUNTARA GAJAPATI	APP	2.877,96
PT BUKIT BATU HUTANI ALAM	APP	2.510,52
PT Satria Perkasa Agung Unit (SK 102)	APP	1.953,25
PT PERAWANG SUKSES PERKASA	APP	1.926,33
PT RIAU INDO AGROPALMA	APP	1.601,28
PT MITRA HUTANI JAYA	APP	501,43
PT RIMBA MANDAU LESTARI	APP	228,91
PT BINA DAYA BENTALA	APP	19,69
PT DIAMOND RAYA TIMBER	UNKWON	47.667,66
Grand Total		272.879,38

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024



D. Tabel Deforestasi di Kawasan IUPHHKHT 2024

PERUSAHAAN	GROUP	LUAS DEFORESTASI
PT DIAMOND RAYA TIMBER	UNKWON	1.709,71
PT SUNTARA GAJAPATI	APP	488,18
PT PERAWANG SUKSES PERKASA	APP	250,92
PT SUMATERA RIANG LESTARI	APRIL	219,68
PT BALAI KAYANG MANDIRI	APP	149,56
PT SATRIA PERKASA AGUNG (SK 244)	APP	139,96
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	APRIL	110,75
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	APP	105,34
CV MUTIARA LESTARI	APRIL	80,10
PT SELARAS ABADI UTAMA	APRIL	55,65
PT ARARA ABADI	APP	49,75
PT RUAS UTAMA JAYA	APP	46,34
PT BINA DUTA LAKSANA	APP	41,69
PT NUSA WANA RAYA	APRIL	37,40
PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (DH.SIAK RY TBR)	APRIL	19,13
PT SEKATO PRATAMA MAKMUR	APP	11,29
PT RIAU INDO AGROPALMA	APP	7,64
PT MITRA TANI NUSA SEJATI	APRIL	0,95
PT RIMBA MUTIARA PERMAI	APRIL	0,57
PT BUKIT BATU HUTANI ALAM	APP	0,06
Grand Total		3.524,70

Sumber: Olah Data Jikalauhari 2024

E. Tabel Tutupan Hutan Tersisa di Perkebunan Sawit Riau 2024

PERUSAHAAN	LUAS HUTAN
PT BINA RUPAT SEPANG LESTARI	3.648,13
PT SURYA BUANA BERSAMA	3.294,63
PT BARITO RIAU JAYA	3.179,19
PT UNI SERAYA	2.796,37
PT MARITA MAKMUR JAYA	1.424,08
PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	1.171,97
PT Arvena Sepakat	1.153,30
PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO (LOKASI A)	1.144,36
PT BASKARASATRIATAMA RIAU	929,65
PT MUSIM MAS	859,37
PT SIDOMARGA PERKASA	858,63
PT TANI SUBUR MAKMUR	544,57
PT SAKTI SAWIT JAYA	491,75
PT SUMBER MUTIRA INDAH PERSADA	472,42
PT SABIRA NEGERIUTAMA	457,52
PT TOBA INDAH	445,30
PT SAWIT ROKAN SEMESTA	430,41
PT TRIOMAS FDI	412,84
PT LANGGAM INTI HIBRINDO	411,43



PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS	383,80
PT WANA SUBUR SAWIT INDAH	360,53
PT KARYA TAMA BAKTI MULYA	338,59
PT TRI BAKTI SARIMAS	319,74
PT TANI SWADAYA PERDANA	305,42
PT PERMATA SAWIT PERMAI	290,81
PT MANDIRI ABADI SEJAHTERA	269,66
PT RIAU SAKTI TRANSMANDIRI	208,46
PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	201,16
PT SARI LEMBAH SUBUR	169,41
PT Agroraya Gematrans	168,24
PT SINDORA SERAYA (BLOK I)	164,37
PT PERKEBUNAN II (S. AIR HITAM)	163,32
PT MESKOM AGRO SARIMAS	163,27
PT ANUGERAH KARYA LESTARI	154,20
PT ALAM SARI LESTARI	145,77
PT SURYA BRATASENA PLANTATION	139,35
PT DUET RIJA	130,73
PT BERTUAH ANEKA YASA	130,37
PT TRISETYA USAHA MANDIRI	128,22
PT SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA	122,24
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA	112,31
PT SURYA KERITANG PERKASA	108,31
PT MITRA UNGGUL PUSAKA	101,66
PT TASMA PUJA	73,98
PT SAFARI RIAU	73,96
PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI	69,38
PT PERKEBUNAN II (S. AIR BAYAS)	58,65
PT KARYATAMA BAKTI MULIA	54,51
PT TRIDAYARI MANDIRI UTAMA	52,95
PT NUSAESA BINA	49,90
PT AGRO SARIMAS INDONESIA	46,82
PT TH Indo Plantations	46,78
PT SRI ANUGRAH	44,97
PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	44,62
PT AGRI PRIMA	41,25
PT SURYA INTI SARI RAYA	38,58
PT GELORA SAWITA MAKMUR	38,48
PT SUNTAI JAYA Satria	36,73
PT NURINTA BAGANYASA	35,03
PT BAYU AGRIFIKA	32,32
PT PADASA ENAM UTAMA	30,58
PT Kimia Tirta Utama	29,70
PT MEKARSARI ALAM LESTARI (ADDENDUM)	24,18
PT TESO INDAH	19,66
PT PERKEBUNAN V (PIR SEI. PAGAR)	19,43



PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI (KELOMPOK B)	18,03
PT CILIANDRA PERKASA	17,69
PT SINAR SAWIT SEJAHTERA	17,57
PT KURNIA MAS	15,89
PT BANYU BENING UTAMA	12,67
PT PEPUTRA SUPRA JAYA	10,86
PT INTI INDO SAWIT SUBUR	9,92
PT AGRA CAHAYA KEUMALA	8,86
PT BUMI DAYA PLANTATION	8,04
PT PUSAKA MEGAH BUMI NUSANTARA	4,47
PT KOKONAKO INDONESIA	3,09
PT RAMAJAYA PRAMUKTI (III/. S.TIBUN)	2,31
PT Surya Dumai Agrindo	1,90
PT BLANGKOLAM	0,98
PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI	0,68
PT PULAU KUNDUR PRAKARSA	0,12
PT ROKAN ADI RAYA	0,01
Grand Total	30.001,44

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

F. Tabel Deforestasi di Perkebunan Sawit Riau 2024

PERUSAHAAN	LUAS DEFORESTASI
PT WANA SUBUR SAWIT INDAH	343,57
PT UNI SERAYA	265,95
PT TOBA INDAH	194,56
PT TANI SWADAYA PERDANA	160,34
PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO (LOKASI A)	154,65
PT Agroraya Gematrans	121,59
PT Arvena Sepakat	120,44
PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	116,18
PT TRI BAKTI SARIMAS	97,86
PT LANGGAM INTI HIBRINDO	95,51
PT SINDORA SERAYA (BLOK I)	83,82
PT BUMI DAYA PLANTATION	68,77
PT KARYATAMA BAKTI MULIA	60,97
PT TRIOMAS FDI	56,25
PT SAWIT ROKAN SEMESTA	53,92
PT BARITO RIAU JAYA	49,18
PT KOKONAKO INDONESIA	45,30
PT GELORA SAWITA MAKMUR	40,72
PT MARITA MAKMUR JAYA	38,97
PT PERMATA SAWIT PERMAI	37,75
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA	33,18
PT AGRI PRIMA	27,14
PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	22,29
PT SURYA KERITANG PERKASA	21,23



PT MITRA UNGGUL PUSAKA	21,07
PT KARYA TAMA BAKTI MULYA	19,42
PT SURYA BUANA BERSAMA	13,39
PT SINAR SAWIT SEJAHTERA	10,87
PT SRI ANUGRAH	10,66
PT MEKARSARI ALAM LESTARI (ADDENDUM)	10,07
PT CILIANDRA PERKASA	8,80
PT TANI SUBUR MAKMUR	7,73
PT NUSAESA BINA	6,84
PT SABIRA NEGERIUTAMA	2,85
PT MANDIRI ABADI SEJAHTERA	2,48
PT PEPUTRA SUPRA JAYA	0,93
PT TESO INDAH	0,74
PT FLORA WAHANA TATA	0,20
Grand Total	2.426,19

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

G. Tabel Tutupan Hutan Tersisa di Kawasan Konservasi Riau 2024

NAMA KAWASAN	LUAS HUTAN
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	120.545,56
TN. BUKIT TIGAPULUH	89.281,23
SM. KERUMUTAN	84.232,69
SM. GIAM SIAK KECIL	39.217,93
TN. ZAMRUD	27.576,19
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	13.465,71
SM. BUKIT BATU	12.337,38
HL. BATANG ULAK I	12.172,29
HL. PULAU BAKUNG	10.503,81
CA. BUKIT BUNGKUK	10.141,29
HL. SUNGAI ROKAN	8.226,85
TN. TESO NILLO	7.327,18
HL. BATANG ULAK II	7.072,53
CA PULAU BERKEY	6.558,35
SM TASIK METAS	6.465,99
HL. PULAU AIR TAWAR II	5.983,35
HL. PULAU PISANG	5.185,54
HL. BUKIT SULIGI	4.430,42
SM. TASIK METAS	3.770,18
SM. TASIK TANJUNG PADANG	3.743,41
SM. TASIK BELAT	2.199,90
HL. PULAU CAWAN	1.874,33
HL. TASIK AIR PUTIH	795,93
TWA. BULUH CINA	615,58
HL. PULAU AIR TAWAR III	461,62
HL. TASIK PENYAGUN	244,36
HL. SENTAJO	180,62



SM. BALAI RAJA	136,08
HL. TASIK NAMBUS	115,78
HL. PULAU AIR TAWAR IV	76,01
HW. SUNGAI DUMAI	5,23
Grand Total	484.943,33

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

H. Tabel Deforestasi di Kawasan Konservasi Riau 2024

NAMA KAWASAN	LUAS DEFORESTASI	PERSENTASE DEFORESTASI (%)
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	917,91	21,49
TN. TESSO NILLO	829,73	19,43
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	824,55	19,31
HL. BUKIT SULIGI	610,64	14,30
TN. BUKIT TIGAPULUH	276,52	6,47
HL. BATANG ULAK I	253,45	5,93
HL. SUNGAI ROKAN	173,38	4,06
HL. BATANG ULAK II	116,30	2,72
HL. PULAU BAKUNG	85,86	2,01
SM. GIAM SIAK KECIL	63,99	1,50
HL. PULAU PISANG	49,20	1,15
SM. KERUMUTAN	38,74	0,91
HL. PULAU AIR TAWAR III	15,10	0,35
SM. BUKIT BATU	10,47	0,25
HL. TASIK NAMBUS	3,82	0,09
CA. BUKIT BUNGKUK	1,34	0,03
Grand Total	4.270,99	

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024